



Tahun 2021

PERUBAHAN RENJA



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT**

Jl. Pasteur No. 25 Bandung



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS KESEHATAN

Jl. Pasteur No. 25 Telp. (022) 421800, 4218572 Fax (022) 4236721 BANDUNG 40171
Website: diskes.jabarprov.go.id, email: tikdiskesjabar@gmail.com

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR : 050 /1668 /PP

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : 050 / 354 / PP TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 050/354/PP ;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 membawa implikasi terhadap Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, sehingga dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa sebagai akibat terjadinya penambahan dan/atau pengurangan kegiatan, pergeseran rekening, dan penambahan target kinerja perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor : 050/1668/PP tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021.
- Memperhatikan :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara RI nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 581);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1447);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2010, Nomor 22 Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 71 Tahun 2017 tentang Tugas Pokko, Fungsi, Rincian Tugas unit, dan Tata Kerja unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
22. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 050/2307/PP tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
23. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021 adalah perubahan dokumen perencanaan tahun 2021 yang dimulai sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 ;
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan;
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi:
BAB I Pendahuluan
BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
BAB IV Penutup
- KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, adalah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 30 September 2021

an. GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT,



dr. R. NINA SUSANA DEWI, Sp.PK(K)., M.Kes., MMRS
Pembina Utama Madya
NIP. 19621203 198803 2 001

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat telah selesai disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dimana pada pasal 360 ayat satu sampai dengan ayat 3, menyebutkan bahwa perangkat daerah menyusun rancangan Perubahan bahan Renja perangkat daerah yang dilakukan setelah perangkat daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah, dimana penyusunannya berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sampai dengan triwulan II tahun berkenaan.

Pada akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberi petunjuk kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan kesehatan dan memberikan manfaat untuk masyarakat Provinsi Jawa Barat.

Bandung, September 2021
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT

Dr. R. NINA SUSANA DEWI, Sp.PK(K), M.Kes., MMRS
Pembina Utama Madya
NIP. 19621203 198803 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Landasan Hukum.....	2
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
	1.4 Sistematika Penulisan.....	5
II.	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINKES TAHUN 2019, TAHUN 2020 dan TRIWULAN I TAHUN 2021	7
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	7
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan.....	95
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	207
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	211
	2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.....	219
III.	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021	224
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	224
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja.....	228
	3.3 Program dan Kegiatan.....	230
IV.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	236
V.	PENUTUP	279

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d Tahun 2019 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	8
2.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019	95
2.3	Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020	96
2.4	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d Tahun 2020 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	103
2.5	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d Tahun 2021 (Triwulan 1) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	169
2.6	Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2019	195
2.7	Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020	196
2.8	Capaian Indikator Kinerja Program/Eselon III Tahun 2019, 2020 dan 2021	197
2.9	Review terhadap rancangan RKPD tahun 2021 Provinsi Jawa Barat	212
2.10	Usulan Program dan Kegiatan Hibah Tahun 2021 Melalui RKPD Jabaronline	219
2.11	Usulan Program dan Kegiatan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Tahun 2021 Melalui RKPD Jabaronline	220
4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Provinsi Jawa Barat	236

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi atau Rencana Startegis Daerah (Renstrada) yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta hasil evaluasi pembangunan tahun yang lalu, dan memuat isu startegis, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan indikatif, baik dilaksanakan oleh pemerintah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 dan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003, RKPD merupakan pedoman penyusunan rancangan APBD, dengan konsekwensi bahwa rencana kerja, program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD harus terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Dinas Kesehatan wajib membuat dokumen rencana kerja, yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah dan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan paska penanganan virus COVID-19. Seperti dipahami bahwa penyebaran COVID-19 telah menjadi masalah kesehatan dunia. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai *Publik Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) dan pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit Novel Coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Corona Virus Disease (COVID-19), hingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, penambahan kasus positif di Indonesia maupun Jawa Barat menunjukkan perkembangan meningkat dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus positif dan persebaran semakin meluas di Jawa Barat. Hal ini

memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah tahun 2020.

Selain tantangan kesehatan, secara administrasi Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini mengatur perencanaan pada nomenklatur program dan kegiatan serta sub kegiatan untuk pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya pemerintah daerah wajib untuk melakukan penyesuaian nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan dimulai pada Renja Tahun 2021. Namun dalam perkembangannya yang mengikuti perubahan arah kebijakan baik di pusat dan di daerah serta dinamika kondisi perekonomian dan keuangan daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap dokumen Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2021.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, maka Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mempunyai kedudukan yang strategis dalam upaya mendukung penyelenggaraan program/kegiatan pembangunan tahunan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya seperti:

1. Perubahan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2021 memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan urusan wajib kesehatan di Provinsi Jawa Barat yang berpedoman kepada Perubahan SKPD tahun 2021
2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu instrument evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan wajib kesehatan. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja ini dapat diketahui pencapaian kinerja RPJMD dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 13. Keputusan Menteri Keuangan No 6/KM 7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Operasional Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 seri E, Tambahan Lembaran Daerah no 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 seri E, Tambahan Lembaran Daerah no 87);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
17. Peraturan Daerah provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pemabangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023,
18. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kepesertaan dan Pembiayaan Penerima Bantuan Iuran Daerah Provinsi Jawa Barat;
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Jawa Barat
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Rumah Sakit Provinsi Jawa Barat;
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Tugas Pokok Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan Corona Virus Disease Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 445/Kep.1751-Dinkes/2014 tentang Penetapan Fasiilitas Pelayanan Rujukan Tertinggi pada Wilayah Cakupan Rujukan Provinsi.
23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 6 tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Noor 159 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2021;

25. Keputusan Gubernur Jawa Barat No.443/Kep.189-Huham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Barat.
26. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 13912/KS.01/PP tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor : 050/2307/PP tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 dimaksudkan untuk penyesuaian terhadap perubahan kebijakan dan kebutuhan akibat kondisi pandemic dan kondisi lainnya agar terjadi sinergitas dan integrasi perencanaan/penganggaran program/kegiatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

1.3.2. Tujuan

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 bertujuan sebagai acuan/pedoman bagi :

- a. Bidang/Seksi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam menyusun perubahan program dan kegiatan tahun 2021.
- b. Balai/Rumah Sakit di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam menyusun perubahan program dan kegiatan tahun 2021.

1.4. Sistematika

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINKES TAHUN 2019, Tahun 2020 dan Triwulan 1 tahun 2021

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN
TAHUN 2019, TAHUN 2020, DAN TRIWULAN I TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 juga harus dilakukan evaluasi terhadap dokumen rencana kerja tahun 2019, 2020. Evaluasi yang dilakukan terhadap Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk melihat: (1) Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; (2) Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan; dan (3) Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Secara umum Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun teknis secara proporsional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik antara Kepala Dinas Kesehatan beserta Bidang dan UPTD yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Berikut rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat s.d. 2019 sebagaimana tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d Tahun 2019
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT				100%	58,390,196,733			8,103,858,549	7,117,360,780	87.83
1.02.01.010.006.	Penyelamatan Ibu dan Bayi baru lahir	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN CAKUPAN PERSALINAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN MINIMAL 88%	1) Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan informasi mengenai informasi teknis Pelaksanaan Pendampingan Penyelamatan ibu dan bayi baru lahir di provinsi; (12 Kab/Kota)* 2) Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan informasi hasil Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Penyelamatan ibu dan bayi baru lahir di provinsi; (11 Kab/Kota) 3) Jumlah Petugas Kesehatan yang mengikuti Orientasi sebagai Tim Pendamping Kabupaten dalam Penyelamatan ibu dan bayi baru lahir di provinsi; (30 Org) 4) Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Penyeliaan Fasilitatif di 5 kab; 5) Jumlah Kab/Kota yang	100%	11,408,150,000	63%	13.25	1,841,031,250	1,512,006,300	82.13

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>dilakukan Pendampingan Klinis P4- K1 di 5 kab;</p> <p>6) Jumlah Dokumen Hasil MoU Rujukan Kab. Sumedang;</p> <p>7) Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Maklumat Pelayanan di PKM dan RS Kab. Sumedang;</p> <p>8) Jumlah Petugas yang mengikuti Workshop pengenalan dan implementasi Alat Pantau Kinerja Rujukan (APKJR) Kab. Sumedang; (30 Orang)</p> <p>9) Jumlah Dokumen hasil Audit Kematian Maternal Dan Perinatal Kab. Sumedang; (1 Dok)</p> <p>10) Jumlah Laporan hasil Penyeliaan Fasilitatif Kab. Sumedang; (1 Lapo)</p> <p>11) Jumlah Laporan Hasil Pendampingan Klinis P1 - P2 Kab. Sumedang; (1 Lap)</p> <p>12) Jumlah Dokumen Laporan hasil Kesepakatan Penyamaan Persepsi dan Penyusunan Organisasi dan Penyusunan POKJA Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru lahir di Kab Ciamis;</p> <p>13) Jumlah Laporan Hasil</p>							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Assesment di Fasyankes Kab. ciamis; 14) Jumlah Laporan Hasil Penetapan dan Sosialisasi Fasyankes Kab. di ciamis; 15) Jumlah Kabupaten yang melaksanakan Bimbingan Teknis Klinis (K1) (1 Kab) 16) Jumlah Fasyankes yang mendapatkan Pengenalan Tool Klinis RS dan Puskesmas di Kab. ciamis; (6 Fasyankes) 17) Jumlah Dokumen Hasil Audit Kematian Maternal dan Perinatal di ciamis							
1.02.01.010.007.	Peningkatan Program Kesehatan Keluarga			100%	14,251,300,000		10.43	1,693,590,795	1,486,229,506	87.76
1.02.01.010.005.	Peningkatan Gizi Masyarakat	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN CAKUPAN PEMBERIAN TABLET TAMBAH DARAH PADA BUMIL MINIMAL 95%	1) Jumlah Laporan dan RTL Hasil Rapat Koordinasi teknis program gizi; 2) Jumlah Laporan dan RTL Evaluasi Peningkatan Gizi Masyarakat; 3) Jumlah Laporan dan RTL Orientasi PMBA; 4) Jumlah Laporan dan RTL hasil	100%	8,451,497,700	86.17%	13.07	1,237,597,700	1,104,646,641	89.26

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			HGN; 5) Jumlah Dokumen Laporan dan RTL Pekan ASI Sedunia; 6) Jumlah Laporan dan RTL Evaluasi Paska pelatihan/ Orientasi PMBA; 7) Jumlah Laporan dan RTL Pelacakan Kasus Gizi buruk; 8) Jumlah Laporan dan RTL Pendampingan cakupan indikator; 9) Jumlah Laporan dan RTL Evaluasi program gizi di 140 Daerah lokus; 10) Jumlah Laporan dan RTL Dukungan manajemen program gizi; 11) Jumlah Laporan dan RTL Hasil konsultasi pusat; 12) Jumlah Laporan dan RTL hasil Dukungan penyusunan hasil BPB; 13) Jumlah Laporan dan RTL hasil dan RTL Evaluasi kegiatan program gizi; 14) Jumlah Laporan dan RTL hasil pemenuhan undangan dalam provinsi							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.01.009.002.	Penguatan STBM dalam Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi	PERSENTASE PENDUDUK YANG MENGGUNAKAN AIR MINUM YANG BERKUALITAS	1) Jumlah Dokumen Laporan hasil Workshop Lesson Learn STBM; 2) Jumlah Petugas yang dilatih Wirausaha sanitasi; 3) Jumlah Dokumen SK tenaga pendamping program; 4) Jumlah Dokumen hasil Monev; 5) Jumlah Hasil monev STBM; 6) Jumlah dokumen hasil Monev pendampingan Pamsimas; 7) Jumlah Dokumen Hasil Monev pendampingan Kab/Kota Sehat; 8) Jumlah Dokumen hasil konsultasi ke pusat; 9) Jumlah Dokumen Laporan hasil memenuhi undangan pusat.	100%	3,648,220,000	77.84%	15.83	620,398,373	577,618,504	93.10
1.02.01.009.003.	Pengawasan Penyehatan Lingkungan TTU/ TPM dan Penyelenggaraan Ibadah haji bidang Kesling	PERSENTASE PENDUDUK MENGGUNAKAN JAMBAN SEHAT	1) Jumlah Dokumen Laporan Hasil kesepakatan pertemuan Koord Kesling RS; 2) Jumlah Laporan Hasil pemicuan STBM di DAS Citarum, 3) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Laboratorium Kesehatan; 4) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Kesepakatann Rakor DAS Citarum; 5) Jumlah Dokumen Laporan Hasil	95%	2,239,050,000	76.2%	15.50	368,244,679	347,103,304	94.26

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Monev TTU/TPM/RS; 6) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan HS Embarkasi; 7) Jumlah Dokumen Laporan Hasil HS TPM Transit Jemaah Haji dan; 8) Jumlah Dokumen Laporan hasil penilaian asrama haji.							
1.02.01.009.001.	Peningkatan Penyehatan Lingkungan Kerja (Kesehatan Kerja dan Olah Raga)	PERSENTASE PUSKESMAS DI KABUPATEN/KOTA MENYELENGGARAKAN KESEHATAN KERJA DASAR	1) Jumlah Dokumen Laporan Hasil pendampingan GP2 SP Puskesmas di 18 Kab/Kota; 2) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Bimbingan Teknis Kesehatan Lingkungan Kerja Puskesmas di 18 Kab/Kota.	75%	1,158,171,000	76%	16.01	189,871,000	185,450,439	97.67
1.02.01.010.006.	Peningkatan Penyehatan Lingkungan Kesehatan Olahraga	PERSENTASE PUSKESMAS DI KABUPATEN/KOTA YANG MENYELENGGARAKAN KESEHATAN OLAH RAGA PADA KELOMPOK MASYARAKAT DI WILAYAH KERJANYA	1) Jumlah Dokumen Laporan hasil Pengukuran Kebugaran Jasmani Calon Jemaah Haji Puskesmas di 18 Kab/Kota;	75%	387,320,000	76%	0.00			#DIV/0!
1.02.01.008.001.	Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN CAKUPAN	1) Dokumentasi Hasil Kesepakatan dan RTL Pembinaan PHBS Rumah Tangga;	85.20%	10,324,713,126	48%	11.13	1,276,346,962	1,148,695,794	90.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		RUMAH TANGGA BERPHBS >60%	2) Dokumentasi Kegiatan dan RTL Sosialisasi Kesehatan Aktual Kepada Guru dan Osis di 5 kabkota; 3) Dokumentasi Hasil Kesepakatan dan RTL Pembentukan Poskestren Model; 4) Dokumentasi Hasil Kesepakatan dan RTL Monev PKRS; 5) Dokumentasi Bahan Kampanye/ILM Kesehatan di berbagai media dan event; 6) Dokumentasi Hasil Pengadaan dan RTL Distribusi Media Cetak; 7) Dokumentasi Hasil dan RTL Konsultasi ke Pusat/ Koordinasi ke Provinsi lain; 8) Dokumentasi Hasil Kegiatan dan RTL Hasil Workshop/Kursus/Seminar.							
1.02.01.008.002.	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Desa Siaga Aktif)	JUMLAH UNSUR MASYARAKAT TINGKAT PROVINSI YANG DILIBATKAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG	1) Dokumentasi Hasil Kesepakatan dan RTL Pembinaan Pengelolaan Desa Siaga Aktif; 2) Dokumentasi Kegiatan dan RTL Sosialisasi dan advokasi untuk jejaring, Toma dan Mitra	4	6,521,774,907	100%	11.59	876,777,790	755,610,292	86.18

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		KESEHATAN	Kesehatan; 3) Dokumentasi Hasil Kesepakatan dan RTL Model Peningkatan Strata Desa Siaga Aktif; 4) Dokumentasi Hasil Kesepakatan dan RTL Replikasi Emas di Kab Ciamis; 5) Dokumentasi Hasil Kegiatan dan RTL Olimpiade SBH; 6) Dokumentasi Hasil Kegiatan dan RTL Sosialisasi dan Advokasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;							
	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT									
1.02.01.03.011.009	pencegahan dan pengendalian penyakit menular TB	Persentase Keberhasilan Pengobatan TB (treatment Succes Rate)	1). Jumlah Dokumen Laporan hasil Pertemuan dengan Kab /Kota Mencapai Cakupan Pengobatan Semua Kasus TB yang diobati 90 % 2). Jumlah Dokumen Laporan dari 27 kab /Kota berbasis online	91%	6,416,524,680	76.59%	15.62	1,137,480,000	1,002,048,694	88.09

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			dengan aplikasi SITT 3) Jumlah dokumen Laporan pertemuan Peningkatan Pencegahan dan pengendalian TB pada Anak 4) Jumlah dokumen Laporan Logistik Program P2TB 5) Jumlah dokumen Laporan Tatalaksana penanggulangan Tuberkulosis sesuai permenkes nomor 67 tahun 2016 6) Jumlah dokumen Laporan kegiatan pengendalian Tuberkulosis dapat didiskusikan dengan Kab/Kota 7) Jumlah dokumen Laporan kegiatan Refreshing monev laboratorium untuk LRI di 27 kab/Kota 8) Jumlah dokumen kontrak tenaga pendamping Tuberkulosis terpenuhi 9) Jumlah dokumen pembentukan DPPM ditingkat provinsi 10) Jumlah dokumen pengembangan Koalisi Organisasi Propesi di 27 kab kota 11) Jumlah Dokumen 16 RS yang							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			tercantum di KMK 350 tahun 2017 melaksanakan layanan TB RO							
1.02.01.03.011.004	Pencegahan dan pengendalian HIV AIDS dan IMS	Persentase Pasien HIV yg di Obati	<p>1. Jumlah Kab/Kota mampu melaksanakan Skring HIV melalui Konseling Tes dan Mendorong Pasien HIV Positif Untuk mendapatkan Obat ARV</p> <p>2. Jumlah Kab/Kota tidak mengalami Stok Out Obat ARV dan Kebutuhan Logistik P2 HIV dapat Terpenuhi</p> <p>3. Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Tripel Eliminasi di 4 Wilayah (27 Kab/Kota)</p> <p>4. Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi Pusat berupa update kebijakan, Tatalasana, Strategi HIV AIDS dan IMS di Indonesia</p> <p>5. Jumlah Dokumen hasil Validasi Data HIV AIDS dan IMS</p> <p>6. Jumlah Dokumen Kesepakatan Jejaring Keja Terkait Tripel Eliminasi (HIV, Sifilis dan Hepatitis) pada Ibu Hamil dan Populasi Kunci di 27 k/k</p> <p>7. Jumlah dokumen hasil Validasi dat TB dan HIV</p>	50%	6,089,837,250	104	15.00	997,500,000	913,182,112	91.55

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			8. Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Manajemen Program sesuai pedoman 9. Jumlah Dokumen Kontrak petugas Logistik, 10. Jumlah Dokumen Kontrak petugas Pendamping							
1.02.01.03.011.010	Pencegahan penyakit penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I)	Persentase Desa/Kelurahan yang mencapai UCI > 90%	1). Jumlah kegiatan Audit atas dugaan Kasus KIPI yang dilakukan oleh Komda KIPI Jawa Barat; 2) Jumlah kab/kota mendapatkan fasilitasi pengelolaan Cold Chain yang sesuai standar; 3) Jumlah kab/kota mendapatkan fasilitasi Persiapan dan Pelaksanaan BIAS oleh TP UKS tingkat Provinsi; 4) Jumlah kab/kota yang mendapatkan fasilitasi teknis untuk mencapai target cakupan IDL dalam rangka pencapaian UCI; 5) Jumlah penyusunan laporan Feedback cakupan Imunisasi dan PWS; 6) Jumlah Tenaga Pendamping Teknis Program yang diberikan honor dari APBD Provinsi selama	90%	3,574,140,000	86.11	14.21	574,140,000	507,833,170	88.45

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1 tahun; 7) Jumlah Dokumen Honor diberikan kepada tenaga ahli KOMDA KIPI Jawa Barat atas jasa pengkajian kasus KIPI; 8) Jumlah Dokumen Kab/Kota yang dilakukan pemantauan/investigasi atas laporan dugaan Kasus Kejadian Ikutan Imunisasi (KIPI) oleh Dinkes Provinsi dan KOMDA KIPI Jawa Barat; 9) Jumlah Dokumen Upaya peningkatan koordinasi dan terfasilitasinya permasalahan teknis program Imunisasi Provinsi Jawa Barat dari Kemenkes RI; 10) Jumlah peserta Kab/Kota dan Provinsi yang hadir pada pertemuan peningkatan evaluasi Program Imunisasi 2019 dan tersosialisasi up date Program 2020; 11) Jumlah peserta kab/kota dan Provinsi yang mendapatkan sosialisasi tentang pengelolaan Cold Chain yang berkualitas; 12) Jumlah Peserta Mengikuti							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Seminar Pekan Imunisasi							
1.02.01.03.011.007	Pengendalian penyakit menular ISPA	Persentase Kab/Kota yg 50 % Puskesmas melaksanakan tatalaksana pneumonia balita sesuai standar	<p>1. Diperoleh arahan dan rekomendasi dari Kemenkes terhadap masalah-masalah ISPA di Jawa Barat</p> <p>2. Diperoleh dokumen Kesepakatan pembagian peran masing-masing sektor didalam penanggulangan Pandemi Influenza</p> <p>3. Diperolehnya dokumentasi kesepakatan terhadap peranan masing-masing Kab/Kota di dalam Pencegahan dan Pengendalian ISPA</p> <p>4. Diperolehnya Peningkatan dalam tatalaksana dan penanggulangan ISPA di Kab/Kota sesuai SOP</p>	65%	1,282,840,000	92.31	14.75	198,000,000	189,279,250	95.60
1.02.01.03.011.003	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Hepatitis dan ISP	Persentase kab/kota yang melakukan deteksi dini hepatitis B pada Ibu Hamil	<p>1) Jumlah Dokumen kesepakatan perencanaan & evaluasi program HPISP</p> <p>2) Jumlah petugas di refreshing Tatalaksana Kasus</p> <p>3) Jumlah Dokumen kesepakatan dengan Rumah Sakit untuk</p>	100%	1,739,953,500	85	14.54	279,720,000	252,908,500	90.41

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			pelaksanaan Deteksi Dini Hepatitis B							
1.02.01.03.011.002	Pencegahan dan pengendalian DBD	Persentase kab/kota yang mencapai IR DBD < 49/100.000 pddk	<p>1. Jumlah Dokumen Laporan Hasil arahan dan rekomendasi dari Kemenkes terhadap masalah-masalah di Jawa Barat</p> <p>2. Jumlah Dokumen Hasil Kesepakatan pembagian peran masing-masing sektor didalam Pengendalian DBD</p> <p>3. Jumlah Dokumentasi Hasil kesepakatan terhadap peranan masing-masing Faskes di dalam Pencegahan dan Pengendalian DBD</p> <p>4. Peningkatan dalam tatalaksana dan penanggulangan kasus DBD sesuai SOP</p> <p>5. Jumlah Dokumen Laporan hasil monitoring terkait tatalaksana kasus</p> <p>6. Jumlah Laporan pencapaian program satu rumah satu jumentik di wilayahnya sesuai target</p>	96%	1,944,081,183	72.92	13.42	300,000,000	260,858,050	86.95
1.02.01.03.011.001	Pengendalian penyakit malaria	Persentase Kab/kota yang	1. Jumlah Dokumen Laporan Hasil arahan dan rekomendasi dari	100%		85	12.23			79.28

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		sudah eliminasi malaria	Kemendes terhadap masalah-masalah di Jawa Barat 2. Jumlah Dokumen Hasil Kesepakatan pembagian peran masing-masing sektor dalam percepatan eliminasi malaria 3. Jumlah Dokumen Hasil kesepakatan terhadap peranan masing-masing Fasilitas kesehatan di dalam tatalaksana kasus 4. Jumlah Dokumen hasil monitoring terkait tatalaksana kasus 5. Jumlah Dokumen hasil Assessment Pengendalian Vektor Terpadu		1,348,868,328			208,150,000	165,020,050	
1.02.01.03.011.008	Pengendalian penyakit kusta	Proporsi cacat kusta TK II	1). Membuat MOU 2) Petugas di refreshing Tatalaksana Kasus 3) Data di Validasi 4) Permasalah kusta didiskusikan di Pusat 5) permasalahan kusta didiskusikan di Kabupaten dan puskesmas 6) Mengetahui keberhasilan di Daerah tujuan	9%	4,575,000,000	100	15.93	756,188,056	728,628,948	96.36

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			7) Mengetahui Keberhasilan Provinsi Lain dalam Menurunkan Stigma Kusta							
1.02.01.03.011.006	Pengendalian penyakit filariasis dan kecacingan	Proporsi kab/kota yang mencapai eliminasi filariasis	1) Jumlah dokumen kesepakatan pada 27 Kab/Kota melaporkan Filariasis & Kecacingan berbasis online dengan aplikasi e-filca 2) Jumlah dokumen kontrak pengadaan buku pedoman P2 Cacingan 3) Jumlah Laporan cakupan POPM filariasis di 3 Kabupaten mencapai > dari 65% dari jumlah penduduk Kab/Kota 4) Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan antigen sebagai evaluasi penularan kejadian filariasis dapat dilakukan sesuai dengan prosedur 5) Jumlah Laporan Hasil kegiatan pengendalian filariasis dapat didiskusikan dengan Kab/Kota 6) Jumlah Laporan Hasil kegiatan pengendalian cacingan dapat dilakukan pemecahan masalah pada II Kab/Kota non stunting 7) Jumlah Tenaga pendamping	73%	2,052,964,000	36.99	14.03	347,950,000	288,083,570	82.79

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Filariasis dan Cacingan 8) Jumlah Dokumen Kebijakan & Strategi Pengendalian Filariasis dan Kecacingan dapat terupdate secepatnya							
1.02.01.03.011.005	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Zoonosis	Persentase kasus gigitan hewan penular rabies ditatalaksana sesuai standar	1. Jumlah Kab/ Kota Melaksanakan Kasus Zoonosis Sesuai Standar 2. Jumlah Dokumen informasi terbaru terkait pedoman, tatalaksana kasus Zoonosis di indonesia dan di jawa barat 3. Jumlah Laporan Hasil Pertemuan Jejaring P2 Zoonosis di Daerah Perbatasan Provinsi	100%	2,530,408,242	88	14.42	438,000,000	364,863,750	83.30
1.02.01.03.011.011	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM Terpadu (PANDU)	Dokumen hasil evaluasi Tahun 2018 program DMGM dokumen hasil kesepakatan koordinasi; jumlah peserta yang mengikuti WS; jumlah peserta yang mengikuti WS; dokumen hasil evaluasi tahun 2018 program GIF; jumlah sekolah yang melaksanakan KTR & UBM; jumlah kab/kt mendapatkan bintek; jumlah orang yang melakukan	70%	12,350,664,000	77.14	19.38	2,853,389,000	2,393,288,406	83.88

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			konsultasi ke kemenkes; jumlah ATK; jumlah kab/kt yang mendapatkan bimbingan teknis; jumlah kab/kt yang mendapatkan monitoring program P2PTM; dokumen hasil evaluasi tahun 2018 program keswa jabar jumlah peserta yang mengikuti WS; jumlah peserta/pengelola penyalahgunaan Napza; jumlah peserta yang pelatihan; jumlah ATK; jumlah pendamping teknis kegiatan; jumlah peserta dari 7 RS rujukan regional dan 7 LS/LP; dokumen hasil konsultasi kesehatan jiwa; jumlah kab/kota mendapatkan bimbingan teknis keswa; jumlah provinsi lain yang dikunjungi dalam rangka pembelajaran keswa; jumlah kab/kota mendapatkan monitoring keswa; jumlah peringatan hari DM, Talasemia, Penglihatan, Hipertensi, keswa 2019							
PROGRAM KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN KESEHATAN AKIBAT KLB PROVINSI										

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.01.03.014.002	Peningkatan sistem kewaspadaan Dini Bencana dan kesehatan matra	Persentase Kegiatan Rapid Health Assesment (RHA)	Dokumen hasil RHA pada saat Bencana	100%	5,008,527,100	100	12.09	1,008,526,967	605,411,680	60.03
1.02.01.03.014.001	Surveilans Penyakit dan Penanggulangan KLB	Persentase Masyarakat yang Dilayani Dilokasi Bencana	Penanganan kesehatan pada KLB/ Bencana	100%	4,948,100,000	100	17.45	948,099,830	863,454,820	91.07
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN										
1.02.01.03.010.001	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Persentase Puskesmas siap Akreditasi	1) Tim Pendamping Akreditasi FKTP kab/ kota dan provinsi dapat mempersiapkan re-akreditasi puskesmas; 2) Tim Pendamping Akreditasi FKTP kab/ kota dan provinsi dapat memberikan pendampingan akreditasi klinik pratama; 3) Kepala Seksi Mutu/ Kepala Seksi Kab/ Kota yang membawahi akreditasi dan LP/ LS provinsi mendapat informasi tentang kegiatan mutu pelayanan kesehatan; 4) Kepala Bidang, Kepala Seksi Mutu/ Kepala Seksi Kab/ Kota yang membawahi akreditasi/ Pendamping Akreditasi FKTP dan LP/ LS provinsi mendapat	100%	10,918,031,299	96	9.1	1,090,850,000	994,019,624	91.12

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>sosialisasi tentang akreditasi klinik pratama, akreditasi tempat praktek mandiri dokter dan dokter gigi;</p> <p>5) Penanggung Jawab Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dan LP/LS Provinsi mendapat informasi tentang Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1;</p> <p>6) Pendamping Akreditasi FKTP Kab/ Kota/ Provinsi dapat mendapat informasi tentang Audit Internal dan Tinjauan Manajemen di FKTP;</p> <p>7) Pengelola Labkesda Kab/ Kota dan LP Dinkes Provinsi mendapat informasi tentang pelaksanaan audit internal Laboratorium Kesehatan;</p> <p>8) Hasil pembinaan, monitoring dan evaluasi akreditasi & pasca akreditasi FKTP, Rumah Sakit dan Sarana Kesehatan Lain serta koordinasi LP/ LS;</p>							
1.02.01.03.010.002	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Sarana Pelayanan	Persentase kab/kota memiliki laboratorium		60%			#DIV/0!			#DIV/0!

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kesehatan Lain	kesehatan terakreditasi								
1.02.01.03.010.003	Peningkatan Manajemen dan upaya Pelayanan Kesehatan Primer	Persentase puskesmas di Kab/Kota sesuai standar	1.) Dokumen kegiatan 2.) 27 Kab/Kota terfasilitasi , koordinasi dan monoring dan evaluasi manajemen dan upaya pelayanan kesehatan primer insi oleh provinsi . 3). 27 Kab/Kota terpanatau pekayanan kesehatan pada arus mudik dan balik di hari libur nasional. 4) . 27 Kab/Kota terfasilitasi, koordinasi, dan mitoring dan evaluasi penguatan PIS-PK di Jawa Barat.. 5) 27 Kabupten/Kota bersinergi dengan provinsi dalam bidang pelayanan kesehatan.	100%	297,128,348,080	82	5.7	60,999,977,923	16,851,689,276	27.63
1.02.01.03.010.004	Peningkatan Program Pelayanan Kesehatan Tradisional di Provinsi Jawa Barat	Persentase Kabupaten/kota dengan minimal 50 % puskesmas menyelenggarakan kesehatan tradisional	1) Jumlah Dokumen kegiatan 2) 27 Kabupaten/Kota terfasilitasi Kesehehatan tradisional 3) Pengembangan aplikasi sestem pembinaan dan pengawasan	96%	3,633,083,170	76.04	6.2	457,838,594	224,365,450	49.01
1.02.01.03.010.001	Peningkatan Program Layad	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Kerjasama	1. Jumlah dokumen kerjasama 2. Terlaksananya manajemen	100%		44.44	#DIV/0!			#DIV/0!

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rawat Jawa Barat	dengan Provinsi Terkait Layad Rawat	layad rawat di provinsi dan Kabupaten/kota							
	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL)		-	100%		88.9	#DIV/0!			#DIV/0!
-	Pengelolaan Fasilitas Kesehatan	-	1) Jumlah Dokumen Kegiatan Pengelolaan Fasilitas Kesehatan	100%		100	#DIV/0!			#DIV/0!
	Peningkatan pelayanan kesehatan Rujukan	Persentase Kab/Kota yg mempunyai 80% Rumah Sakit dengan pencapaian SPM	1) Jumlah Dokumen Pertemuan Penguatan Kesehatan Rujukan Wilayah; 2) Jumlah Dokumen Pertemuan Evaluasi SPM RS; 3) Jumlah Dokumen Pertemuan Rapat Koordinasi Pelayanan Kesehatan Rujukan; 4) Jumlah Dokumen Pendampingan Pemenuhan Standar RS; 5) Jumlah Dokumen Pertemuan Penguatan Pelaksanaan PPKA RS	78%	17,227,350,000	24.65	8.6	1,697,615,188	1,484,973,195	87.47
-	Pendampingan Penguatan Pelayanan Kesehatan RS	-	Penguatan pendampingan RS Rujukan Regional	88%		48.7	#DIV/0!			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Regional									
	PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN									
1.02.01.03.012.002	Ketersediaan, Pemerataan, Keterjangkauan dan Mutu Sediaan Farmasi Kosalkes dan Mamin	PERSENTASE KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL	Dokumen Rencana Kebutuhan Obat (RKO) 27 Kabupaten/ Kota dan Buffer Stok Provinsi	95%	4,363,945,481	94.74	17.75	865,230,871	774,746,269	89.54
1.02.01.03.012.003	Peningkatan, Pengawasan, dan Pengendalian Penggunaan Obat Rasional, Peredaran Sediaan Farmasi Kosalkes dan Mamin	PERSENTASE REKOMENDASI PERIJINAN YANG DIKELUARKAN	1) Dokumen Berita Acara Sertifikat Distribusi Cabang Pedagang Besar Farmasi; 2) Dokumen Berita Acara Sertifikat Distribusi Cabang Penyalur Alat Kesehatan; 3) Dokumen Berita Acara Sertifikat Produksi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	100%	4,249,515,906	87.8	15.03	696,058,592	638,497,361	91.73
1.02.01.03.012.006	Perencanaan, Pengelolaan dan Mutu Nakes	PERSENTASE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG MELAKSANAKAN PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN MUTU TENAGA KESEHATAN	1) Penyusunan perencanaan kebutuhan SDM di kab/kota dan RSUD; 2) Koordinasi Kab/ Kota dalam pengelolaan data SDM; 3) Jumlah registrasi tenaga kesehatan difasilitasi; 4) Koordinasi pengelolaan Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi;	90%	10,000,000,000	77.78	10.97	2,000,000,000	1,097,032,600	54.85

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			5) Pendamping dan pengelola PIDI ditingkatkan kompetensinya; 6) Bimbingan teknis pengelolaan PIDI di wahana; 7) Koordinasi pengelolaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing; 8) Kab/Kota difasilitasi peningkatan kompetensi tugas belajar; 9) Pengelola tenaga teknis dan tenaga komputer SDMK; 10) RSUD yang mengelola Wajib Kerja Dokter Spesialis difasilitasi							
	Pengelolaan Tenaga Kesehatan Non PNS Provinsi Jawa Barat	PERSENTASE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIORITAS TERISI TENAGA KESEHATAN	1) Tenaga kesehatan non PNS Jabar didayagunakan di fasilitas pelayanan kesehatan; 2) Kontrak kerja tenaga kesehatan non PNS Jabar; 3) Tenaga kesehatan non PNS Jabar di evaluasi kinerja; 4) Tenaga kesehatan non PNS Jabar di rekrut; 5) Tenaga non PNS Jabar mengikuti pembekalan materi; 6) Koordinasi Pengelolaan Tenaga Kesehatan Non PNS Jabar; 7) Monitoring dan evaluasi	70%	392,000,000,000	132.86	11.11	44,734,771,907	43,532,045,561	97.31

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			pengelolaan di Kab/Kota							
1.02.01.03.012.005	Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Dinas Kesehatan Jawa Barat	PERSENTASE TENAGA KESEHATAN MENGIKUTI PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN PUSKESMAS TELADAN	1) Dokumen penyelenggaraan nakes teladan Puskesmas Teladan; 2) Tenaga kesehatan teladan Puskesmas mengikuti pemilihan; 3) Tenaga Kesehatan teladan Puskesmas lolos seleksi; 4) Tenaga Kesehatan teladan Pusk Tk provinsi mengikuti pemilihan di Tk. Pusat; 5) Tenaga Kesehatan teladan Puskesmas tk provinsi mendapat penghargaan;	90%	10,500,000,000	87.54	14.56	1,700,000,000	1,528,595,673	89.92
	Penguatan Jaminan Kesehatan	PERSENTASE PENDUDUK YANG MENJADI PESERTA JAMINAN KESEHATAN	-	95%		94.43				
1.02.01.03.012.007	Penguatan Pembiayaan Kesehatan	PERSENTASE KAB/KOTA YANG MENDAPATKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN	1) Jumlah Dokumen Penguatan Penyelenggaraan JKN dan Pembiayaan di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat; 2) Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persiapan Penyusunan PHA/DHA Provinsi Jawa Barat; 3) Jumlah Dokumen Pelaksanaan	40%	7,405,613,725	100	13.95	1,191,000,000	1,033,046,950	86.74

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Capacity Buiding agar terpapar pengetahuan terbaru guna peningkatan kapasitas kemampuan dalam melaksanakan pembiayaan dan jaminan							
PROGRAM MANAJEMEN KESEHATAN										
	Penyusunan Regulasi Bidang Kesehatan		PERSENTASE DRAFT REGULASI BIDANG KESEHATAN YANG DIUSULKAN OLEH DINAS KESEHATAN PROV JAWA BARAT	100	2,747,295,000	100	13.13	434,693,916	360,787,842	83.00
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) DAK Non Fisik		JUMLAH DINAS KESEHATAN KAB/KOTA YANG DILAKUKAN PEMBINAAN PELAKSANAAN BOK OLEH DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT	27	18,116,250,000	100	13.43	3,623,250,000	2,433,630,172	67.17
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN DINAS KESEHATAN PROV. JAWA BARAT										
1.02.01.07.013.004	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	1) Dokumen Profile Kesehatan; 2) Dokumen Roadmap SIK Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat; 3) Dokumen Data Aplikasi Sytem Informasi Puskesmas; 4) Dokumen Data dan Informasi	100%	20,698,100,000		8.04	1,924,889,394	1,664,848,066	86.49

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pengembang Sytem Informasi Kesehatan; 5) Data dan Informasi System Informasi Rumah Sakit; 6) System Informasi Teleconference; 7) System Informasi Terintegrasi di Puseksmas; 8) System Informasi Terintegrasi di Provinsi; 9) Penigkatan SDM Dalam Bidang Pengelolaan Data; 10) Evaluasi dan Perencanaan SIK Porovinsi Jawa Barat							
1.02.01.01.016.002	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020	Persentase Sarana dan prasarana dalam kondisi baik di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	1. Dokumen Renja Dinkes Jabar Tahun 2020 2. Dokumen DPPA Dinkes Jabar tahun 2019 3. Dokumen RKA Dinkes Jabar Tahun 2020 4. Dokumen DPA Dinkes Jabar Tahun 2020 5. Laporan pertemuan Forum OPD 6. Laporan pertemuan Rakorwil 7. Laporan hasil konsultasi dan koordinasi ke luar provinsi 8. Pertanggungjawaban kegiatan	100%	29,893,622,150		2.66	2,306,731,374	796,360,661	34.52

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			APBD Subbag PP 9. Dokumen pengadaan langsung kegiatan penyusunan perencanaan							
1.02.01.01.016.003	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Pembangunan Bidang Kesehatan tahun 2019	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Laporan hasil monev Bankeu pembangunan bidang kesehatan tahun anggaran 2019	100%	1,169,126,650		6.76	191,499,643	79,006,200	41.26
1.02.01.01.016.005	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	1. Dokumen laporan capaian kinerja 2. Dokumen LKPJ Dinkes Prov. Jabar Tahun 2019 3. Dokumen LAKIP Dinkes Prov. Jabar Tahun 2019 4. Dokumen LPPD Dinkes Prov. Jabar Tahun 2019	100%	1,245,440,400		10.34	205,887,500	128,814,992	62.57
1.02.01.01.016.004	Rapat - Rapat dan Koordinasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Dinkes	Persentase Ketersediaan data kinerja di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	1. Dokumen laporan capaian kinerja 2. Dokumen LKPJ Dinkes Prov. Jabar Tahun 2019 3. Dokumen LAKIP Dinkes Prov. Jabar Tahun 2019 4. Dokumen LPPD Dinkes Prov.	100%	724,064,860		7.31	118,600,000	52,910,144	44.61

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jabar Tahun 2019							
1.02.01.07.013.003	Peningkatan Kerjasama Program Kesehatan dengan Provinsi Lain		Dokumen Pertemuan/Kesepakatan bersama dengan provinsi lain		1,736,718,750		2.74	179,868,000	47,557,083	26.44
1.02.01.01.016.006	Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat		1) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monitoring Rekonsiliasi dan Konsolidasi Data Keuangan; 2) Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Prov. Jawa Barat		1,775,000,000		14.26	349,993,905	253,188,237	72.34
1.02.01.07.018.047	Penyediaan Barang habis Pakai kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat		Tersedianya Barang habis Pakai kantor		3,901,000,000		22.29	913,089,247	869,538,425	95.23
1.02.01.07.018.049	Penyediaan Rapat-Rapat dan Koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat		Jumlah Jamuan makan dan snack rapat kedinasan, jamuan makan dan snack tamu kedinasan, makan dan minum petugas SPGDT, Belanja Air minetal/Galon, Perjalanan Dinas dalam daerah , dan perjalanan dinas luar provinsi							
1.02.01.07.018.051	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat		Tersedianya Jasa Keamanan, jasa Kebersihan, Pemeliharaan Taman dan biaya pembersihan septic tank		18,687,200,000		17.33	4,030,150,000	3,237,662,822	80.34

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.01.07.018.052	Penyediaan Jasa Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat		Jumlah pan, itia barjas mendapat honorarium, Jumlah paket ATK untuk operasional Dinas Kesehatan, Jumlah bulan penyediaan kebutuhan benda pos, Jumlah paket pekerjaan cetak, Jumlah bulan penyediaan biaya foto copy		17,989,000,000		13.60	2,826,270,000	2,445,796,654	86.54
1.02.01.07.018.053	Pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat		Jumlah bulan belanja BBM Kendaraan Operasional Roda 4 dan 2, Jumlah bulan belanja BBM Kendaraan Operasional Roda 4 dan 2, umlah kendaraan dinas yang dilakukan penggantian suku cadang, Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan penggantian pelumas		4,629,000,000		11.37	728,182,000	526,298,767	72.28
1.02.01.07.018.054	Penyediaan Alat pendukung Fasilitas kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat		Pengadaan tanah untuk Gedung Vaksin		51,185,500,000		82.56	51,185,500,000	42,256,929,500	82.56
1.02.01.07.018.055	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat		Presentasi peemeliharaan sarana dan prasarana kantor Dinas kesehatan Provinsi Jawa Barat		7,653,353,360		12.42	1,359,650,000	950,557,144	69.91

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.01.07.017.004	Pengadaan perlengkapan kantor dinas kesehatan prov jabar		Tersedianya Perlengkapan Kantor Dinas Kesehatan provinsi Jawa Barat		86,914,296,289		4.87	4,363,191,150	4,229,798,835	96.94
1.02.01.07.018.048	Peningkatan Kinerja dan kemampuan Aparatur Dinas Kesehatan Prov Jabar		Tersedianya Uang saku Diklatpim, Honorarium Narasumber dan Biaya Penanaman Sikap Mental dan Jiwa Korsai Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat		3,618,744,000		13.65	610,490,000	493,900,000	80.90
1.02.01.07.018.050	Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olah Raga serta Pakaian Apartaur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat		Tersedianya honor Penceramah, Instruktur Senam, sewa gedung olah raga, pakaian Dina Harian, Pakaian Olah raga PNS Dinas Kesehatan Prov Jabar		2,935,696,000		18.30	570,830,000	537,172,500	94.10
	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN			100%	27,235,371,250		49.49	14,424,773,323	13,479,939,806	93.45
1.02.01.07.013.002	Peningkatan Kapasitas UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebagai Centre of Excellent Pelayanan Kegiatan Diagnostik dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Penambahan Parameter Pemeriksaan yang diakreditasi	Terpeliharanya akreditasi lab medik, lab penguji dan penyelenggara UP oleh KAN serta bertambahnya parameter pemeriksaan yang terakreditasi	76%	1,903,720,000	92%	11.50	251,120,000	218,919,482	87.18

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.01.07.017.012	Peningkatan Akreditasi UPTD Laboratorium Kesehatan (DAK)	Persentase Kepuasan Pelanggan	Seluruh Tenaga Pranata Labkes, Dokter, dan Radiografer mempunyai STR dan SIP	75%		93.33				
1.02.01.07.017.002	Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Jumlah Penambahan Parameter Pemeriksaan Baru	'1) Jumlah Pengadaan Reagen	247	25,231,651,250		52.20	14,073,653,323	13,170,607,274	93.58
1.02.01.07.018.030	Penyediaan Bahan bacaan dan perundang-undangan UPTD LABKES		1) Terlaksananya kehadiran jumlah seluruh karyawan/karyawati; 2) Terlaksananya penambahan kepuasan pelanggan; 3) Terlaksananya penambahan jumlah peserta Uji Profisiensi		100,000,000		90.41	100,000,000	90,413,050	90.41
	PROGRAM PENINGKATAN MUTU UNIT PELATIHAN KESEHATAN									
	Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan UPTD Pelatihan Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan melalui Pelatihan	Jumlah peserta pelatihan; Bimtek Laboratorium Lapangan; Desiminasi Informasi Pelatihan Kesehatan dengan Fasyankes Swasta Kabupaten/Kota; Pertemuan Konsolidasi Pelatihan dengan Kabupaten/Kota; Pertemuan Evaluasi	16.63	10,054,525,576		8.34	1,266,495,495	838,604,450	66.21

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Penyelenggaraan Pelatihan Kesehatan dengan Kabupaten/Kota; Perjalanan dinas Konsultasi Pelatihan ke Pusat							
1.02.01.07.013.001	Peningkatan Kapasitas UPTD Pelatihan Kesehatan sebagai Pusat Pelatihan Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Nilai Komponen yang Sesuai dengan Pembobotan	Penilaian akreditasi institusi; Persentase pelatihan yang terakreditasi dalam satu tahun; Jumlah Review dan Penyusunan Kurikulum dan Modul; Evaluasi Pasca Pelatihan, Jumlah Tenaga Kerja Non PNS	≥ 3,5	2,732,886,964		13.49	447,639,965	368,655,064	82.36
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT AL IHSAN										
	Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RSUD AL Ihsan	Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RSUD AL Ihsan	Prosentase pencapaian kinerja atas pelaksanaan operasional pelayanan kesehatan	80.91	1,230,309,698,187	97.73	18.87	266,985,000,000	232,128,070,956	86.94
	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Jawa Barat RSUD Al Ihsan	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Jawa Barat RSUD Al Ihsan	Prosentase pasien masyarakat miskin diluar JKN yang dilayani pada rawat jalan dan rawat inap	80.91	18,000,000,000	97.73	18.49	5,000,000,000	3,328,519,100	66.57
1.02.01.07.017.001	Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RSUD Al Ihsan	Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RSUD Al Ihsan	Prosentasi pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	80.91	158,863,130,915	97.73	20.12	31,982,465,348	31,955,465,348	99.92

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT JIWA										
1.02.01.07.015.011	Kegiatan Humas dan Pemasaran Pelayanan Kesehatan RS Jiwa Provinsi Jawa Barat	PERSENTASE INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) Di RS JIWA	Plakat, Perlengkapan Pasien rawat Inap saat pulang pasien, iklan di media cetak dan elektronik, Banner, Spanduk, Poster/informasi edukasi, Leaflet /Brosur.	90%	11,043,881,696	89.78	15.47	1,927,558,999	1,708,428,552	88.63
	Kegiatan Pelayanan dan pendukung Pelayanan RS Jiwa (BLUD)		Jumlah Makanan dan Minuman Pasien rawat inap , Persentase kebutuhan obat pasien yang terpenuhi 100%, Bahan laboratorium 1 Keg, Jumlah Makanan dan Minuman petugas Piket dan potensi resiko 1 Keg, Terpenuhinya honor SDM 180 Or, Terpenuhinya kebutuhan air, listrik, telephone, dan internet serta kebutuhan rumah tangga 1 Tahun, Pakaian Dinas BLUD 2 Stel x 180 Or, Jumlah Pegawai yang mendapat peningkatan kompetensi melalui pelatihan 65 % 83 Or, Jumlah petugas beresiko terpantau kesehatannya melalui MCU 100 Or, Jumlah tenaga		140,000,000,000		15.93	44,962,789,505	22,296,014,859	49.59

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			BLUD mendapatkan peningkatan Jiwa Korsa 180 Or, Persediaan bahan Pemeliharaan gedung non gedung 1 Keg, Biaya Operasional Tenaga Blud untuk Jemput, Pemulangan dan pendampingan Pasung 75%.							
1.02.01.08.013.019	Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Mental dan NAPZA RS Jiwa		Belanja bahan praktek untuk terapi 8 Keg, Terapi NAPZA 20 Keg, Mengikuti kegiatan PORKESREMEN 1 Keg		3,405,290,468		14.63	557,232,482	498,032,500	89.38
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa RS Jiwa		Outbound Keswara 1 Keg, Pertemuan Koordinasi Rujukan Kesehatan Jiwa dengan Kabupaten/Kota 80 Orang, Pertemuan Koordinasi Lintas Program -Lintas Sektor tentang pelayanan kesehatan jiwa 50 Org, Pertemuan Skizofrenia Anonimous 50 Org, Workshop penguatan Pelayanan kesehatan jiwa lanjut usia 25 Org, Pertemuan Penguatan jejaring kolaborasi TB-HIV 25 Org, Koordinasi internal 110 Org.		3,355,400,575		9.63	324,400,000	323,156,239	99.62

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) RS Jiwa		Pembiayaan pasien miskin rawat jalan, IGD, rawat inap, gelandangan dan pasien pasung 1 Tahun.		15,262,750,000		9.67	2,500,000,000	1,476,265,400	59.05
1.02.01.08.18.009	Kegiatan Peningkatan Kualitas Perawatan RS Jiwa		Pelaksanaan Kredensial 200 Org, Pendampingan manajemen keperawatan 2 Dokumen, Audit PPI 1 Dokumen, Audit Dokumen Asuhan Keperawatan 1 Dokumen, Pendukung operasional bidang keperawatan 4 Keg.		1,115,902,073		13.68	182,796,752	152,632,590	83.50
	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat RS Jiwa		Family gathering 90 Org, Sosialisasi dini gangguan jiwa bagi kader, tokoh masyarakat, dan tokoh agama 150 Org, Sosialisasi dini gangguan jiwa bagi TKS dan PSM (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat) 100 Org, Dropping pasien (pemulangan pasien) yang tidak dijemput keluarga 48 PAsien, Home visit 12 Pasien, mobile outreach (penjangkauan kasus darurat) 24 Kasus, FGD/ Focus Group Discussion (advokasi pasien		5,341,687,771		11.66	874,955,000	622,712,039	71.17

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			bermasalah) 5 Kasus, Membangun kemitraan dan koordinasi dengan stakeholder terkait keswa (TPKJM) 10 Pertemuan, Membangun jejaring dukungan sosial dan pemberdayaan desa siaga sehat jiwa, LSM, RBM, LKS, panti 4 Keg, osialisasi , Sosialisasi deteksi dini bagi guru, kesehatan jiwa kepada care giver 30 Orang, Pelatihan/dukungan psikososial bagi ODGJ 25 Orang, Integrasi pelayanan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat 4 Keg, Sosialisasi Keswa kepada masyarakat/komunitas 60 Orang, Kegiatan memperingati hari kesehatan jiwa, Hari Bipolar, berkolaborasi dengan LSM 2keg, Sosialisasi deteksi dini masalah emosi dan perilaku anak dan remaja 50 Org, Sosialisasi deteksi dini bagi guru 50 Orang, Sosialisasi keswa lansia ke petugas panti werda 20 Orang, Penanganan pasien pasung 70 Pasien.							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyusunan DED dan Review DED Gedung RS Jiwa		Dokumen DED sesuai review master plan 1 Keg, Dokumen review DED Gedung Pelayanan 2 Dok		7,155,694,803		7.93	591,849,865	567,563,650	95.90
1.02.01.08.18.011	Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dan Non Kesehatan RS Jiwa		Peningkatan kompetensi SDM lingkungan Bidang Medik melalui pelatihan Inhouse training 30 Org, Peningkatan kompetensi SDM lingkungan Bidang Keperawatan melalui pelatihan Inhouse training 50 Org, Peningkatan kompetensi SDM bidang Penunjang melalui pelatihan Inhouse training 18 Org, Peningkatan kompetensi SDM bidang Keuangan 50 Org, Sosialisasi Kepegawaian 400 Org, Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dan Non Kesehatan melalui pelatihan Eksternal 300 Org, Biaya DIKLATPIM 6 Org.		12,587,080,337		9.90	1,496,768,676	1,245,536,494	83.22
	Akreditasi RS RS Jiwa		Bimbingan Akreditasi RS versi SNARS Edisi 1 RS Jiwa Provinsi Jawa Barat 100 %, Survey Verifikasi Akreditasi RS versi SNARS Edisi 1 RS Jiwa Provinsi		2,852,607,975		12.50	467,247,000	356,524,747	76.30

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jawa Barat 100 %							
1.02.01.08.015.21	Kegiatan Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan Di RS Jiwa		Pembuatan Sistem Informasi Diklat Litbang 1 Paket, Penyusunan Modul / Panduan Pelaksanaan Praktek Mahasiswa Keperawatan Di RS Jiwa 1 Modul, Koordinasi RS Pendidikan 50 HOK, Bimbingan dari Kemenkes 1 Keg, instruktur kerohanian mahasiswa di mess 48 Keg.		2,161,329,040		8.25	270,399,919	178,255,549	65.92
1.02.01.08.015.22	Kegiatan Fasilitas Penelitian dan Pengembangan Di RS Jiwa		Jasa Konsultan Penelitian dan Pengembangan RS Jiwa 1 Dokumen, Survey Kepuasan Pelanggan 2 Dokumen		1,765,384,945		12.52	223,899,952	221,002,460	98.71
	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT JAMPANGKULON									
	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD RS Jampangkulon	PERSENTASE INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) di RSUD JAMPANGKULON	Biaya Operasional (Biaya Pelayanan, Biaya Umum Dan Administrasi), Biaya Non Operasional, Biaya Pengeluaran Investasi	77.12		103.71				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.01.07.015.001	Pengadaan Obat dan Bahan Habis Pakai		Persentase Kebutuhan Obat-obatan untuk pasien		37,000,000,000		26.92	9,999,957,838	9,960,940,409	99.61
	-									
1.02.01.07.015.003	Fasilitasi Pasien GAKIN RSUD Jampangkulon		Terbayarnya Tagihan Pasien Keluarga Miskin di RSUD Jampangkulon		27,000,000,000		30.20	9,000,000,000	8,152,978,400	90.59
1.02.01.07.015.005	Penyusunan Laporan Keuangan/Audit Indevenden RSUD Jampangkulon		Peningkatan Ketepatan dan Kualitas Laporan Keuangan		200,000,000					
1.02.01.07.015.006	Penyusunan Rencana Strategi Bisnis BLUD RSU Jampangkulon		Tersusunnya Strategi Bisnis BLUD							
	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT PAMEUNGPEUK									
	Promosi Kesehatan di RSUD Pameungpeuk	PERSENTASE INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) di RSUD PAMEUNGPEUK	Terselenggaranya Promosi Kesehatan kepada Pasien, Karyawan, Keluarga Pasien, Mitra Kerja dan Seluruh Pengunjung Rumah Sakit melalui Media Cetak, Elektronik dan Penyuluhan	86.92	600,000,000	93.34	8.08	100,000,000	48,465,000	48.47
	Pengembangan Kesehatan		Terciptanya Kesehatan				13.70			90.92

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Lingkungan di RSUD Pameungpeuk		Lingkungan melalui Pembuangan Sampah Non Medis/Medis, Pengelolaan Air Limbah, Pengujian Lab/Sampling Lingkungan, Sarpras dan Makanan		2,250,000,000			339,100,000	308,317,518	
	Pelayanan kepada Masyarakat Miskin Jawa Barat di RSUD Pameungpeuk		Tertayannya kesehatan masyarakat miskin di Jawa Barat dengan target Rawat Jalan dan Rawat Inap		Rp 30,000,000,000		12.99	4,000,000,000	3,896,318,800	97.41
	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD di RSUD Pameungpeuk		Terfasilitasinya biaya operasional rumah sakit		Rp 97,571,390,698		19.10	19,432,042,622	18,636,170,075	95.90
	Pengadaan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Habis Pakai di RSUD Pameungpeuk		Tersedianya Obat-Obatan baik Obat Generik dan Bahan Medis Habis Pakai		Rp 35,000,000,000		16.91	6,377,850,788	5,919,702,256	92.82
	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT KESEHATAN KERJA									
	Peningkatan Pelayanan Prima dan Komprehensif	PERSENTASE INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) di RS KESEHATAN KERJA	Hasil survey kepuasan pelanggan	70%	16,500,000,000	106.71	4.96	1,400,000,000	818,354,842	58.45

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Peningkatan Pelayanan di RSUD Kesehatan Kerja		Jumlah Pegawai Non PNS RSUD Kesehatan kerja		131,400,000,000		11.07	17,099,999,832	14,541,856,241	85.04
	Pemenuhan Kebutuhan Bahan Makanan Rawat Inap RSUD Kesehatan Kerja		Jumlah peserta Capacity Building		24,000,000,000		1.93	626,048,250	462,060,100	73.81
	Penyelenggaraan Manajemen Kesehatan		- Dokumen Persiapan BLUD; - Persiapan Akreditasi		1,400,000,000		67.97	1,367,815,175	951,527,544	69.57
	Penyusunan Dokumen AMDAL, RPL dan RKL		Jumlah komponen lingkungan yang memenuhi kriteria UKL/UPL							
	Promosi Kesehatan di RSUD Kesehatan Kerja		Terselenggaranya Promosi Kesehatan kepada Pasien, Karyawan, Keluarga Pasien, Mitra Kerja dan Seluruh Pengunjung Rumah Sakit melalui Media Cetak, Elektronik dan Penyuluhan		100,000,000		60.82	99,342,950	60,822,500	61.22
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RS AL IHSAN										
	PERSENTASE BOR (Bed Occupancy Ratio) di RS Al Ihsan	Kegiatan Pembangunan Gedung Utama Pelayanan, Perawatan, Perkantoran dan Perparkiran Lanjutan RSUD	Persentase pembangunan gedung perawatan, pelayanan, perkantoran yang selesai	80	405,901,746,000	91.4	6.23	53,764,278,976	25,292,248,443	47.04

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Al Ihsan								
		Kegiatan Peningkatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan RSUD Al Ihsan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan		90,000,000,000		10.22	15,000,000,000	9,197,809,584	61.32
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RS JIWA									
1.02.01.07.015.016	Persentase BOR (Bed Occupancy Ratio) Di RS JIWA	Kegiatan Penyediaan Sapras Pelayanan Medis RS Jiwa	Belanja Modal Pengadaan Alat kesehatan dan Alat Kedokteran 43 Jenis Alat, Belanja alat terapi keswara 14 Jenis Alat, Belanja alat rehabilitasi medik 19 Jenis Alat, Operasional Pendukung pelayanan 1 keg.	70	7,184,241,476	72.86	12.71	1,044,483,300	912,899,933	87.40
1.02.01.08.015.019		Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Penunjang Medik RS Jiwa	Pengadaan Alat Dapur 17 Jenis, Pengadaan Alat Laboratorium 3 Jenis, Pengadaan Alat Farmasi 3 Alat, Pengadaan Alat Radiologi 4 Jenis, Peningkatan Sistem Informasi manajemen farmasi elektronik 1Keg, Belanja APD dan kelengkapan keselamatan kerja Bidang Penunjang 24 Jenis,		2,874,586,335		9.36	281,950,000	268,921,800	95.38

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Belanja Pemantapan mutu eksternal laboratorium 1 Keg, Belanja Pengukuran pemaparan radiasi 8 Orang.							
1.02.01.08.015.017		Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Penunjang Non Medik RS Jiwa	Belanja barang habis pakai untuk pelayanan Rekam Medik 1 Paket, Bahan suku cadang alat kesehatan , kedokteran dan laboratorium 1 Keg, Belanja Bahan habis pakai laundry 1Keg, Tabung water treatment gizi dan kesling 2Buah, Alat kerja Laundry 11 Jenis, asa Pemindahan Mesin Cuci (Sewa Fork Lift) 1 Keg.		3,794,394,132		13.39	621,508,460	507,892,928	81.72
1.02.01.08.015.020		Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesling RS Jiwa	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1Keg, Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 1 Keg, Belanja Bibit Pohon/Tanaman 1 Keg, Belanja Jasa Uji Laboratorium 1 keg, Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama (Pest Control) dan Fumigasi 12 Keg, Pemeliharaan Irigasi 1 Keg, Belanja Pemeliharaan Instalasi Jaringan 1 Keg, Belanja Modal		6,864,705,721		14.59	1,212,804,394	1,001,840,210	82.61

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pengadaan Alarm/Sirine 1 Keg, Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1 Keg, Composter 5 Unit.							
1.02.01.08.015.015		Kegiatan Penyediaan Saprass Pelayanan Keperawatan RS Jiwa	Penyediaan alat dan bahan untuk kebersihan pasien rawat inap 100%, Penyediaan perlengkapan pasien 2100 Stel, Penyediaan pakaian pasien rawat inap 639 Stel,		5,299,792,743		15.93	868,091,394	844,239,944	97.25
1.02.01.07.017.008		Kegiatan Penyediaan Alat Kesehatan/Kedokteran RS Jiwa (DAK Reguler)	Ambulans Transportasi Single Gardan 1 Unit, Ambulans Emergency Single Gardan 1 Unit, Ventilator 1 Unit, Oxigent Concentrate 10 unit, Tempat tidur Elektrik 2 Unit, Generator set dan Instalasinya 1 Unit, Mesin Cuci Infeksius 1 Unit, Notebook/Laptop Hybrid 37 Unit.		37,648,438,801		0.00			#DIV/0!
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RS PARU										
1.02.01.07.017.009	PERSENTASE BOR (Bed Occupancy Ratio) di RS PARU	Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RS Paru	Angka Kesembuhan Pasien	61	28,809,966,900		14.81	4,304,662,632	4,265,662,632	99.09

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pembangunan RS Paru	Prosentase Pembangunan Gedung dan Bangunan yang terpenuhi sesuai dengan standart RS							
		Pengadaan alat-alat kesehatan RS Paru	Angka Kematian Umum di Rumah Sakit (Gross Death Rate (GDR))		9,157,650,000		9.42	1,083,335,000	862,693,273	79.63
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RS JAMPANGKULON									
1.02.01.07.015.004	PERSENTASE BOR (Bed Occupancy Ratio) RSUD JAMPANGKULON	Pembangunan Rawat Jalan Baru RSUD Jampangkulon	Gedung Rawat Inap	75	213,800,000,000	88.97	5.35	28,805,250,423	11,444,117,602	39.73
		-	Gedung Farmasi							
1.02.01.07.015.012		Pembuatan DED Gedung Rawat Inap, Rehabilitasi Medik, IBS dan ICU	Dokumen Engenering Detail Gedung RI, Rehabilitasi Medik, IBS dan ICU		30,300,000,000		2.50	999,996,705	756,412,721	75.64
1.02.01.07.015.010		Pembuatan AMDAL	Dokumen Analisis Dampak Lingkungan		68,500,000,000		0.70	799,785,768	480,603,531	60.09
		-	Gedung Pos Jaga							
1.02.01.07.015.013		Jasa Konsultan perencana berkala pembangunan	Jasa Konsultan Pengawasan Gedung rawat jalan baru dan				12.31			99.51

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		gedung rawat jalan baru dan gedung diagnostic center RSUD Jampangkulon	gedung diagnostic center		3,500,000,000			432,872,587	430,757,500	
1.02.01.07.015.009		Pengadaan Utilitas/Peralatan dan Perlengkapan RSUD Jampangkulon	Menyediakan dan meningkatkan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana aparatur		29,000,000,000		13.50	4,530,096,500	3,913,611,224	86.39
1.02.01.07.017.006		Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RSUD Jampangkulon	Tersedianya Alat Kesehatan/Kedokteran		148,527,700,000		4.38	6,598,510,045	6,504,651,625	98.58
		Pengadaan alat kesehatan / Kedokteran RSUD Jampangkulon	Alat Kesehatan/Kedokteran RSUD Jampangkulon		107,000,000,000		15.49	18,199,999,849	16,578,256,229	91.09
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DI RS PAMEUNGPEUK									
	PERSENTASE BOR (Bed Occupancy Ratio) di RSUD PAMEUNGPEUK	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di RSUD Pameungpeuk	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pelayanan dan perkantoran serta Pengadaan Lahan di RSUD Pameungpeuk	70	32,000,000,000	109.6	45.32	15,404,963,198	14,501,810,145	94.14
		Pembangunan Mesjid di RSUD Pameungpeuk	Terbangunnya Mesjid di RSUD Pameungpeuk		6,100,000,000		41.76	5,328,626,608	2,547,212,380	47.80

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.01.07.017.007		Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) di RSUD Pameungpeuk	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan untuk Gedung OK, Mortuary dan Pelayanan Lainnya		45,090,018,765		10.90	4,915,944,305	4,915,944,305	100.00
		Pengadaan Alat Kedokteran di RSUD Pameungpeuk	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan untuk Gedung OK, Mortuary dan Pelayanan Lainnya							
		Pembangunan Gedung Mortuary di RSUD Pameungpeuk	Terbangunnya Gedung Mortuary		2,913,744,000		64.50	2,354,547,515	1,879,461,000	79.82
		Pembangunan Gedung OK Tahap 2 di RSUD Pameungpeuk	Terbangunnya gedung OK Tahap 2 di RSUD Pameungpeuk		115,000,000,000		74.97	101,399,211,248	86,213,106,179	85.02
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RSUD KESEHATAN KERJA									
	Penataan RSUD Kesehatan Kerja	PERSENTASE BOR (Bed Occupancy Ratio) di RS KESEHATAN KERJA	Jumlah Pohon yang ditanam di RSUD Kesehatan Kerja	80	239,000,000,000		2.51	8,475,997,500	5,994,345,479	70.72
	Peningkatan Prasarana Gedung RSUD kesehatan Kerja									

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM KESEHATAN									
	Jumlah Penambahan Pengunjung	-		24000						
	PROGAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA UPTD PELATIHAN KESEHATAN									
1.02.01.07.017.001	Persentase Peningkatan Sarana dan PRASARANA UPTD PELATIHAN KESEHATAN	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pelatihan Kesehatan	Penyediaan alat tulis kantor pengadaan; Penyediaan belanja cetak dokumen pengadaan; Jasa konsultasi perencanaan; Jasa konsultasi pengawasan; Pengadaan mesin penghancur kertas; Pengadaan visual elektronik; Pengadaan almari; Pengadaan AC; Pengadaan Nama OPD dan papan petunjuk; Pengadaan water heater; Pengadaan setrika uap; Pengadaan komputer; Pengadaan Laptop; Pengadaan printer; Pengadaan Stabilizer; Pengadaan sarpras internet 1 paket;	80	65,020,414,187	75	4.27	3,060,765,587	2,775,680,836	90.69

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pengadaan mebelair meja kerja; Pengadaan mebelair meja rapat; Pengadaan mebelair kursi kerja; Pengadaan mebelair kursi rapat; Pengadaan mebelair sofa; Pengadaan kulkas; Pengadaan CCTV; Pengadaan projector; Pengadaan soundsystem; Pengadaan handy talky; Pengadaan Interior Gedung; Pengadaan buku perpustakaan; Pengadaan software.							
		Peningkatan Sarana dan Prasarana di UPTD Pelatihan kesehatan (DAK)	1) Jumlah Peralatan Multimedia; 2) Jumlah Peralatan Laboratorium Kebidanan; 3) Jumlah Peralatan Laboratorium; 4) Jumlah Peralatan Laboratorium Akupresur; 5) Jumlah Pengadaan Alat Peraga Gawat Darurat; 6) Jumlah Kit Keperawatan Kesehatan Masyarakat (PHN Kit); 7) Jumlah Peralatan Proses Belajar Mengajar (Audio Visual Aids); 8) Jumlah Peralatan Laboratorium Praktek Meramu Obat Tradisional		1,216,605,000		41.31	502,582,700	502,582,700	100.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(Jamu)							
	PROGAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT									
	Persentase Pemenuhan Saranan dan Prasarana Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Lanjutan Pembangunan Lantai 3 Gedung Serba Guna/mesjid Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Jumlah paket kegiatan lanjutan pembangunan gedung serbaguna/mesjid kantor Dinas Kesehatan Provinsi jawa Barat	100	37,901,720,000	100	16.15	7,631,403,763	6,122,989,678	80.23
	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN RS AL- IHSAN UPT DINAS KESEHATAN PROV. JAWA BARAT									
	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi di RS Al Ihsan	Persentase dokumen penyusunan perencanaan program kegiatan dan dokumen laporan keuangan	100	4,673,770,000		15.91	873,770,000	743,601,950	85.10

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan RSUD Al Ihsan	Persentase Sarana dan prasarana dalam kondisi baik di RS Al Ihsan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur yang terlaksana dalam menunjang pelayanan	100	53,064,023,945		12.49	8,064,023,705	6,629,635,805	82.21
		Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran di RS Al Ihsan		100						
		Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan		100						
		Persentase Ketersediaan data kinerja di RS Al Ihsan		100						
	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN RS JIWA UPT DINAS KESEHATAN PROV. JAWA BARAT									

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Pelaporan RS Jiwa	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi di RS Jiwa	Dokumen Rencana Kerja Tahunan dan RBA 2 Dokumen, Dokumen RKA dan DPA 3 Dokumen, Dokumen PK dan Casecade 2 Dokumen, Dokumen Casecade 12 Dokumen, AKIP 1 Dokumen, Dokumen Kinerja Pelayanan 12 Dokumen.	100	1,830,160,532		8.30	172,314,652	151,899,242	88.15
1.02.01.07.18.012	Kegiatan Rapat dan Koordinasi Pelaporan, Pengelolaan Keuangan RS Jiwa	Persentase Sarana dan prasarana dalam kondisi baik di RS Jiwa	Dokumen Laporan Keuangan 12 Dokumen, Dokumen AKIP 1 Dokumen, Dokumen LKPJ 1Dokumen, Dokumen Laporan Kinerja Pelayanan 12 Dokumen, Dokumen tata cara pengelolaan dan laporan keuangan BLUD 1 Dokumen.	100	8,732,503,620		2.05	200,000,000	179,071,374	89.54
1.02.01.07.18.013	Kegiatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur RS Jiwa Provinsi Jawa Barat	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran di RS Jiwa	Ketepatan waktu pengurusan Administrasi kepegawaian 100 %, Pengajian 72 Kali, Instruktur baca Alquran 24 OB, Instruktur senam 11 Bulan, Instruktur kesenian 5 Bulan, Instruktur beladiri 11 Bulan, Instruktur tenis meja 11 Bulan, Instruktur futsal 11 Bulan, Pengisi acara halal bi halal 1 Keg,	100	8,732,503,620		10.67	992,151,000	931,789,200	93.92

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.01.07.18.014	Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Aparatur RS Jiwa	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Spart Part kendaraan untuk operasional 1 Keg, Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan dan KIR 51 unit, Belanja Service dan pelumas 1 Keg,	100	1,775,000,000		22.08	701,647,450	391,854,745	55.85
1.02.01.07.18.015	Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor RS Jiwa	Persentase Ketersediaan data kinerja di RS Jiwa	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Keg, Pengadaan Obat-Obatan Tanaman 1 Keg, Pengadaan Bahan Baku Bangunan 1 Keg, Biaya Pemusnahan Obat Kadaluarsa 1 %, Pemeliharaan Komputer 1 Keg, Pemeliharaan Laptop 1Keg, Pemel Printer 1 Keg, Pemeliharaan Mesin Photo Copy 2 Unit, Pemeliharaan Mesin Risograf 2 Unit, Pemeliharaan Mesin Rumpit 1 Keg, Pemeliharaan Sound System 1 Keg, Pemeliharaan Mesin Genzet/Panel Listrik 2 Unit, Pemeliharaan AC 1 Keg, Pemeliharaan Lift 5 Unit, Pemeliharaan CCTV 1 Keg, Pemeliharaan Mesin Cuci 3 Unit, Pemeliharaan Mesin Antrian Pasien 1 keg, Pemeliharaan Mesin	100	5,239,424,940		11.89	852,714,000	623,191,502	73.08

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Fax 2 Unit, Pemeliharaan Pompa Air 1 Keg, Pemeliharaan Alat Kesenian 1 Keg, Pemeliharaan Elektronik 1 Keg, Pemeliharaan Sumur Artesis 1 Keg, Pemeliharaan Setrika 1 Keg, Pemeliharaan Torn dan Instalasi 1 Keg, emeliharaan Depot Air dan Instalasi 1 Keg, Pemeliharaan Gardu Induk Listrik 1 Keg, Pemeliharaan Instalasi Penangkal Petir 1 Keg, Peningkatan Videotron 1 Keg, Pemeliharaan Billboard 2 Unit.							
	Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan RS Jiwa		Belanja Alat Listrik dan elektronik 1 Unit, Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan printer 53 Buah, Papan Nama 200 Bh, Belanja Alat-Alat Rumah Tangga/dapur Pakai Habis 1 Keg, Pengembangan SIMRS 1 Keg, Kendaraan Dinas Jabatan Eselon III Roda 4 3 Unit, Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 3 Unit, Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 khusus pengangkut makanan 1 Unit, Sepeda motor 7		39,753,837,199		7.34	3,195,374,600	2,916,316,852	91.27

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Unit, Peralatan Bengkel SIM RS 1 Keg, Alat Kerja IPSRS 1 Keg, Mesin Fotocopy 1 Unit, Mesin Penghancur Kertas 1 Unit, Whiteboard 4 Bh, DVD Player 8 unit, DVD Combo 3 unit, Mesin Antri + Monitor 1 unit, Belanja Modal Pengadaan Almari 1 Keg, Belanja Modal Pengadaan Water Heater 5 unit, Belanja Modal Pengadaan Trolley 2 bh, Belanja Modal Pengadaan Televisi 7 unit, Belanja Modal Pengadaan Vacuum Cleaner 6 unit, Belanja Modal Pengadaan Exshhaust Fan 30 unit, Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci 1 unit, Belanja Modal Pengadaan Pompa Air 1 Unit, Belanja Modal Pengadaan Tenda 1 Unit, Belanja Modal Pengadaan Komputer PC 15 Unit, Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 10 Unit, Laptop HP Spectra 1 Unit, Iphone 1 unit, Belanja Modal Pengadaan Printer 26 Unit, Belanja Modal Pengadaan Scanner 4 Unit, Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 18 Unit, Belanja							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>Modal Pengadaan Kelengkapan/Accessories Komputer dan Jaringan 1 Keg, Belanja Modal Pengadaan Meja 96 bh, Belanja Modal Pengadaan Kursi 599 Bh, Belanja Modal Pengadaan Dispenser 30 Unit, Belanja Modal Pengadaan Kulkas 4 Unit, Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur 1 Keg, Belanja Modal Pengadaan Rice Cooker 10 Bh, Kamera Digital 2 Unit, CCTV dan Instalasinya 1 Keg, Drone 1unit, Stand Frame 3 Keg, Handycam 1 Unit. Belanja Modal Pengadaan Proyektor/LCD/Infocus 3 Unit, Belanja Modal Pengadaan Sound System 13 Unit, Belanja Modal Pengadaan Layar/Screen 5 Keg, Belanja Modal Pengadaan Telepon 1 Bh, Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 2 Unit, Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 1 Keg, Belanja Modal Tabung Pemadam Kebakaran 4 Tabung.</p>							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.01.07.18.017	Kegiatan Pemeliharaan/Rehab Bangunan Kantor RS Jiwa		Belanja Jasa Konsultan Perencanaan (Planing) 9 Paket, Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision) 10 Paket, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 6 Keg, Belanja Pemeliharaan Bangunan Bukan Gedung 1 Keg, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Kantor 1 Keg, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Fisik/Bangunan Bukan Gedung 3 Paket.		54,559,232,620		9.16	6,914,696,910	4,999,096,059	72.30
1.02.01.07.18.016	Kegiatan Jasa Kebersihan dan Jasa Keamanan RS Jiwa		Pengadaan Jasa Keamanan 50 Org, Pengadaan Jasa Kebersihan 75 Org, Pengadaan Jasa Pemeliharaan taman dan halaman 12 Org		39,637,204,100		14.86	5,976,052,776	5,890,395,920	98.57
1.02.01.07.18.018	Penyediaan Jasa Kantor RS Jiwa		Jasa Profesi Supir 5 Org, Belanja Langganan Surat Kabar/Majalah 12 Bln, Belanja Jasa Paket/Pengiriman 12 Bln, Belanja Sertifikasi 7 Paket, Belanja Jasa Transaksi Keuangan 1 Tahun, Belanja Jasa		2,470,428,715		9.03	404,570,000	223,056,968	55.13

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Penerangan/Iklan/Reklame, Film, Pemotretan 12 Bulan, Belanja Iuran Wajib Tahunan 12 Bulan.							
1.02.01.07.18.019	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak Dan ATK RS Jiwa		Belanja Alat Tulis Kantor 1Keg, Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 700 Lbr, Belanja Cetak 3 Paket, Belanja Penggandaan/Fotocopy 300000 Lbr, Belanja Penjilidan 950 Lbr, Jasa lainnya (penataan kearsipan dan digitalisasi dokumen) 1 Keg		5,411,763,646		13.02	802,813,000	704,546,370	87.76
1.02.01.07.18.020	Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat Dan Koordinasi RS Jiwa		Penyelenggaraan Halal Bihalal 1 Keg, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Keg, Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.250 Box, Belanja Minuman Air Mineral/Galon 1200 Galon, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah PNS Provinsi 1 Tahun, Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi PNS Provinsi 1 Tahun.		7,872,955,345		12.67	1,205,950,000	997,195,659	82.69
1.02.01.07.18.009	Kegiatan Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Kedokteran RS Jiwa		Belanja Bahan kerja/alat kerja penunjang pemeliharaan alat kesehatan dan alat kedokteran 1 Paket, Belanja Kalibrasi Alat		3,380,515,972		15.60	553,636,721	527,219,600	95.23

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Kesehatan & Kedokteran 2 Paket, Belanja Pemeliharaan, Penggantian dan Pembelian Spare Parts Alat Kesehatan dan Alat Kedokteran 2 Paket, Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium 2 Paket.							
	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN RS PARU UPT DINAS KESEHATAN PROV. JAWA BARAT									
	Peningkatan pengelolaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja RS Paru	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi di RS Paru	Prosentase laporan capaian kinerja dan keuangan	100	1,221,020,000		12.01	200,000,000	146,679,833	73.34
	Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan RS Paru	Persentase Sarana dan prasarana dalam kondisi baik di RS Paru	Prosentase laporan capaian kinerja dan keuangan	100	1,221,020,000		15.66	200,000,000	191,171,379	95.59
	Pengadaan perlengkapan kantor RS Paru	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran di	Prosentase sarana dan prasarana yang terpenuhi	100	4,670,401,500		23.14	1,775,460,402	1,080,745,500	60.87

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		RS Paru								
	Pengadaan peralatan kantor RS Paru	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Prosentase sarana dan prasarana yang terpenuhi	100	7,326,120,000		15.69	1,199,999,762	1,149,646,650	95.80
1.02.01.07.018.046	Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur RS Paru	Persentase Ketersediaan data kinerja di RS Paru	Prosentase Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam	100	9,157,650,000		15.27	1,490,000,000	1,397,991,741	93.82
1.02.01.07.018.045	Pemeliharaan perlengkapan kantor dan rumah tangga RS Paru		Prosentase sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar RS		7,631,375,000		13.06	1,250,000,000	997,004,419	79.76
1.02.01.07.018.044	Pemeliharaan kendaraan/operasional kantor dan rumah tangga RS Paru		Prosentase sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar RS		4,578,825,000		8.93	750,000,000	408,664,673	54.49
1.02.01.07.018.042	Pemeliharaan rutin gedung kantor dan rumah tangga RS Paru		Prosentase sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar RS		12,210,200,000		17.09	2,136,807,516	2,086,577,039	97.65
1.02.01.07.018.040	Penyediaan rapat-rapat dan koordinasi RS Paru		Prosentase terpenuhinya kegiatan rapat-rapat dankoordinasi		9,157,650,000		16.27	1,500,000,000	1,490,100,784	99.34

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.01.07.018.039	Penyediaan Jasa Kantor RS Paru		Prosentase terpenuhinya kebutuhan operasional RS		13,431,220,000		12.28	2,200,000,000	1,649,309,187	74.97
	Pemenuhan Honorarium tenaga kesehatan Non PNS dan Tenaga Non Kesehatan Non PNS RS Paru		Prosentase Dokter Spesialis sesuai dengan standar RS		42,735,700,000		12.01	5,852,650,000	5,134,312,200	87.73
	Penyediaan Jasa Kemanan dan Jasa Kebersihan RS Paru		Prosentase terpenuhinya jasa tenaga keamanan dan tenaga kebersihan RS							
	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN RS JAMPANGKULON UPT DINAS KESEHATAN PROV. JAWA BARAT									
	Pengembangan Kompetensi Pegawai RSUD Jampangkulon	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi di RS Jampangkulon	Terlatihnya Kinerja dan Kemampuan Aparatur RS Jampangkulon	100	13,950,000,000		74.34	10,949,413,393	10,371,051,204	94.72
	Penyediaan Perjalanan Dinas Aparatur	Persentase Sarana dan prasarana dalam kondisi baik di RS Jampangkulon	Tersedianya biaya konsultasi dan koordinasi aparatur	100	7,300,000,000		16.43	1,199,675,000	1,199,513,302	99.99

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.01.07.018.031	Penyediaan Jasa Langganan Kantor RS Jampangkulon	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran di RS Jampangkulon	Tersedianya Biaya Jasa Langganan Telp, Air Bersih, Listrik, dan Internet	100	11,950,000,000		7.57	1,500,000,000	905,015,909	60.33
	-	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Tersedianya honor Dokter dan Perawat	100						
1.02.01.07.015.008	Penyediaan Jasa Outsourcing Kebersihan dan keamanan RS Jampangkulon	Persentase Ketersediaan data kinerja di RS Jampangkulon	1) Terjaganya kebersihan Rumah Sakit 2) Terjaganya Keamanan Rumah Sakit	100	26,500,000,000		14.65	4,211,598,466	3,881,257,370	92.16
	-									
1.02.01.07.015.007	Penyediaan Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan/Kedokteran RS Jampangkulon		Akuratisasi Alat Kesehatan/Kedokteran		2,100,000,000		7.27	303,623,421	152,644,571	50.27
	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN RS PAMEUNGPEUK UPT DINAS KESEHATAN PROV.									

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	JAWA BARAT									
1.02.01.07.18.043	Peningkatan Kompetensi PNS RSUD Pameungpeuk	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi di RS Pameungpeuk	Terfasilitasinya Pelatihan dan Bimtek PNS	100	1,163,060,766		7.54	146,500,000	87,650,000	59.83
1.02.01.07.18.041	Pelayanan Administrasi Perkantoran di RS Pameungpeuk	Persentase Sarana dan prasarana dalam kondisi baik di RS Pameungpeuk	Terbayarnya Gaji Pegawai Medis dan Paramedis, Terfasilitasinya Makan Minum Rapat dan Tamu, Terfasilitasinya Perjalanan Dinas PNS, Terfasilitasinya Pengadaan ATK	100	86,434,184,000		10.91	11,700,392,696	9,428,764,411	80.59
		Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran di RS Pameungpeuk		100						
		Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan		100						
		Persentase Ketersediaan data kinerja di RS		100						

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pameungpeuk								
	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN RS KESEHATAN KERJA UPT DINAS KESEHATAN PROV. JAWA BARAT									
1.02.01.07.018.034	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi di RS Kesehatan Kerja	Jumlah pekerjaan pemeliharaan yang dilaksanakan	100	10,000,000,000		13.42	1,543,317,426	1,341,996,430	86.96
1.02.01.07.018.033	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Persentase Sarana dan prasarana dalam kondisi baik di RS Kesehatan Kerja	Jumlah kendaraan yang dipelihara	100	1,700,000,000		8.68	185,000,000	147,553,467	79.76
1.02.01.07.018.035	Penyediaan Rapat Rapat dan Koordinasi	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran di RS Kesehatan Kerja	jumlah rapat yang dilaksanakan	100	4,000,000,000		8.29	422,419,950	331,452,183	78.47
1.02.01.07.018.032	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu	Jumlah pekerjaan pemeliharaan yang dilaksanakan	100						

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dan sesuai peraturan perundang-undangan								
1.02.01.07.018.037	Penyediaan Jasa Kantor	Persentase Ketersediaan data kinerja di RS Kesehatan Kerja	Jumlah penyediaan jasa kantor	100	7,000,000,000		9.79	873,096,727	685,237,238	78.48
1.02.01.07.018.036	Penyediaan Barang dan ATK		Jumlah barang dan Laporan pemanfaatan ATK		2,750,000,000		7.96	249,999,634	219,020,815	87.61
1.02.01.07.018.038	Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur		Jumlah aparatur		5,500,000,000		14.24	899,990,000	783,319,968	87.04
	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN UNIT LABORATORIUM KESEHATAN UPT DINAS KESEHATAN PROV. JAWA BARAT									
1.02.01.07.018.023	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi di Laboratorium Kesehatan	Terpeliharannya alat dan perlengkapan kantor	100	9,440,250,000		4.68	441,797,998	441,797,998	100.00
1.02.01.07.018.027	Penyediaan Barang Cetak dan ATK UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Persentase Sarana dan prasarana dalam kondisi baik di Laboratorium	Barang Cetakan, ATK, dan Benda Pos	100	2,234,830,000		13.14	334,827,517	293,725,815	87.72

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kesehatan								
1.02.01.07.017.003	Pengadaan Perlengkapan Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran di Laboratorium Kesehatan	Alat dan Perlengkapan Kantor	100	1,745,000,000		24.31	509,500,000	424,284,280	83.27
1.02.01.07.018.025	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Belanja Pemeliharaan Rutin Gedung, Bangunan Bukan Gedung, Penataan Tempat Pelayanan, Tempat Parkir, dan Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	100	3,823,000,000		20.25	822,984,250	774,114,812	94.06
1.02.01.07.018.022	Penyelenggaraan Diklat, Kursus Singkat, Bimtek Aparatur UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Persentase Ketersediaan data kinerja di Laboratorium Kesehatan	Terlaksananya penambahan upah pungut bagi karyawan	100	980,000,000		9.74	104,350,000	95,495,000	91.51
1.02.01.07.018.021	Peningkatan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olah Raga serta Pakaian Aparatur UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat		Belanja Jasa Profesi/Instruktur/Penceramah, Belanja Makanan dan Minuman, Makanan Penambah daya tahan tubuh, Biaya Jiwa Korsa/outbound, Obat-obatan, Jasa Kesehatan/Vaksinasi, Pakaian Aparatur, Sewa Lapangan.		3,221,180,000		15.97	531,638,800	514,529,853	96.78

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.01.07.018.029	Penyediaan Langganan Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat		Belanja Langganan Listrik, Air, Telpon/Faximile, Internet, Retribusi Kebersihan, TV langganan, Majalah/Koran, dll		4,536,160,000		18.84	880,953,117	854,386,617	96.98
1.02.01.07.018.028	Penyediaan Jasa Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat		Jasa Keamanan, Jasa Kebersihan, Jasa Profesi Teknis Lainnya, Pakaian Seragam Jasa Kemanan/Kebersihan/Sopir/Pramu bakti, Belanja Bahan Pakai Habis		9,440,250,000		17.39	1,693,146,972	1,642,082,120	96.98
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat		BBM, Pajak, STNK, Suku Cadang, Pelumas, Jasa KIR, dan Jasa Service		781,320,000		8.41	81,317,300	65,703,989	80.80
1.02.01.07.018.026	Penyediaan Rapat-rapat dan Koordinasi UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat		Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Makanan dan Minuman Tamu, Galon/Air Mineral, Belanja Perjalanan Dinas.		944,890,000		17.15	177,052,462	162,085,401	91.55
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN UNIT PELATIHAN KESEHATAN UPT DINAS KESEHATAN PROV. JAWA BARAT										
1.02.01.07.018.001	Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur UPTD Pelatihan Kesehatan	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi di Upelkes	Instruktur Senam; Penceramah Rohani; Capacity Building; Pakaian Dinas dan Atributnya;	100	1,358,653,115		13.82	215,525,000	187,753,800	87.11

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pakaian Dinas Pegawai Non PNS; Perjalanan dinas dalam daerah PNS Provinsi; Perjalanan dinas luar provinsi PNS Provinsi; Kursus/pelatihan/bimtek/sosialisasi							
1.02.01.07.018.005	Penyediaan Jasa Kantor di Perkantoran UPTD Pelatihan Kesehatan	Persentase Sarana dan prasarana dalam kondisi baik di Upelkes	Jasa langganan telepon; Jasa langganan air, Jasa langganan listrik; Jasa langganan surat kabar/majalah; Jasa Internet dan Website; Jasa paket/pengiriman; Jasa langganan tv berbayar; Retribusi pengangkutan sampah; Jasa penyedotan tinja; Jasa pencucian; Jasa kebersihan; Jasa keamanan; Jasa Tenaga Kerja Non PNS	100	13,976,182,325		14.45	2,102,419,341	2,019,668,632	96.06
1.02.01.07.018.007	Penyediaan Barang Habis Pakai UPTD Pelatihan Kesehatan	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran di Upelkes	Penyediaan alat tulis kantor; Penyediaan perangk, materai, dan benda pos; Penyediaan belanja cetak; Penyediaan fotocopy	100	386,074,314		16.36	63,237,972	63,158,143	99.87
1.02.01.07.018.006	Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Pelatihan Kesehatan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu	Penyediaan mamin rapat; Penyediaan mamin tamu; Penyediaan mamin lembur; Penyediaan air mineral galon;	100	879,134,400		15.42	144,000,000	135,548,700	94.13

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dan sesuai peraturan perundang-undangan	Perjalanan dinas dalam daerah; Perjalanan dinas luar provinsi; Perjalanan dinas dalam daerah Non PNS							
1.02.01.07.018.002	Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pelatihan Kesehatan	Persentase Ketersediaan data kinerja di Upelkes	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih; Jumlah tabung pemadam kebakaran yang diisi ulang ; Jumlah peralatan rumah tangga/dapur pakai habis; Pemeliharaan lift; Pemeliharaan Genset; Pemeliharaan bangunan air; Pemeliharaan jaringan listrik; Pemeliharaan halaman/taman/pekarangan; Pemeliharaan tanaman; Pemeliharaan gedung dan bangunan; Pemeliharaan bangunan bukan gedung	100	4,865,433,419		19.69	1,051,670,663	958,061,686	91.10
1.02.01.07.018.003	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional UPTD Pelatihan Kesehatan		Jumlah bahan bakar minyak; Jumlah STNK yang diperpanjang; Perawatan Kendaraan.		880,666,780		12.56	144,250,000	110,624,213	76.69
1.02.01.07.018.004	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor UPTD Pelatihan Kesehatan		Jumlah peralatan listrik dan elektronik; Pemeliharaan perlengkapan kantor; Pemeliharaan alat studio dan alat		1,449,961,250		13.95	237,500,000	202,293,265	85.18

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			komunikasi.							
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN DINAS KESEHATAN PROV. JAWA BARAT										
1.02.01.07.013.004	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	1) Dokumen Profile Kesehatan; 2) Dokumen Roadmap SIK Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat; 3) Dokumen Data Aplikasi Sytem Informasi Puskesmas; 4) Dokumen Data dan Informasi Pengembang Sytem Informasi Kesehatan; 5) Data dan Informasi System Informasi Rumah Sakit; 6) System Informasi Teleconference; 7) System Informasi Terintegrasi di Puseksmas; 8) System Informasi Terintegrasi di Provinsi; 9) Penigkatan SDM Dalam Bidang Pengelolaan Data; 10) Evaluasi dan Perencanaan SIK Porovinsi Jawa Barat	100	20,698,100,000		8.04	1,924,889,394	1,664,848,066	86.49
1.02.01.01.016.002	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan Tahun Anggaran	Persentase Sarana dan prasarana dalam kondisi baik di Dinas Kesehatan	1. Dokumen Renja Dinkes Jabar Tahun 2020 2. Dokumen DPPA Dinkes Jabar	100	29,893,622,150		2.66	2,306,731,374	796,360,661	34.52

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2020	Provinsi Jawa Barat	tahun 2019 3. Dokumen RKA Dinkes Jabar Tahun 2020 4. Dokumen DPA Dinkes Jabar Tahun 2020 5. Laporan pertemuan Forum OPD 6. Laporan pertemuan Rakorwil 7. Laporan hasil konsultasi dan koordinasi ke luar provinsi 8. Pertanggungjawaban kegiatan APBD Subbag PP 9. Dokumen pengadaan langsung kegiatan penyusunan perencanaan							
1.02.01.01.016.003	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Pembangunan Bidang Kesehatan tahun 2019	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Laporan hasil monev Bankeu pembangunan bidang kesehatan tahun anggaran 2019	100	1,169,126,650		6.76	191,499,643	79,006,200	41.26
1.02.01.01.016.005	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	1. Dokumen laporan capaian kinerja 2. Dokumen LKPJ Dinkes Prov. Jabar Tahun 2019 3. Dokumen LAKIP Dinkes Prov. Jabar Tahun 2019 4. Dokumen LPPD Dinkes Prov.	100	1,245,440,400		10.34	205,887,500	128,814,992	62.57

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jabar Tahun 2019							
1.02.01.01.016.004	Rapat - Rapat dan Koordinasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Dinkes	Persentase Ketersediaan data kinerja di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	1. Dokumen laporan capaian kinerja 2. Dokumen LKPJ Dinkes Prov. Jabar Tahun 2019 3. Dokumen LAKIP Dinkes Prov. Jabar Tahun 2019 4. Dokumen LPPD Dinkes Prov. Jabar Tahun 2019	100	724,064,860		7.31	118,600,000	52,910,144	44.61
1.02.01.07.013.003	Peningkatan Kerjasama Program Kesehatan dengan Provinsi Lain		Dokumen Pertemuan/Kesepakatan bersama dengan provinsi lain		1,736,718,750		2.74	179,868,000	47,557,083	26.44
1.02.01.01.016.006	Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat		1) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monitoring Rekonsiliasi dan Konsolidasi Data Keuangan; 2) Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Prov. Jawa Barat		1,775,000,000		14.26	349,993,905	253,188,237	72.34
1.02.01.07.018.047	Penyediaan Barang habis Pakai kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat		Tersedianya Barag habis Pakai kantor		3,901,000,000		22.29	913,089,247	869,538,425	95.23
1.02.01.07.018.049	Penyediaan Rapat-Rapat dan Koordinasi Dinas Kesehatan		Jumlah Jamuan makan dan snack rapat kedinasan, jamuan makan dan snack tamu kedinasan, makan		15,395,000,000		20.93	3,709,570,200	3,221,448,367	86.84

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Provinsi Jawa Barat		dan minum petugas SPGDT, Belanja Air minetal/Galon, Perjalanan Dinas dalam daerah , dan perjalanan dinas luar provinsi							
1.02.01.07.018.051	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat		Tersedianya Jasa Keamanan, jasa Kebersihan, Pemeliharaan Taman dan biaya pembersihan septic tank		18,687,200,000		17.33	4,030,150,000	3,237,662,822	80.34
1.02.01.07.018.052	Penyediaan Jasa Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat		Jumlah pan, itia barjas mendapat honorarium, Jumlah paket ATK untuk operasional Dinas Kesehatan, Jumlah bulan penyediaan kebutuhan benda pos, Jumlah paket pekerjaan cetak, Jumlah bulan penyediaan biaya foto copy		17,989,000,000		13.60	2,826,270,000	2,445,796,654	86.54
1.02.01.07.018.053	Pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat		Jumlah bulan belanja BBM Kendaraan Operasional Roda 4 dan 2, Jumlah bulan belanja BBM Kendaraan Operasional Roda 4 dan 2, umlah kendaraan dinas yang dilakukan penggantian suku cadang, Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan penggantian pelumas		4,629,000,000		11.37	728,182,000	526,298,767	72.28

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2019	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019		
				Target Kinerja	Target Anggaran	kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.01.07.018.054	Penyediaan Alat pendukung Fasilitas kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat		Pengadaan tanah untuk Gedung Vaksin		51,185,500,000		82.56	51,185,500,000	42,256,929,500	82.56
1.02.01.07.018.055	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat		Presentasi pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Dinas kesehatan Provinsi Jawa Barat		7,653,353,360		12.42	1,359,650,000	950,557,144	69.91
	Pengadaan perlengkapan kantor dinas kesehatan prov jabar		Tersedianya Perlengkapan Kantor Dinas Kesehatan provinsi Jawa Barat		86,914,296,289		4.87	4,363,191,150	4,229,798,835	96.94
1.02.01.07.018.048	Peningkatan Kinerja dan kemampuan Aparatur Dinas Kesehatan Prov Jabar		Tersedianya Uang saku Diklatpim, Honorarium Narasumber dan Biaya Penanaman Sikap Mental dan Jiwa Korsa Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat		3,618,744,000		16.87	610,490,000	610,490,000	100.00
1.02.01.07.018.050	Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olah Raga serta Pakaian Apartaur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat		Tersedianya honor Penceramah, Instruktur Senam, sewa gedung olah raga, pakaian Dina Harian, Pakaian Olah raga PNS Dinas Kesehatan Prov Jabar		2,935,696,000		18.30	570,830,000	537,172,500	94.10

2.1.1 Program dan Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Tahun 2019

a. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tuberculosis

Persentase keberhasilan pengobatan TB tahun 2019 sebesar 75%, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 persentase keberhasilan pengobatan TB sebesar 74%. Namun angka keberhasilan ini belum memenuhi target. Hal ini dikarenakan masih banyak kasus yang belum dievaluasi dan kasus pindah yang tidak diketahui hasil akhir pengobatannya yaitu sebanyak 15.869 kasus (17%), pasien TB yang putus pengobatan sebanyak 5.439 kasus (5,88%), pasien gagal pengobatan sebanyak 532 kasus (0,6%) dan meninggal selama pengobatan TB sebanyak 1.412 kasus (1,5%).

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam mencapai indikator ini antara lain;

- a) Pencatatan dan Pelaporan tidak semua dilakukan sesuai standar
- b) Kurangnya monitoring dan evaluasi di berbagai tingkatan
- c) Jejaring layanan internal dan eksternal belum berjalan dengan optimal
- d) Turn Over petugas dilayanan cukup tinggi dan peralihan dari petugas lama ke petugas baru tidak dilakukan dengan baik

Beberapa upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk mencapai target indikator :

- a) Pertemuan jejaring layanan pemerintah dan swasta tingkat provinsi dengan mengundang dinas kesehatan kab./kota dan organisasi profesi di kab./kota.
- b) Bimbingan teknis pengendalian TB ke dinas kesehatan kab./kota dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- c) Menyampaikan feedback capaian penanggulangan TB dari kepala dinas kesehatan provinsi ke kepala dinas kesehatan kab./kota
- d) Pertemuan penguatan surveilans TB tingkat provinsi
- e) Pertemuan logistic TB
- f) Pertemuan Koalisi Organisasi Profesi TB
- g) Workshop TB anak

b. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Prevalensi hipertensi pada tahun 2019 sebesar 39,6%, tahun sebelumnya (2018) sebesar 34,5%. Ada kenaikan angka prevalensi dari tahun sebelumnya. Angka ini belum sesuai target yang diharapkan. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi untuk mencapai indikator antara lain;

- a) Untuk SDM P2PTM yang terlatih di Provinsi Jawa Barat masih sangat minim
- b) Sistem pencatatan dan pelaporan belum dapat mengakomodir semua kebutuhan data program dan tidak rutin dilaporkan
- c) Sering terjadi *turn over* dari petugas pemegang program P2PTM

- d) Dukungan pimpinan dan dana untuk kegiatan P2PTM di beberapa Kabupaten/Kota masih sangat minim
- e) Sarana dan prasarana untuk kegiatan P2PTM masih sangat terbatas
 - Upaya yang dilakukan untuk mendukung indikator ini adalah:
 - a) Meningkatkan bimbingan teknis kepada Kab/Kota yang memiliki manajemen yang kurang untuk P2PTM baik untuk SDM maupun untuk anggaran
 - b) Meningkatkan advokasi kepada pemegang kebijakan di Kab/Kota yang memiliki anggaran yang minim untuk kegiatan P2PTM
 - c) Meningkatkan promosi, pencegahan, dan pengurangan faktor risiko PTM melalui pemberdayaan masyarakat
 - d) Penguatan kapasitas dan kompetensi layanan kesehatan, serta kolaborasi sektor swasta dan professional
 - e) Membuat surat edaran kepada Kabupaten/Kota bahwa petugas yang telah terlatih tidak dipindah selama 3 tahun setelah pelatihan
 - f) Melaksanakan kegiatan sosialisasi PTM kepada lintas program sehingga dapat meningkatkan sinergitas kegiatan di lapangan
 - g) Meningkatkan kapasitas pengelola program P2PTM di Kabupaten/Kota dalam penggunaan Portal Web melalui *workshop*_SI PTM
 - h) Meningkatkan kapasitas pengelola program P2PTM di Kabupaten/Kota dan puskesmas dalam Program P2PTM melalui pelatihan atau *workshop* bersumberdana APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota
 - i) Pengadaan posbindu kit untuk pelaksanaan kegiatan deteksi dini di masyarakat dengan sumberdana APBD Kabupaten/Kota maupun Dana Desa yang berada di Kabupaten/Kota

c. Penguatan Pembiayaan Kesehatan

Pada tahun 2018, sebanyak 27 Kabupaten/kota sudah berintegrasi dengan BPJS Kesehatan dan pada trimester 3 mendapatkan anggaran dari pajak rokok untuk pembayaran premi, sehingga terjadi peningkatan kepesertaan yang signifikan, sedangkan di tahun 2019 walaupun pemerintah daerah Kabupaten/Kota mendapatkan anggaran dari pajak rokok dan lain-lain, dalam hal kepesertaan pada bulan Agustus pemerintah pusat Kementerian Sosial menerbitkan Kepmensos 79/huk/2019 tentang penonaktifan Peserta PBI APBN, di Jawa Barat ada sekitar 923.895 orang yang di nonaktifkan sehingga terjadi pengurangan kepesertaan yang signifikan, ditambah lagi ada pengurangan PBI daerah hasil Audit dari BPKP sekitar 10.344 orang yang mempengaruhi persentase kepesertaan juga.

Ditahun yang sama ada issue kenaikan tarif dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) pusat yang mana menjadi pemikiran Kabupaten/Kota untuk menambah jumlah kepesertaan, karena berhubungan dengan penyediaan anggaran yang harus disediakan oleh pemerintah daerah, tidak semua pemerintah daerah Kabupaten/Kota mampu menyediakan anggaran dengan besaran premi setelah kenaikan.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai indikator ini adalah

1. Adanya Peraturan Peraturan Baru tentang pelaksanaan JKN sehingga sedikitnya mempengaruhi pelaksanaan JKN di Lapangan, baik ditingkat FKTP maupun FKRTL dan Lingkungan Dinas Kesehatan Kab/Kota maupun Provinsi;
2. Adanya Penonaktifan Peserta PBI Pusat sesuai dengan hasil Verifikasi dan Validasi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial RI;
3. Adanya Penonaktifan Peserta PBI Daerah hasil Audit BPKP;
4. Adanya issue tentang Kenaikan Tarif Iuran BPJS Kesehatan

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah

1. Sosialisasi Peraturan-peraturan baru tentang pelaksanaan JKN ke tingkat Kabupaten/Kota dan Fasilitas Kesehatan;
2. Koordinasi dengan pihak terkait (Dinas Sosial, Bappeda dan Yansos Setda Provinsi Jawa Barat) dalam penyelesaian penonaktifan peserta PBI APBN; dilakukan percepatan verifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang dikoordinatori oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;
3. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Dinas Sosial Kab/Kota dalam hal Penonaktifan Peserta PBI daerah;
4. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait kepastian kenaikan iuran dan Koordinasi dengan Bappeda Provinsi dalam hal penyediaan anggaran untuk Premi 40% kewajiban Provinsi.

d. Penguatan STBM dalam Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi

Pencapaian indikator kinerja persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat pada tahun 2019 sebesar 72,39%, target tidak tercapai karena data dari Kab/Kota fluktuatif (ada yang meningkat dan ada Kab/Kota yang mengalami penurunan capaian). Permasalahan yang dihadapi ialah belum semua Puskesmas melaporkan data capaiannya ke Kab/Kota, sehingga itu yang menyebabkan Kab/Kota rendah capaiannya.

Permasalahan yang dihadapi adalah 1) alokasi anggaran belum dapat memenuhi semua tugas pokok yaitu dalam hal pengawasan kualitas lingkungan prioritas provinsi, seperti pengawasan kualitas lingkungan industri di daerah perbatasan, peningkatan kapasitas tenaga dalam pengambilan dan pemeriksaan sampel lingkungan, audit kesehatan lingkungan di lokasi terbatas dan pengembangan wilayah sehat. Dan adanya efisiensi biaya (dana APBN tahun 2016 yang mengalami efisiensi biaya); 2) Kapasitas tenaga pengelola kesehatan lingkungan di provinsi terbatas jumlah dan kompetensinya, mengingat banyaknya program dan kegiatan yang harus dilaksanakan. Keterbatasan tenaga di tingkat provinsi terutama pada tenaga teknis, sehingga tidak sebanding dengan program dan kegiatan yang

ada); 3) Pedoman, Peraturan, Juklak dan Juknis yang masih terbatas; 4) Peran koordinasi antar sektor dan pelibatan peran non pemerintahan yang masih harus ditingkatkan.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Permukiman dalam rangka meningkatkan capaian akses penduduk terhadap sanitasi yang layak dengan memberikan data untuk ditindaklanjuti oleh Dinas Perumahan dan Permukiman dalam membangun sarana fisik (karena Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat bukan OPD yang membangun sarana fisik)

e. Pengawasan Penyehatan Lingkungan TTU/TPM dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Bidang Kesehatan Lingkungan

Output kegiatan adalah Jumlah Petugas Kab/ Kota yang mengikuti Pengelollan Limbah Medis Fasyankes; Jumlah Kab/ Kota yang Dilakukan Pendampingan Kesehatan Lingkungan TTU dan TPM; Jumlah Orang yang Melaksanakan Penilaian Asrama Haji; Jumlah TPM yang Dijadikan Tempat Transit Jemaah haji yang Diperiksa Higiene Sanitasinya; Jumlah Dokumen Pengawasan Higiene Sanitasi di Asrama Haji Bekasi; Jumlah Kab/ Kota yang Dilakukan Pendampingan Pemicuan STBM di DAS Citarum. Outcome kegiatan adalah Persentase Penduduk Menggunakan Jamban Sehat.

f. Pencegahan Penyakit yang Dapat dicegah dengan Imunisasi

Output kegiatan adalah Audit atas dugaan Kasus KIPI yang dilakukan oleh Komda KIPI Jawa Barat; 8 kab/kota mendapat fasilitasi pengelolaan coldchain yang sesuai standar; 21 kab/kota mendapatkan fasilitasi persiapan dan pelaksanaan BIAS tahun 2019; 17 kab/kota mendapatkan fasilitasi teknis untuk mencapai target cakupan IDL; Jumlah penyusunan laporan Feedback cakupan Imunisasi dan PWS; Kab/Kota yang dilakukan pemantauan/investigasi atas laporan dugaan Kasus Kejadian Ikutan Imunisasi (KIPI) oleh Dinkes Provinsi dan KOMDA KIPI Jawa Barat; Upaya peningkatan koordinasi dan terfasilitasinya permasalahan teknis program Imunisasi Provinsi Jawa Barat dari Kemenkes RI; 54 peserta kab/kota dan Provinsi yang mendapatkan sosialisasi tentang pengelolaan Cold Chain yang berkualitas; 100 Peserta Mengikuti Seminar Pekan Imunisasi.

g. Pencegahan dan Pengendalian DBD

Output kegiatan adalah Koordinasi Lintas Sektor/Lintas Program Kawasan Bebas Jentik dengan Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik; Pertemuan Penguatan Jejaring dalam Pencegahan dan Pengendalian DBD; Pertemuan Peningkatan Tata Laksana dalam Pengendalian Penyakit DBD; Pemantauan Wilayah Bebas Jentik dengan Akselerasi Pelaksanaan Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik; Pemantauan dalam rangka Peningkatan Tatalaksana dan penanggulangan kasus DBD.

2.1.2 Program dan Kegiatan yang Memenuhi Target Tahun 2019

a. Peningkatan Gizi Masyarakat

Output kegiatan adalah Rapat Koordinasi Peningkatan Gizi Masyarakat; Pertemuan evaluasi percepatan penurunan stunting; Peringatan Hari Gizi Nasional (HGN); Rapat Penyusunan RAD Penurunan Stunting di Jawa Barat; Pertemuan evaluasi Peningkatan Gizi Masyarakat; Bimbingan Teknis Peningkatan Gizi Masyarakat; Pelacakan Kasus Gizi Buruk.

b. Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir

Rasio Kematian Ibu merupakan salah satu indikator yang penting dalam menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara atau daerah. Rasio Kematian Ibu Provinsi Jawa Barat tahun 2019 yaitu 78,3 per 100.000 kelahiran hidup di bawah target yang ditetapkan sebesar 86/ 100.000 KH. Ratio kematian ibu pada tahun 2018 sebesar 79,68, mengalami penurunan kasus kematian di tahun 2019.

Berdasarkan Laporan dari Kabupaten/Kota tahun 2019 kematian ibu tahun 2019 sebesar 684 kasus, ada penurunan dibanding tahun 2018 sebesar 700 kasus, Penurunan sebanyak 16 kasus ini masih diatas target yang ditetapkan. 10 Kab/kota penyumbang Kematian ibu tertinggi tahun 2019 berada di Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kota Depok.

Capaian tersebut merupakan wujud dari keberhasilan program pelayanan kesehatan yang salah satunya memberikan jaminan kepada setiap ibu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, mulai dari saat hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, dan perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi.

Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk mencapai target indikator tersebut antara lain;

- a. Pendampingan Penyelamatan ibu dan Bayi baru lahir melalui penguatan sistem rujukan,
- b. Pemberdayaan masyarakat dan tata kelola klinis pelayanan kesehatan baik di Rumah Sakit maupun Puskesmas,
- c. Peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas kesehatan dalam pelayanan kegawat daruratan ibu di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (FKTP) dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lanjutan (FKTL),
- d. Peningkatan kemitraan dengan stake holder terkait,
- e. Perbaikan pencatatan dan pelaporan kematian melalui aplikasi
- f. penguatan koordinasi dan integrasi kegiatan dengan melibatkan LP/LS terkait.

c. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Hasil realisasi PHBS tahun 2019 adalah 48,1%, hal ini mengalami peningkatan sebesar 3,7% dari hasil realisasi tahun 2018 sebesar 44,4%. Hal ini dikarenakan ada komitmen di Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program PHBS termasuk keikutsertaan organisasi masyarakat (ormas), LSM dan dunia usaha dalam pelaksanaan kampanye PHBS.

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan indikator Persentase Rumah Tangga mencapai yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah :

1. Adanya laporan dari kabupaten/kota yang tidak konsisten.
2. Tidak semua kabupaten/kota mengalokasikan dana untuk pendataan PHBS Rumah Tangga.
3. Metoda pendataan yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota tidak sama, ada yang pendataan dengan total coverage dan ada yang melakukan dengan cara sample atau dipantau

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

1. Pertemuan Pembinaan PHBS Kolaborasi dengan PKK
2. Monitoring dan Evaluasi PHBS
3. Evaluasi PHBS melalui Kegiatan Kesatuan Gerak PKK KB dan Kesehatan
4. Penguatan melalui kegiatan dan Implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

d. Pengendalian Penyakit Menular ISPA

Output kegiatan adalah Pertemuan Kewaspadaan Dini Avian Influenza; Pertemuan Validasi Data Program P2 ISPA; Pembinaan Pengendalian Penyakit ISPA ke 12 Kab/Kota.

e. Pengendalian Penyakit Malaria

Output kegiatan adalah Pertemuan Penguatan Jejaring dalam rangka Advokasi Percepatan eliminasi Malaria; Pertemuan Penguatan Surveilans dan sistem informasi malaria; Pemantauan Penguatan Surveilans dan sistem informasi malaria; Assessment Pengendalian Vektor Malaria Terpadu.

f. Pengendalian Penyakit Filariasis dan Kecacingan

Output kegiatan adalah Pertemuan Review Managemen Informasi Pelaporan Filariasis & Kecacingan berbasis online dengan aplikasi e-filca; Buku Pedoman P2 Cacingan sebanyak 640 buku; Pemantauan POPM Filariasis pada 3 kabupaten yaitu Kab. Bogor, Kuningan dan Purwakarta; Pemantauan Survei Penularan Kejadian Filariasis pada 2 Kab/Kota yaitu Kab. Subang dan Kota Bekasi; Pembinaan Eliminasi Filariasis sebanyak 14 Kab/Kota; Pembinaan Pengendalian Cacingan pada Kab/Kota non stunting sebanyak 8 Kab/Kota.

g. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Zoonosis

Output kegiatan adalah Bimbingan Teknis dan Monitoring P2 Zoonosis ke 10 kabupaten/kota; Monitoring dan Evaluasi P2 Zoonosis; Pertemuan Validasi Data; Perjanjian Kerjasama Antara Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah perihal Pengendalian Penyakit Menular di Perbatasan.

h. Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini Bencana dan Kesehatan Matra

Output kegiatan adalah Terlatihnya Tim Gerak Cepat Wabah dan atau Bencana alam pada Dinas Kesehatan Provinsi, Kab/Kota; Jumlah 27 dari kab-kota mengikuti pertemuan evaluasi TGC; Jumlah Petugas di Kab/Kota Prov. Jabar yang dilakukan pembinaan dalam Penanggulangan Bencana; tersedianya fasilitas/alat apabila terjadi bencana diwilayah kab/kota di prov Jabawa Barat; pemantauan kejadian bencana dan atau KLB diwilayah Provinsi Jawa Barat; terpenuhinya pelayanan kepada masyarakat terdampak krisis kesehatandan Kejadian Luar Biasa; Jumlah Kab/kota menyampaikan kesiapan menjelang embarkasi haji; Jumlah kab/kota yang melaporkan hasil pelaksana program haji. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Penduduk Yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan *Outcome* kegiatan adalah Persentase Kegiatan *Rapid Health Assesment*.

i. Surveilans Penyakit dan Penanggulangan KLB

Output kegiatan ini adalah 27 peserta dari kab-kota mengikuti pertemuan evaluasi surveilans AFP/PD3I; 27 peserta dari kab-kota mengikuti pertemuan peningkatan kapasitas Tim Gerak Cepat; 135 orang yang berasal dari 27 kab-kota mengikuti Pertemuan Peningkatan Sistem Pelaporan Surveilans Puskesmas dan Rumah Sakit; 27 kab-kota mengikuti Pertemuan Riview Penanggulangan KLB Tingkat Provinsi. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Penduduk Yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan. *Outcome* kegiatan adalah Persentase Masyarakat yang dilayanani dilokasi Bencana.

j. Peningkatan Manajemen dan Upaya Pelayanan Kesehatan Primer

Output kegiatan adalah 27 Kab/Kota terfasilitasi , koordinasi dan monitoring dan evaluasi manajemen dan upaya pelayanan kesehatan primer; 27 Kab/Kota terpanatau pekayanan kesehatan pada arus mudik dan balik di hari libur nasional; 27 Kab/Kota terfasilitasi, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi penguatan PIS-PK di Jawa Barat; 27 Kabupten/Kota bersinergi dengan provinsi dalam bidang pelayanan kesehatan; 8 Kab/Kota kerjasama Layad Rawat; manajemen layad rawat di provinsi dan 8 Kabupaten/kota.

k. Ketersediaan, Pemerataan, Keterjangkauan dan Mutu Sediaan Farmasi Kosalkes dan Mamin

Ketersediaan Obat Esensial di Puskesmas sudah terpenuhi sesuai Target Indikator Kinerja Berdasarkan Indikator ketersediaan obat yang diperoleh dari rekap ketersediaan 20 item obat esensial yg merupakan indikator ketersediaan obat puskesmas yang dikirim setiap bulan oleh seluruh puskesmas di Jawa Barat secara berjenjang yaitu laporan ketersediaan obat dikirim dari puskesmas ke dinas kesehatan kabupaten dan kota dan kemudian dikirim ke dinas kesehatan provinsi, dari dinas kesehatan provinsi kemudian dikirim ke kemenkes RI paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

Permasalahan yang dihadapi ialah terdapat obat Program yang datang melebihi RKO seperti Tablet Tambah Darah dan ada obat yang datang kurang dari RKO seperti obat TBC Kategori I (FDC Kat I). Upaya yang dilakukan untuk mendukung indikator ini adalah

- a. Pertemuan RKO Kab/Kota
- b. Pertemuan RKO RS Pemerintah
- c. Monev Ketersediaan Obat dan Vaksin

l. Perencanaan, Pengelolaan dan Mutu Tenaga Kesehatan

Output kegiatan adalah Evaluasi perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan; Pengelolaan data SDM di Fasilitas Kesehatan; Evaluasi Pendamping Puskesmas dan Pendamping RS, Direktur RS dan Dinas Kesehatan di Jawa Barat; Koordinasi Pengelolaan TKWNA & WKDS; Peningkatan Pendidikan Tenaga Kesehatan; Koordinasi MTKP; Pengelolaan Registrasi; Pengelolaan peningkatan mutu tenaga; Pengelolaan WKDS; Pengelolaan RPL.

m. Penyusunan Regulasi Bidang Kesehatan

Output kegiatan adalah Draft Dokumen Regulasi Bidang Kesehatan.

n. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) DAK Non Fisik

Output kegiatan adalah Meningkatnya realisasi Anggaran DAK Non Fisik Tahun 2018 di 27 Kabupaten/Kota; Realisasi Anggaran DAK Non Fisik dapat dilaksanakan; Dokumen Perencanaan BOK Provinsi Jawa Barat; Kesepakatan Upaya Pencapaian Anggaran BOK di 5 Wilayah; Terselenggaranya monitoring dan evaluasi kegiatan BOK.

2.1.3 Program dan Kegiatan yang Melebihi Target 2019

a. Peningkatan Program Kesehatan Keluarga

Output kegiatan adalah Pertemuan Koordinasi Program Kesehatan Keluarga; Orientasi SDIDTK bagi Petugas Kesehatan dan Non Kesehatan di Tingkat Provinsi; Orientasi Pedoman Pelayanan Kesehatan Keluarga bagi Perguruan Tinggi di Tingkat Provinsi; Pertemuan Pemantapan dalam perencanaan Program KIA, Kespro dan KB melalui PTKIA di 5 Kabupaten/

Kota; Pertemuan Koordinasi Program Keluarga Berencana di Tingkat Provinsi; Pertemuan Evaluasi Model Sekolah sehat di Tingkat Provinsi; Pertemuan Koordinasi Program Tatalaksana KtP/A di Tingkat Provinsi; Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Kesehatan Keluarga di Tingkat Provinsi; Pendampingan Program Kesehatan Keluarga; Pembinaan dan Pemenuhan Undangan Kegiatan Dalam Provinsi.

b. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Capaian persentasi Puskesmas siap akreditasi pada tahun 2019 sudah mencapai target yaitu sebesar 95,89% bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan yaitu 94,76%. Sedangkan bila dibandingkan antara capaian tahun 2018 dengan capaian tahun 2019 menunjukkan adanya peningkatan. Jumlah puskesmas terakreditasi pada tahun 2018 sebesar 387 puskesmas dan jumlah kumulatif puskesmas terakreditasi sampai tahun 2018 adalah sebesar 772 puskesmas (67,53%), sedangkan puskesmas siap akreditasi pada tahun 2019 sebesar 256 puskesmas dan jumlah kumulatif puskesmas siap akreditasi sampai tahun 2019 adalah sebesar 1028 puskesmas (95,89%).

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam mencapai indikator ini antara lain:

1. Pelaksanaan pertemuan konsolidasi Tim Pendamping Akreditasi FKTP Kab/ Kota, Provinsi dan Surveior mundur, hal ini dikarenakan menunggu standar akreditasi puskesmas yang baru, sehingga harus Reschedule dan koordinasi dengan Kemenkes terkait standar baru akreditasi puskesmas
2. Masih ada puskesmas belum akreditasi, sehingga dinas kesehatan provinsi Jawa Barat berkoordinasi dengan Dinkes Kabupaten/ Kota untuk melakukan pembinaan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di Puskesmas secara berkesinambungan baik untuk puskesmas yang belum akreditasi maupun yang sudah akreditasi

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan provinsi Jawa Barat untuk mendukung indikator ini adalah

1. Pertemuan Konsolidasi Tim Pendamping Akreditasi FKTP Kab/Kota, Provinsi dan Surveior Jawa Barat,
2. Workshop Audit Internal dan Tinjauan Manajemen di FKTP
3. Lokakarya Mutu dan Akreditasi Puskesmas Bagi Pemegang Program di Dinas Kesehatan Kab/Kota

c. Peningkatan Program Layad Rawat Jawa Barat

Kegiatan Layad Rawat merupakan indikator baru yang ada pada renstra dinas kesehatan tahun 2019, kegiatan ini merupakan program inovasi pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang kurang mampu dengan sistem jemput bola/menjemput kerumah, program ini beryujuan agar warga jawa barat yang kurang mampu dapat menikmati layanan

kesehatan istimewa, mencegah potensi kondisi kesehatan yang kian buruk dengan pertolongan pertama, mengikis kendala akses transportasi di beberapa wilayah tanpa batas waktu. Untuk meningkatkan kemudahan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau.

Terkait indikator ini untuk baru tertuang dalam DPA tahun 2019 dan masih bersatu dengan kegiatan rutin pada Program Pelayanan Kesehatan, kegiatan Peningkatan Manajemen dan Upaya Pelayanan Kesehatan Primer di Provinsi Jawa Barat, sehingga tahun 2018 belum ada kegiatan layad rawat. Kegiatan Layad Rawat yang terlaksana pada tahun 2019 sebagai berikut:

- a. Pertemuan sosialisasi, advokasi, koordinasi Layad Rawat tingkat Provinsi, sebanyak 4 kali pertemuan
- b. Pengadaan alat-alat angkutan bermotor sepeda motor Layad Rawat
- c. Narasumber tim TP4D
- d. Monitoring Evaluasi Layad Rawat
- e. Workshop relawan Layad Rawat tingkat di 27 Kab/Kota
- f. Monev Kegiatan
- g. Pelatihan Layad Rawat bagi dokter, perawat dan bidan sebanyak 5 angkatan
- h. Workshop sopir Layad Rawat tingkat Kab/Kota sebanyak 2 angkatan

Permasalahan yang dihadapi antara lain;

1. Tidak semua Kab/Kota hanya 22 Kab/Kota mengajukan kegiatan melalui proposal kegiatan Layad Rawat untuk belanja modal untuk pembelian motor ambulance roda dua dan 5 kab/kota yang tidak mengajukan proposal.
2. Perubahan SK PPK Kegiatan Layad Rawat pada bulan Juni
3. Penyedia tidak ada yang sanggup menyelesaikan ambulan di akhir tahun.
4. Hasil probity audit inspektorat adanya efisensi sehubungan kesiapan Kab/Kota dalam menerima kerjasama Layad Rawat
5. Kegiatan Pertemuan Peningkatan Program Layad Rawat Jawa Barat, terlaksana 4 kali dan tidak terlaksana 1 kali pertemuan.
6. Pelatihan petugas call center layad rawat di kab/Kota sebanyak 4 kali tidak terealisasi dikarenakan tidak bisa lelang cepat, dan tidak ada penyedia yang masuk dalam SIKAP sehingga tidak ada penyedia yang bersedia untuk memberi talangan kegiatan tersebut
7. Belanja Modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulance, tidak terealisasi karena tidak ada penyedia ambulance yang sanggup menyelesaikan dalam waktu masa perubahan .
8. Peraturan Gubernur Layad rawat baru diundangkan di bulan Oktober 2019.
9. Pembahasan Juknis Layad Rawat dengan Kabupaten/Kota baru selesai di akhir Tahun anggaran.

d. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Fasilitas kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL)

Capaian persentasi Rumah Sakit siap akreditasi pada tahun 2019 sudah mencapai target yaitu sebesar 88,89% bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan yaitu 59,13%. Sedangkan bila dibandingkan antara capaian tahun 2018 dengan capaian tahun 2019 menunjukkan adanya peningkatan. Jumlah Rumah Sakit terakreditasi pada tahun 2018 sebesar 70 Rumah Sakit dan jumlah kumulatif Rumah Sakit terakreditasi sampai tahun 2018 adalah sebesar 229 Rumah Sakit, sedangkan Rumah Sakit terakreditasi pada tahun 2019 sebesar 91 Rumah Sakit dan jumlah kumulatif Rumah Sakit teakreditasi sampai tahun 2019 adalah sebesar 320 Rumah Sakit (88,89%).

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai indikator ini adalah Masih ada Rumah Sakit di Jawa Barat belum terakreditasi, sehingga diperlukannya Koordinasi dengan Dinkes Kabupaten/ Kota untuk melakukan pembinaan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit secara berkesinambungan, mendorong Rumah Sakit untuk akreditasi.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung indikator ini adalah

1. Workshop Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1 bagi Rumah Sakit
2. Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
3. Sosialisasi Standar Akreditasi dan Indikator Mutu Pelayanan Rumah Sakit

e. Peningkatan Penyehatan Lingkungan Kesehatan Olahraga

Output kegiatan adalah Jumlah Pegawai yang diukur kebugaran jasmaninya; Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan Pendampingan GP2SP; Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan Bimbingan Teknis Kesehatan Lingkungan Kerja. Outcome kegiatan adalah Persentase Puskesmas Di Kabupaten/Kota Menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar.

f. Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS dan IMS

Output kegiatan adalah Pertemuan Validasi Data Kasus HIV AIDS dan IMS; Pertemuan Jejaring HIV AIDS & Tripel Eliminasi di 4 Wilayah; Pertemuan Validasi Data TB HIV bagi Petugas TB HIV di Kab/Kota; Evaluasi Manajemen Program HIV dan IMS; Sinkronisasi Data Program HIV AIDS; Monitoring dan Evaluasi Layanan Perawatan Dukungan dan Pengobatan (PDP); Monitoring Desentralisasi Obat ARV; Monitoring dan Evaluasi Layanan Konseling Tes.

g. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Hepatitis dan ISP

Output kegiatan adalah Pertemuan Deteksi Dini Hepatitis pada Kelompok paling beresiko; Pertemuan Evaluasi & Perencanaan HPISP; Workshop LROA; Bimbingan Teknis HPISP.

h. Pengendalian Penyakit Kusta

Output kegiatan adalah Dokumen MOU tentang Penanggulangan Kusta pada anak sekolah; refrehsing Tatalaksana Kasus Kusta bagi petugas; monitoring evaluasi dan validasi data kusta di 27 kab./kota; Rekomendasi Tindaklanjut Permasalahan Kusta Dari Subdit Kusta Kementerian Kesehatan RI; pembelajaran penanganan Kusta di Provinsi Sulawesi Utara.

i. Peningkatan Program Pelayanan Kesehatan Tradisional

Output kegiatan Peningkatan Program Pelayanan Kesehatan Tradisioanal di Provinsi Jawa Barat sebesar 65, 81%; Jumlah pengelola Kestrad Kab/Kota mengikuti Rakor /pertemuan; Perwakilan Dinkes Kab/kota mengikuti acara workshop; Jumlah Kab/Kota dimonitor dan dievaluasi kestrad, unit aplikasi sistem pembinaan dan pengawasan berbasis online Gan Hatra; Meningkatnya capaian kegiatan yankesprimer dan kestrad di 27 Kab/Kota di 1088 puskesmas yang tercapai 620 puskesmas , target 75% capaian 98%; Pembinaan dan Pengawasan pelayanan kesehatan tradisional tidak terealisasi.

j. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Output kegiatan adalah Pertemuan Penguatan Pelayanan Kesehatan; Penguatan Pelaksanaan PPRA; Rakontek Pelayanan Kesehatan Rujukan; Pertemuan evaluasi RS Regional; Pertemuan Koordinasi Yankes Rujukan Kab/Kota; Pendampingan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal RS; sosialisasi BPRS, Pemantauan kegiatan RS yang bersifat non teknis medis, menangani keluhan yg bersifat non teknis medis; Monev Pelayanan kesehatan Rujukan.

k. Peningkatan, Pengawasan, dan Pengendalian Penggunaan Obat Rasional, Peredaran Sediaan Formasi Kosalkes dan Mamin

Output kegiatan adalah Monev Pelaksanaan Gema Cermat; Pertemuan Sosialisasi Penggunaan Obat Rasional; Pertemuan Evaluasi Gema Cemat pada Stakeholder; Workshop Formularium; Monitoring Sarana Kefarmasian dan Alkes.

l. Pengelolaan Tenaga Kesehatan Non PNS

Output kegiatan adalah Laporan bulanan kinerja nakes non PNS; Pendayagunaan Tenaga Kesehatan non PNS; Honor tenaga pengelola; evaluasi dr, drg, bidan dan nakes lain non PNS. Monitoring evaluasi.

m. Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan

Output kegiatan adalah Sosialisasi Kegiatan; Rapat persiapan; Pelaksanaan Pemilihan tenaga kesehatan Puskesmas Teladan;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

2.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat memiliki Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Kepala Perangkat Daerah/ Biro	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Ratio Kematian Ibu	Kelahiran Hidup	86/100.000 KH	78,3/100.000 KH	109,83 %
2.	Rasio Kematian Bayi	Kelahiran Hidup	5,2/1000 KH	3,28/1.000 KH	158,54 %
3.	Prevalensi Stunting	Persen	27,2 %	26,21 %	103,78 %
4.	Persentase Keberhasilan Pengobatan TB	Persen	89 %	75 %	84,27 %
5.	Persentase penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana provinsi yang mendapat pelayanan	Persen	100 %	100 %	100 %
6.	Persentase Puskesmas Yang Terakreditasi	Persen	94,76 %	95,85 %	101,19 %
7.	Persentase Kab/Kota Yang Melaksanakan Layanan Layad Rawat	Persen	29,63 %	44,44 %	149,98 %
8.	Persentase Rumah Sakit Akreditasi	Persen	59,13 %	88,89 %	150,33 %
9.	Persentase Penduduk Yang Mendapat Jaminan Kesehatan Menuju Universal Health Coverage	Persen	90 %	94,33 %	104,81 %

Sumber : LKIP, Tahun 2019

2.2.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat memiliki Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Kepala Perangkat Daerah/ Biro	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
10.	Ratio Kematian Ibu	Kelahiran Hidup	85/100.000 KH	85,77/100.000 KH	99,10 %
11.	Rasio Kematian Bayi	Kelahiran Hidup	5.0/1000 KH	3,18/1.000 KH	157,23 %
12.	Prevalensi Stunting	Persen	25,2 %	26,21 %	96,15 %
13.	Persentase Keberhasilan Pengobatan TB	Persen	89 %	73,16 %	82,20 %
14.	Persentase penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana provinsi yang mendapat pelayanan	Persen	100 %	100 %	100 %
15.	Persentase Puskesmas Yang Terakreditasi	Persen	99,81 %	95,90 %	96,08 %
16.	Persentase Kab/Kota Yang Melaksanakan Layanan Layad Rawat	Persen	48,15 %	100 %	207,68 %
17.	Persentase Rumah Sakit Akreditasi	Persen	68,99 %	88,95 %	128,93 %
18.	Persentase Penduduk Yang Mendapat Jaminan Kesehatan Menuju Universal Health Coverage	Persen	90 %	85,51 %	128,93 %

Sumber : LKIP Dinas Kesehatan Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas indikator kinerja Utama pada Dinas Kesehatan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a) Rasio Kematian Ibu

Rasio Kematian Ibu Provinsi Jawa Barat tahun 2020 yaitu 85,77 per 100.000 kelahiran hidup di atas target yang ditetapkan sebesar 85 per 100.000 kelahiran hidup hal ini dikarenakan adanya peningkatan kasus kematian ibu di Jawa Barat yaitu dari 684 kasus pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2020 yaitu 745 kasus. Berdasarkan Laporan dari Kabupaten/Kota tahun 2020 kematian ibu tahun 2020 sebesar 745 kasus, ada peningkatan dibanding tahun 2019 sebesar 684 kasus, kenaikan sebanyak 61 kasus. 10 Kab/kota penyumbang Kematian ibu tertinggi tahun 2020 berada di Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bandung, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Purwakarta.

Permasalahan dari peningkatan kasus kematian ibu yaitu dikarenakan kondisi terjadinya pandemi Covid-19 yang berakibat pada tatakelola layanan, tidak seluruh kabupaten/ kota memiliki fasilitas pelayanan kesehatan untuk rujukan ibu bersalin dengan status reaktif Covid-19, kompetensi petugas dan pengelola program dalam penanganan kegawat daruratan maternal neonatal, refocusing anggaran dan sistem rujukan yang belum optimal. Penyebab kematian Ibu antara lain pendarahan sebanyak 27,65%, Hipertensi dalam kehamilan (HDK) sebanyak 28,72%, gangguan darah sebanyak 9,80%, Gangguan Metabolik sebanyak 3,49% dan 26,58% disebabkan lain-lain.

Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk mencapai target indikator adalah kolaborasi dan koordinasi dalam implementasi NSPK baik dari Kementerian Kesehatan RI maupun dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota, penyesuaian pelaksanaan program selama pandemi Covid-19, penyusunan pedoman pelayanan Kesehatan keluarga selama pandemi Covid-19, pelaksanaan kegiatan untuk akselerasi dengan sifat non budgeting, penguatan tatakelola sistem rujukan, serta koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder terkait.

b) Ratio Kematian Bayi

Angka kematian bayi di Provinsi Jawa Barat didapat berdasarkan laporan dari kabupaten/kota, didapat dari jumlah kematian bayi dibagi jumlah kelahiran hidup dikali 1000 KH. Ratio kematian bayi tahun 2020 3,18/1000 KH menurun di bandingkan tahun 2019. Hal ini baik sekali karena terdapat penurunan kematian bayi. Penyebab kematian bayi masih didominasi oleh 40,04% diakibatkan oleh BBLR, 29,16% disebabkan Asifikasia, 14,91% penyebab lain-lain dan 11,98% lainnya disebabkan oleh kelainan bawaan. Penyebab kematian post Neonatal didominasi oleh 65,11% penyebab lain-lain, 18,91% disebabkan pneumonia, dan 10,53% disebabkan oleh diare. Berdasarkan laporan kabupaten/kota tahun 2020 jumlah kematian bayi pada tahun 2020 sebanyak 2766 bayi mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2019 sebanyak 2861 bayi. Sepuluh kabupaten/kota dengan kematian tertinggi tahun 2020 antara lain Kabupaten sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Bogor.

Permasalahan yang dihadapi yaitu dikarenakan kondisi terjadinya pandemi Covid-19 yang berakibat pada tatakelola layanan, kompetensi petugas dan pengelola program dalam penanganan kegawat daruratan maternal neonatal, refocusing anggaran dan sistem rujukan yang belum optimal.

Adapun upaya yang telah dilakukan adalah Penyesuaian pelaksanaan program selama Pandemi Covid-19, Pembuatan Pedoman Pelayanan Kesga selama Pandemi Covid-19,

pelaksanaan kegiatan untuk akselerasi dengan sifat non budgeting, penguatan tatakelola sistem rujukan, serta koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder terkait.

c) Prevalensi Stunting

Prevalensi Stunting yang di Jawa Barat tahun 2020 adalah 26,21% angka tersebut menggunakan baseline studi Status Gizi balita Indonesia tahun 2019. Hasil survei tahun 2020 masih dalam proses pengolahan data sehingga belum ada penetapan prevalensi. Jumlah balita di Jawa Barat adalah 4.308.604 orang. Berdasarkan hasil surveilans gizi tahun 2020 yang diolah dalam elektronik Pencatatan Pelaporan Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) balita yang diukur tinggi badan pada bulan agustus adalah 2.897.336 orang dan jumlah balita stunting yang ditemukan sebanyak 277.847 orang (pengunduhan data per 4 Januari 2020).

Permasalahan pertama waktu pelaksanaan survei dilakukan akhir tahun jadi masih membutuhkan waktu pengolahan data, kedua data surveilan gizi belum menggambarkan seluruh balita karena pengukuran belum mencakup seluruh sasaran balita, dan petugas yang mengukur masih ada yang belum terlatih, serta sarana dan prasarana yang digunakan belum seluruhnya menggunakan alat yang standar. Upaya pemenuhan data dengan memperbaiki kualitas data surveilans gizi sehingga diperoleh data valid dari hasil surveilans gizi jadi tidak tergantung dengan data hasil survei. Dan untuk menurunkan prevalensi stunting di Jawa Barat telah dilakukan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting terintegrasi.

Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk mencapai target indikator ialah melakukan orientasi tatalaksana gizi buruk utk petugas puskesmas, melakukan diseminasi PMBA utk petugas puskesmas, advokasi dan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor, mendorong kabupaten kota untuk optimalisasi pelayanan gizi selama pandemi dengan mengeluarkan protokol pelayanan gizi semasa pandemi, mendorong kabupaten kota untuk melakukan inovasi pelayanan percepatan penurunan stunting, Melakukan penilaian konvergensi stunting di 20 kabupaten kota lokus, Melakukan evaluasi percepatan penurunan stunting di Jawa Barat, melakukan sosialisasi pelayanan gizi di masa pandemi, menyusun protokol pelayanan gizi selama pandemik, pembuatan SK Tim Percepatan Penuruan Kematian Ibu, Bayi dan stunting, Pembuatan Draf RAD percepatan penurunan stunting, dan Rapeda Percepatan Penurunan Stunting di Jawa Barat.

d) Keberhasilan Program TB

Persentase keberhasilan pengobatan TB Tahun 2020 realisasi indikatornya sebesar 73,16% dari target tahun 2020 sebesar 89% atau sebesar 82,20% dari target yang ditentukan, capaian tersebut dampak dari adanya pandemi Covid-19 dimana jumlah pasien yang di obati sebanyak 111.256 kasus, jumlah pasien sembuh sebanyak 26.730 kasus dan jumlah pasien pengobatan lengkap sebanyak 54.664 kasus.

Permasalahan yang dihadapi selama Pandemi Covid-19 beberapa fasilitas kesehatan TCM TBC digunakan untuk pemeriksaan covid-19, tenaga pengelola/petugas TBC di kabupaten/kota maupun di fasilitas kesehatan merangkap menjadi petugas COVID-19 sehingga menyebabkan angka keberhasilan pengobatan rendah karena masih banyak hasil akhir pengobatan yang belum dievaluasi, adanya pergantian Sistem Pencatatan dan Pelaporan TBC dari SITT/eTB Manager ke SITB, dan terkendalanya pemantauan minum obat (PMO) terhadap pasien oleh petugas.

Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat ialah melaksanakan virtual meeting "Penguatan Jejaring Laboratorium TB di masa pandemi COVID-19" dengan mengundang Kab/Kota dan narasumber Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan PATELKI pada 29 Juni 2020, memberikan intruksi kepada Kab/Kota untuk kembali mengatur jejaring fasilitas kesehatan TCM dalam penggunaan alat TCM TBC untuk pemeriksaan Covid-19 oleh Kabupaten/Kota, melaksanakan On the Job Training (OJT) SITB secara bertahap oleh Kab/Kota di wilayah masing-masing, mendorong petugas TBC di Kab/Kota maupun di faskes untuk menyelesaikan pencatatan pelaporan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan beberapa faskes memberlakukan Pemantauan Minum Obat (PMO) dilakukan oleh keluarga pasien atau media elektronik/video call.

e) Persentase Penduduk yang berdampak krisis kesehatan akibat bencana provinsi yang mendapat pelayanan.

Pelayanan kepada Masyarakat Tahun 2020 di wilayah Provinsi Jawa Barat cukup berhasil dalam penanganan dan memfasilitasi beberapa wilayah lokasi bencana alam (penyediaan Obat-obatan dan alat kesehatan), Pada tahun 2020 warga masyarakat yang terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana di Jawa Barat sejumlah 548.303 jiwa yang tersebar di 13 Kab/Kota, diantaranya Kabupaten Bandung Barat, Kab, Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kota Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Garut.

Permasalahan yang dihadapi ialah masih belum dipahaminya baik oleh pelaksana dalam hal ini aparatur terhadap indikator dari masing-masing bidang yang harus dilaksanakan dan masih terbatasnya kompetensi pegawai dalam menyiapkan database/baseline menyebabkan indikator yang sebenarnya telah terlaksana menjadi tidak terdokumentasi dan belum semua kabupaten kota melaksanakan pelaporan jika terjadi bencana atau KLB wabah.

Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat terkait pencapaian indikator ini adalah Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan KLB Wabah bencana alam bidang Kesehatan, Pemantauan Penyakit dan Masalah Kesehatan Matra.

f. Persentase Puskesmas terakreditasi

Persentase puskesmas yang terakreditasi Tahun 2020 capaian indikator sebesar 95,90 %, dimana jumlah puskesmas terakreditasi sebanyak 1.028 puskesmas. Permasalahan capaian th 2020 belum mencapai target yang ditetapkan (99.81), hal ini dikarenakan awal Maret 2020 terjadi Pandemi Covid-19, dan sesuai dengan SE Menkes Nomor : HK.02.01/MENKES/455/2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Penetapan RS Pendidikan pada Masa Pandemi Covid-19, kegiatan akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk sementara ditunda sampai 1 tahun masa Pandemi Covid-19 ini dicabut. Upaya yang sudah dilaksanakan dalam upaya menjaga mutu pelayanan antara lain pendampingan akreditasi oleh Tim Pendamping tetap dilaksanakan sesuai protokol kesehatan baik untuk puskesmas yang akan akreditasi perdana ataupun reakreditasi.

Pendampingan untuk puskesmas yang akan akreditasi perdana ataupun akan reakreditasi tidak bisa dilaksanakan secara optimal, melihat kondisi lapangan dan bila di puskesmas ada yang terpapar Covid-19 maka pendampingan dihentikan dulu, Beberapa pertemuan/ workshop di provinsi tidak bisa dilaksanakan karena efisiensi anggaran, Workshop Tata Kelola Mutu, Workshop Pemahaman Standar di Kab/ Kota dengan sumber biaya DAK NF Kab/ Kota dilaksanakan menjelang akhir tahun karena menunggu kebijakan Kemenkes.

Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Untuk puskesmas yang harus akreditasi perdana dan puskesmas yang akan reakreditasi tetap dilakukan pendampingan dengan memperhatikan protokol kesehatan, Pendampingan dan workshop dilaksanakan secara online atau offline, Koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Kab/ Kota dan Surveior Akreditasi FKTP Jabar, dan menindaklanjuti edaran Kemenkes agar fasyankes membuat surat pernyataan kesediaan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada masa Pandemi Covid-19

g) Persentase Kabupaten / Kota yang melaksanakan Layanan Layad Rawat

Kegiatan Layad Rawat merupakan program inovasi pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang kurang mampu dengan sistem jemput bola/menjemput kerumah, program ini bertujuan agar warga Jawa Barat yang kurang mampu dapat menikmati layanan kesehatan istimewa, mencegah potensi kondisi kesehatan yang kian buruk dengan pertolongan pertama, mengikis kendala akses transportasi di beberapa wilayah tanpa batas waktu. Untuk meningkatkan kemudahan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau.

Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan layanan layad rawat Tahun 2020 Capaian indikator sebesar 100%, dimana guna mendukung program layad rawat, telah

ditandatangani Perjanjian Kerjasama Layad Rawat antara provinsi dengan 27 kab kota, serta telah difasilitasi adanya layanan layad rawat call center Public Service Center (PSC) 119 serta jejaringnya di semua Kabupaten Kota se Jawa Barat. Selain itu juga telah didistribusikan 86 sepeda motor PSC 119 layad rawat ke kab kota pada awal tahun 2020, serta telah diadakan tambahan 20 lagi sepeda motor NMax pada Desember tahun 2020 yang akan segera didistribusikan. Pengadaan kendaraan roda dua untuk mendekatkan akses pelayanan ke daerah yang tidak terjangkau dengan ambulance/kendaraan roda empat.

Permasalahan pelaksanaan layad rawat adalah terkait pandemic covid-19 dimana peran PSC 119 makin diandalkan dalam mendukung system rujukan pasien, pengantaran jenazah, dan edukasi kepada masyarakat. Sementara belum semua Kab kota memiliki sarana prasarana PSC 119 yang lengkap, SDM pendukung maupun bangunan khusus. Upaya yang sedang dilakukan adalah advokasi kepada kab kota agar ada alokasi dari kab kota untuk kegiatan layad rawat ini baik penambahan sarana prasarana, Gedung maupun SDM

Upaya yang dilakukan ialah Kegiatan Layad Rawat Tahun 2020 melanjutkan kegiatan 2019 yaitu penandatanganan Kerja Sama kegiatan Layad Rawat, pemasangan PSC 119 dan atau jejaringnya yang dilengkapi dengan perangkat lunak PSC dan agent nya di 27 Kabupaten/kota, distribusi kendaraan roda dua Layad Rawat. Peningkatan koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan Layad Rawat Terencana dan Layad Rawat Tidak Terencana, merevisi DPA yang disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan Layad Rawat.

h) Persentase Rumah Sakit Terakreditasi

Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi Tahun 2020 capaian indikator sebesar 88,95 %, dimana jumlah Rumah Sakit terakreditasi sebanyak 322 Rumah Sakit. Capaian tahun 2020 sudah mencapai target yang ditetapkan (68,99%), Permasalahan yang dihadapi tahun 2020 adalah awal Maret 2020 terjadi Pandemi Covid-19, dan sesuai dengan SE Menkes Nomor HK.02.01/MENKES/455/2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Penetapan RS Pendidikan pada Masa Pandemi Covid-19, kegiatan akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk sementara ditunda sampai 1 tahun masa Pandemi Covid-19 ini dicabut.

Permasalahan untuk mencapai indikator ini ialah Awal Maret 2020 terjadi Pandemi Covid-19 sehingga sesuai dengan sesuai dengan Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/455/2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Penetapan RS Pendidikan pada Masa Pandemi Covid-19, kegiatan akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk sementara ditunda sampai 1 tahun masa Pandemi Covid-19 ini dicabut.

Kegiatan pertemuan/ workshop terkait akreditasi upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator ini adalah mengikuti workshop yang dilaksanakan oleh Kemenkes, KARS dan menindaklanjuti edaran Kemenkes agar fasyankes membuat surat pernyataan kesediaan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada masa Pandemi Covid-19 Rumah Sakit diefisiensikan.

i) Persentase Penduduk yang mendapat Jaminan Kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC)

Persentase penduduk yang mendapat jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage Tahun 2020 capaian indikator sebesar 85,51 %, dimana jumlah penduduk yang terdaftar sebagai peserta JKN adalah sebesar 39.411.879 jiwa (Data 31 Desember 2020) dari total penduduk 46.092.205 jiwa (berdasarkan Dirjen Disdukcapil Kemendagri Semester 1 Tahun 2020).

Permasalahan yang dihadapi ialah kekhawatiran akan turunnya capaian kepesertaan menuju UHC akibat adanya pandemi Covid-19 yaitu banyaknya pekerja yang di PHK sehingga terputus Jaminan Kesehatannya dan adanya penonaktifan data PBI yang tidak sesuai/tidak valid dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga dilakukan penyesuaian capaian target kinerja Tahun 2020 akibat pandemic Covid-19 yang semula target capaian 90% menjadi 85%, Proses Verifikasi dan Validasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota belum bisa berjalan dengan maksimal, sehingga untuk penambahan ataupun penggantian Peserta PBI JK memerlukan waktu yang cukup lama, dan Pada tahun 2020 keluar regulasi baru terkait Jaminan Kesehatan dan Besaran Premi, yaitu Peraturan Presiden No. 64 tahun 2020 dan Permendagri No 64 tahun 2020.

Upaya yang telah dilakukan yaitu masing-masing Kab/Kota melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap kepesertaan segmen PPU yang di PHK yang nantinya akan disesuaikan dengan sistem penjaminan di daerah masing-masing, ada yang masuk ke segmen PBI-JK, Peserta PBPU dan BP yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah ataupun Peserta PBPU mandiri sedangkan upaya dalam hal penonaktifan data PBI yang tidak termasuk kedalam DTKS yaitu koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi dalam hal percepatan proses verifikasi dan validasi data oleh masing-masing Dinas Sosial Kab/Kota sehingga data yang sudah valid dapat di entrykan kembali kedalam aplikasi SIX-NG dan bisa mengakomodir masyarakat yang berhak menjadi peserta PBI-JK.

Tabel 2.4
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d Tahun 2020
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Kab/Kota	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program /	Output	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	Kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT				100%	58,390,196,733			979,780,750	965,088,750	98.50 %
1.02.01.010.006	Penyelamatan Ibu dan Bayi baru lahir	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Cakupan Persalinan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Minimal 88%	1) Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan informasi mengenai informasi teknis Pelaksanaan Pendampingan Penyelamatan ibu dan bayi baru lahir di provinsi; (12 Kab/Kota) 2) Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan informasi hasil Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Penyelamatan ibu dan bayi baru lahir di provinsi; (11 Kab/Kota) 3) Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Penyeliaan Fasilitatif di 5 kab; 4) Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pendampingan Klinis P4- K1 di 5 kab; 5) Jumlah Laporan hasil Pendampingan Klinis P3 Kab. Sumedang; 6) Jumlah Laporan hasil Penyeliaan Fasilitatif Kab. Sumedang; (1 Lap) 7) Jumlah Kabupaten yang melaksanakan Bimbingan Teknis Klinis K2; (1 Kab) 8) Jumlah Dokumen MoU Rujukan kab	100%	11,408,150,000	70 %	56,0 %	14,745,000	12,378,395	96.0 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program /	Output	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	Kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ciamis; 9) Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Maklumat Pelayanan di PKM dan RS di kab ciamis; 10) Jumlah Petugas yang mengikuti Workshop pengenalan dan implementasi Alat Pantau Kinerja Rujukan (APKJR) Kab. Ciamis; (30 Org) 11) Jumlah Dokumen hasil Audit Kematian Maternal Dan Perinatal kab ciamis; 12) Jumlah Laporan hasil Penyeliaan Fasilittaif kab ciamis; 13) Jumlah Laporan hasil Pendampingan Klinis P1 - P2 Kab. Pengembangan (kab ciamis); 14) Jumlah Dokumen Laporan hasil Kesepakatan Penyamaan Persepsi dan Penyusunan Organisasi dan Penyusunan POKJA Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru lahir di Kab Ciamis; 15) Jumlah Laporan hasil Assesment di Fasyankes Kab. Ciamis; 16) Jumlah Laporan Hasil Penetapan dan Sosialisasi Fasyankes Kab. ciamis;							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program /	Output	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	Kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.02.01.010.005	Peningkatan Gizi Masyarakat	Persentase Kab/Kota dengan Cakupan Pemberian Tablet Tambah Darah pada Bumil Minimal 95%	1) Jumlah Laporan dan RTL Hasil Rapat Koordinasi teknis program gizi; 2) Jumlah Laporan dan RTL Hasil Orientasi TTD ibu hamil; 3) Jumlah Laporan dan RTL Hasil Orientasi TTD rematri; 4) Jumlah Laporan dan RTL Hasil Orientasi Penilaian Pertumbuhan; 5) Jumlah Laporan dan RTL Rapat koordinasi teknis Program Gizi; 6) Dokumen hasil dan RTL Pekan ASI Sedunia; 7) Jumlah Laporan dan RTL Evaluasi Paska pelatihan/ Orientasi PAG di Puskesmas; 8) Jumlah Laporan dan RTL Pendampingan cakupan indikator; 9) Jumlah Laporan dan RTL Bintek Peningkatan Gizi Masyarakat; 10) Jumlah Laporan dan RTLmanajment program gizi;	100%	8,451,497,700	70 %	59,0 %	241,941,350	236,649,900	97,81 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program /	Output	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	Kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			11) Laporan Hasil konsultasi pusat; 12) Jumlah Laporan dan RTL Dukungan penyusunan hasil BPB; 13) Jumlah Laporan dan RTL Evaluasi kegiatan program gizi; 14) Jumlah Laporan dan RTL pemenuhan undangan dalam provinsi							
	Penguatan STBM dalam Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi	Persentase Penduduk yang Menggunakan Air Minum yang Berkualitas	1) Jumlah Dokumen Laporan Workshop Percepatan ODF; 2) Jumlah Petugas yang dilatih penerapan Teknologi Tepat Guna; 3) Jumlah Dokumen Hasil Rakor KKS; 4) Jumlah Dokumen Hasil Monev percepatan ODF; 5) Jumlah Dokumen Hasil monev pendampingan Pamsimas; 6) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Bimtek Kab/Kota Sehat	100%	3,648,220,000	80 %	80,29 %	140,333,500	137,519,500	97,99 %
	Pengawasan Penyehatan Lingkungan TTU/TPM dan Pengawasan Asrama Haji	Persentase Penduduk Menggunakan Jamban	1) Jumlah Dokumen Laporan Hasil kesepakatan pertemuan Koord Kesling	95%	2,239,050,000	80 %	82,49 %	24,021,000	23,192,000	96,55 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program /	Output	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	Kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tahun 2019	Sehat	RS; 2) Jumlah Laporan Hasil pemicuan STBM di DAS Citarum, 3) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Laboratorium Kesehatan; 4) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Kesepakatan Rakor DAS Citarum; 5) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monev TTU/TPM/RS; 6) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan HS Embarkasi; 7) Jumlah Dokumen Laporan Hasil HS TPM Transit Jemaah Haji dan; 8) Jumlah Dokumen Laporan hasil penilaian asrama haji.							
	Peningkatan Penyehatan Lingkungan Kerja	Persentase Puskesmas di Kab/Kota Menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar	1) Jumlah Dokumen hasil Kesepakatan Pembentukan SK Tim GP2SP Puskesmas di 20 Kab/Kota; 2) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pertemuan Upaya Kesehatan Kerja sektor informal dlm mendukung capaian kinerja Kesehatan kerja Puskesmas di 20	75 %	770,851,000	60 %	79,91 %	5,470,000	5,470,000	100 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program /	Output	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	Kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Kab/Kota;							
			3) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Perjalanan Dinas Puskesmas di 20 Kab/Kota							
	Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Unsur Masyarakat Tingkat Provinsi yang Dilibatkan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	1) Dokumentasi Hasil Kesepakatan dan RTL Pembinaan PHBS Rumah Tangga; 2) Dokumentasi Hasil Kesepakatan dan RTL Pembinaan Model PHBS Tempat Kerja/Sekolah/ Tempat Umum; 3) Dokumentasi Hasil Kesepakatan dan RTL Pembinaan Promotif Preventif bersama Mitra Kesehatan (Toma/ Komunitas/ Ormas/ DU); 4) Dokumentasi Hasil Kesepakatan dan RTL Monev PKRS; 5) Dokumentasi Bahan Kampanye/ILM Kesehatan di berbagai media dan event; 6) Dokumentasi Hasil Pengadaan dan RTL Distribusi Media Cetak; 7) Dokumentasi Hasil dan RTL Konsultasi ke Pusat/ Koordinasi ke Provinsi lain; 8) Dokumentasi Hasil Kegiatan dan RTL	85,2 %	10,324,713,126	4	4	366,315,800	365,742,400	99,84 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program /	Output	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	Kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Hasil Workshop/Kursus/Seminar.							
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah Unsur Masyarakat Tingkat Provinsi yang Dilibatkan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	1) Dokumentasi Hasil Kesepakatan dan RTL Pembinaan Pengelolaan Desa Siaga Aktif; 2) Dokumentasi Hasil Kegiatan dan RTL Sosialisasi dan Advokasi kepada tokoh masyarakat, komunitas kesehatan, ormas dan dunia usaha; 3) Dokumentasi Hasil Kesepakatan dan RTL Model Peningkatan Strata Desa Siaga Aktif; 4) Dokumentasi Hasil Kesepakatan dan RTL Replikasi Emas di Kab Subang; 5) Dokumentasi Hasil Kegiatan dan RTL Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas SBH. 6) Dokumentasi Hasil Kesepakatan dan RTL Pembentukan Poskestren Model; 7) Dokumentasi Hasil Kesepakatan dan RTL Review Pengembangan UKBM	4	6,521,774,907	4	4	53,405,000	51,594,000	96,61 %
	Peningkatan Program Kesehatan Keluarga	Persentase Kab/Kota dengan Cakupan Persalinan di Fasilitas	1) Laporan hasil dan RTL Pertemuan Koordinasi Kegiatan Upaya Kesehatan		14,251,300,000	70 %	56,0 %	133,549,100	132,542,100	99,25 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program /	Output	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	Kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pelayanan Kesehatan minimal 88%	Keluarga; 2) Laporan hasil dan RTL Pengembangan Model Implementasi Tata Klinis Kesehatan Keluarga; 3) Laporan hasil dan RTL Pengembangan Model Sekolah Sehat; 4) Laporan hasil dan RTL Pengembangan Pemberdayaan Lansia; 5) Laporan hasil dan RTL Pertemuan Koordinasi Program Keluarga Berencana di Tingkat Provinsi; 6) Laporan hasil dan RTL Pertemuan Koordinasi Program Tatalaksana KtP/A di Tingkat Provinsi; 7) Laporan hasil dan RTL Orientasi Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal; 8) Laporan hasil dan RTL Orientasi KIE Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin; 9) Laporan hasil Dukungan Manajemen Program Kesehatan Keluarga; 10) Laporan hasil dan RTL Pembinaan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program /	Output	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	Kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			dan Pemenuhan Undangan Kegiatan Dalam Provinsi;							
			11) Laporan hasil dan RTL Konsultasi dan Pemenuhan Undangan Kegiatan Luar Provinsi							
	Peningkatan Penyehatan Lingkungan Kesehatan Olah Raga	Persentase Puskesmas di Kab/Kota Menyelenggarakan Olah Raga pada Kelompok Masyarakat di Wilayah Kerjanya	1) Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Kebugaran Jasmani Calon Jemaah Haji di 27 Kab Kota 2) Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Pengukuran Kebugaran Anak Sekolah di 15 Kab Kota	75 %	387,320,000	60 %	0	10,585,000	0	0
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT								1,076,232,487	1,040,132,231	96,65 %
	Pencegahan dan pengendalian penyakit menular TB	Persentase Keberhasilan Pengobatan TB (Treatment Succes Rate)	1). Jumlah Dokumen Laporan hasil Pertemuan dengan Kab /Kota Mencapai Cakupan Pengobatan Semua Kasus TB yang diobati 90 % 2). Jumlah Dokumen Laporan dari 27 kab /Kota berbasis online dengan aplikasi SITT 3) Jumlah dokumen Laporan pertemuan Peningkatan Pencegahan dan	91 %	6,416,524,680	89 %	73,16 %	201,643,400	192,390,677	95,41 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program /	Output	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	Kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			pengendalian TB pada Anak							
			4) Jumlah dokumen Laporan Logistik Program P2TB							
			5) Jumlah dokumen Laporan Tatalaksana penanggulangan Tuberkulosis sesuai permenkes nomor 67 tahun 2016							
			6) Jumlah dokumen Laporan kegiatan pengendalian Tuberkulosis dapat didiskusikan dengan Kab/Kota							
			7) Jumlah dokumen Laporan Laporan kegiatan Refreshing monev laboratorium untuk LRI di 27 kab/Kota							
			8) Jumlah dokumen kontrak tenaga pendamping Tuberkulosis terpenuhi							
			9) Jumlah dokumen pembentukan DPPM ditingkat provinsi							
			10) Jumlah dokumen pengembangan Koalisi Organisasi Propesi di 27 kab kota							
			11) Jumlah Dokumen 16 RS yang tercantum di KMK 350 tahun 2017 melaksanakan layanan TB RO017 melaksanakan layanan TB RO							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	Kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pencegahan dan pengendalian HIV AIDS dan IMS	Persentase Pasien HIV Yang Diobati	<p>1. Jumlah Kab/Kota mampu melaksanakan Skring HIV melalui Konseling Tes dan Mendorong Pasien HIV Positif Untuk mendapatkan Obat ARV</p> <p>2. Jumlah Kab/Kota tidak mengalami Stok Out Obat ARV dan Kebutuhan Logistik P2 HIV dapat Terpenuhi</p> <p>3. Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Tripel Eliminasi di 4 Wilayah (27 Kab/Kota)</p> <p>4. Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi Pusat berupa update kebijakan, Tatalasana, Strategi HIV AIDS dan IMS di Indonesia</p> <p>5. Jumlah Dokumen hasil Validasi Data HIV AIDS dan IMS</p> <p>6. Jumlah Dokumen Kesepakatan Jejaring Keja Terkait Tripel Eliminasi (HIV, Sifilis dan Hepatitis) pada Ibu Hamil dan Populasi Kunci di 27 k/k</p> <p>7. Jumlah dokumen hasil Validasi dat TB dan HIV</p> <p>8. Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi</p>	50 %	6,089,837,250	45 %	42 %	165,509,555	160,509,555	97,21 %.

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program /	Output	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	Kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Manjemen Program sesuai pedoman							
			9. Jumlah Dokumen Kontrak petugas Logistik,							
			10. Jumlah Dokumen Kontrak petugas Pendamping							
	Pencegahan penyakit penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I)	Persentase Desa/ Kelurahan Yang Mencapai UCI >90%	1). Jumlah kegiatan Audit atas dugaan Kasus KIPI yang dilakukan oleh Komda KIPI Jawa Barat; 2) Jumlah kab/kota mendapatkan fasilitasi pengelolaan Cold Chain yang sesuai standar; 3) Jumlah kab/kota mendapatkan fasilitasi Persiapan dan Pelaksanaan BIAS oleh TP UKS tingkat Provinsi; 4) Jumlah kab/kota yang mendapatkan fasilitasi teknis untuk mencapai target cakupan IDL dalam rangka pencapaian UCI; 5) Jumlah penyusunan laporan Feedback cakupan Imunisasi dan PWS; 6) Jumlah Tenaga Pendamping Teknis Program yang diberikan honor dari APBD	92 %	3,574,140,000	90,5 %	44,8 %	107,067,200	106,447,200	99,42 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	Kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Provinsi selama 1 tahun; 7) Jumlah Dokumen Honor diberikan kepada tenaga ahli KOMDA KIPI Jawa Barat atas jasa pengkajian kasus KIPI; 8) Jumlah Dokumen Kab/Kota yang dilakukan pemantauan/investigasi atas laporan dugaan Kasus Kejadian Ikutan Imunisasi (KIPI) oleh Dinkes Provinsi dan KOMDA KIPI Jawa Barat; 9) Jumlah Dokumen Upaya peningkatan koordinasi dan terfasilitasinya permasalahan teknis program Imunisasi Provinsi Jawa Barat dari Kemenkes RI; 10) Jumlah peserta Kab/Kota dan Provinsi yang hadir pada pertemuan peningkatan evaluasi Program Imunisasi 2020 dan tersosialisasi up date Program 2021; 11) Jumlah peserta kab/kota dan Provinsi yang mendapatkan sosialisasi tentang pengelolaan Cold Chain yang berkualitas; 12) Jumlah Peserta Mengikuti Seminar Pekan Imunisasi							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program /	Output	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	Kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengendalian penyakit menular ISPA	Persentase Kab/Kota 50% Puskesmas Melaksanakan Tatalaksana Pneumonia Balita Sesuai Standar	1. Diperoleh arahan dan rekomendasi dari Kemenkes terhadap masalah-masalah ISPA di Jawa Barat 2. Diperoleh dokumen Kesepakatan pembagian peran dalam penguatan jejaring kerjasama profesi (lintas sektor) 3. Diperolehnya dokumentasi kesepakatan terhadap peranan masing- masing Kab/Kota di dalam Pencegahan dan Pengendalian ISPA 4. Diperolehnya Peningkatan dalam tatalaksana dan penanggulangan ISPA di Kab/Kota sesuai SOP 5. Diperolehnya dokumen pemantauan Sentinel ILI	65 %	1,282,840,000	60,0 %	44,44 %	29,183,789	27,089,500	92,82 %
	Pencegahan dan pengendalian penyakit menular hepatitis dan ISP	Persentase Kab/Kota yang Melakukan Deteksi Dini Hepatitis B Pada Ibu Hamil	'1) Jumlah Dokumen kesepakatan perencanaan & evaluasi program HPISP 2) Jumlah petugas di refreshing Tatalaksana Kasus 3) Jumlah Dokumen kesepakatan dengan Rumah Sakit untuk pelaksanaan Deteksi Dini Hepatitis B 4) Jumlah Laporan Hasil arahan dan	100 %	1,739,953,500	80 %	96 %	73,782,206	72,646,200	98,46 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program /	Output	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	Kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			rekomendasi dari Subdit HPISP							
			5) Jumlah Laporan Hasil bimbingan teknis di 13 kab/kota							
	Pencegahan dan pengendalian DBD	Persentase Kab/Kota yang Mencapai IR DBD <49/100.000 Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> *1. Jumlah Dokumen Laporan Hasil arahan dan rekomendasi dari Kemenkes terhadap masalah-masalah di Jawa Barat 2. Jumlah Dokumen SK Tim Pokjanel DBD masing-masing sektor 3. Jumlah Draft Surat Edaran Gubernur dalam Pencegahan dan Pengendalian DBD 4. Jumlah Dokumen Pedoman SOP tatalaksana kasus di setiap Faskes 5. Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan 6. Jumlah Dokumen Pembuatan dan Pembentukan SK Satu Rumah Satu Jumantik di Kab/Kota 	96 %	1,944,081,183	90 %	55,55 %	19,196,179	18,874,300	98,32 %
	Pengendalian penyakit malaria	Persentase Kab/Kota Sudah Eliminasi Malaria	<ul style="list-style-type: none"> *1. Jumlah Dokumen Laporan Hasil arahan dan rekomendasi dari Kemenkes terhadap masalah-masalah di Jawa Barat 2. Jumlah Dokumen Hasil Kesepakatan 	100 %	1,348,868,328	93 %	93 %	58,357,874	57,002,500	97,68 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program /	Output	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	Kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			pembagian peran masing-masing sektor dalam percepatan eliminasi malaria							
			3. Jumlah Dokumen Hasil kesepakatan terhadap peranan masing-masing Fasilitas kesehatan di dalam tatalaksana kasus							
			4. Jumlah Dokumen hasil monitoring terkait tatalaksana kasus							
			5. Jumlah Dokumen hasil Assessment Pengendalian Vektor Terpadu							
	Pengendalian penyakit kusta	Proporsi Cacat Kusta Tingkat II	'1) Jumlah Dokumen Kesepakatan Dokter Spesialis Kusta dalam Penanganan dan Pengobatan Kusta; 2) Jumlah Kab/Kota didapatkan data yang Valid dan Akurat; 3) Jumlah Dokumen Arahan dan Rekomendasi tentang Pengendalian Penyakit Kusta; 4) Jumlah Kab/Kota mendapatkan Sosialisasi Kusta untuk Perguruan tinggi di Jawa Barat	9 %	4,575,000,000	< 10 %	6 %	111,972,920	109,301,500	97,61 %
	Pengendalian penyakit filariasis dan	Proporsi Kab/Kota Yang	1) Jumlah dokumen kesepakatan pada 27 Kab/Kota melakukan Eliminasi Filariasis	73 %	2,052,964,000	45 %	27,27 %	74,949,841	74,176,200	98,97 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program /	Output	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	Kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	kecacingan	Mencapai Eliminasi Filariasis	<p>dan Reduksi Cacingan</p> <p>2) Jumlah dokumen pemeriksaan antigen sebagai evaluasi penularan kejadian filariasis dapat dilakukan sesuai dengan prosedur</p> <p>3) Jumlah dokumen kegiatan pengendalian filariasis dapat didiskusikan dengan Kab/Kota</p> <p>4) Jumlah dokumen kegiatan pengendalian cacingan dapat dilakukan pemecahan masalah pada II Kab/Kota non stunting</p> <p>5) Jumlah Tenaga pendamping Filariasis dan cacingan dapat terpenuhi sebanyak 2 orang</p> <p>6) Jumlah Dokumen Kebijakan & Strategi Pengendalian Filariasis dan Cacingan dapat terupdate segera</p>							
	Pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis	Persentase Kab/Kota Yang Mencapai Eliminasi Rabies	<p>1. Jumlah Kab/ Kota Melaksanakan Kasus Zoonosis Sesuai Standar</p> <p>2. Jumlah Dokumen informasi terbaru terkait pedoman, tatalaksana kasus Zoonosis di indonesia dan di jawa barat</p>	100 %	2,530,408,242	88 %	88 %	40,387,923	36,710,750	90,90 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program /	Output	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	Kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3. Jumlah Laporan Hasil Pertemuan Jejaring P2 Zoonosis di Daerah Perbatasan Provinsi							
			4. Jumlah Laporan Hasil Pertemuan Jejaring Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang di Daerah Perbatasan							
			5. Jumlah Laporan Hasil Pertemuan Monitoring dan Evbaluasi P2 Zoonosis							
	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular dinkes prov jabar	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM Terpadu (PANDU)	1) Dokumen Laporan dan Hasil Kesepakatan Pertemuan SI P2PTM Bagi Petugas Provinsi dan Kab/Kota; 2) Dokumen Laporan dan Hasil Kesepakatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Bagi Petugas Provinsi dan Kab/Kota; 3) Dokumen Laporan dan Hasil Kesepakatan Pertemuan Monitoring Evaluasi Program P2PTM; 4) Dokumen Laporan dan Hasil Kesepakatan Workshop Pengembangan Pencegahan dan Pengendalian Kanker Paliatif Penyakit Kanker dan Gangguan	70 %	12,350,664,000	55 %	51,69 %	124,220,400	122,734,400	98,80 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output 2020	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	Kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Darah Bagi Petugas Provinsi dan Kab/Kota; 5) Dokumen Laporan dan Hasil Kesepakatan Workshop Pengembangan Posbindu PTM bagi Lintas Sektor dan Petugas Kesehatan Puskemas; 6) Jumlah Laporan Hasil Peringatan Hari Diabetes Melitus Sedunia; 7) Jumlah Laporan Hasil Peringatan Hari Thalassemia Sedunia; 8) Dokumen Laporan Peringatan Hari Kanker Sedunia; 9) Jumlah Tenaga Pendamping Teknis Program P2PTM; 10) Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Program P2PJPD; 11) Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Program P2PKKD; 12) Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknsi Program P2DMGM; 13) Jumlah Laporan Hasil Konsultasi							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program /	Output	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	Kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Teknis Program P2PTM; 14) Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Program P2PTM; 15) Jumlah Laporan dan Hasil Kesepakatan Pertemuan Evaluasi Program GIF; 16) Jumlah Laporan dan Hasil Kesepakatan Workshop Deteksi Dini GIF bagi Petugas Provinsi dan Kab/Kota; 17) Jumlah Laporan dan Hasil Kesepakatan Workshop Deteksi Dini GIF bagi Pengelola Program GIF di Puskesmas; 18) Jumlah Laporan dan Hasil Kesepakatan Pertemuan Koordinasi GIF di Tingkat Provinsi Jawa Barat; 19) Jumlah Laporan Peringatan Hari Disabilitas Internasional; 20) Jumlah Laporan Peringatan Hari Penglihatan Sedunia; 21) Jumlah Pendamping Teknis GIF; 22) Jumlah Laporan Bimbingan Teknis							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program /	Output	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	Kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Program GIF; 23) Jumlah Laporan Konsultasi Teknis Program GIF							
	Pencegahan dan Pengendalian kesehatan jiwa	Persentasi penduduk mengalami gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan	1) Dokumen Laporan dan Hasil Kesepakatan Peningkatan Kemampuan Teknis Petugas Pengelola Penyalahgunaan Napza Bagi Petugas Provinsi dan Kab/Kota; 2) Dokumen Laporan dan Hasil Kesepakatan Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan Pengendalian Keswa; 3) Dokumen Laporan dan Hasil Kesepakatan Workshop Deteksi Dini Pelaksanaan Gangguan Jiwa Bagi Tenaga Kesehatan di Provinsi dan Kab/Kota; 4) Dokumen Laporan Peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia; 5) Tenaga Teknis Pendamping Program Kesehatan Jiwa; 6) Dokumen Bimbingan Teknis Penanganan Kasus Pasung Pada Gangguan Jiwa;			100 %	74 %	69,961,200	61,870,654	88,44 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program /	Output	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	Kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			7) Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Program IPWL di Kab/Kota; 8) Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Program PTRM; 9) Dokumen Laporan Konsultasi Teknis Program Kesehatan Jiwa; 10) Dokumen Laporan Hasil Bimbingan Teknis Program Kesehatan Jiwa; 11) Dokumen Laporan dan Hasil Kesepakatan Pertemuan Koordinasi Upaya Deteksi Dini Kesehatan Jiwa Anak Sekolah bagi Guru di 27 Kab/Kota; 12) Dokumen Laporan Kegiatan Implementasi Skrining Kesehatan Jiwa Pada Anak Sekolah dengan Kuisisioner SDQ di 14 Kab/Kota							
PROGRAM KESEHATAN AKIBAT BENCANA & KESEHATAN AKIBAT KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) PROVINSI								424,849,220	398,208,400	93,73 %
	Peningkatan sistem kewaspadaan Dini Bencana dan kesehatan matra	Persentase kegiatan Rapid Health Assesment	1) Jumlah Dokumen Hasil kegiatan program bencana kab/kota di Provinsi Jawa Barat; 2) Jumlah petugas kesehatan yang mengikuti pelatihan;	100 %	5,008,527,100	100 %	100 %	137,098,020	128,681,200	93,86 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program /	Output	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	Kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3) Jumlah Dokumen Laporan Gambaran penyakit dan permasalahan kesehatan matra di Provinsi Jawa Barat; 4) Jumlah Dokumen Laporan permasalahan dan kebutuhan layanan kesehatan pada pra bencana dan saat bencana di Jawa Barat; 5) Jumlah kab/kota yang melaporkan hasil pelaksana program haji; 6) Jumlah petugas TGC yang melaporkan kegiatan program bencana bidang kesehatan; 7) Jumlah Kab/kota menyampaikan kesiapan menjelang embarkasi haji; 8) Jumlah tenaga teknis program yang honorariumnya terbayar							
	Surveilans Penyakit dan Penanggulangan KLB	Persentase masyarakat yg dilayani di lokasi bencana	1) Jumlah laporan hasil bimbingan teknis Surveilans dan SKD KLB; 2) Jumlah laporan hasil penyelidikan epidemiologi yang melaporkan kejadian KLB Difteri dan KLB lainnya; 3) Jumlah laporan hasil penyelidikan	100 %	4,948,100,000	100 %	100 %	287,751,200	269,527,200	93,67 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program /	Output	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	Kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>epidemiologi kejadian luar biasa;</p> <p>4) Jumlah laporan hasil bimbingan teknis Surveilans Difteri;</p> <p>5) Jumlah Petugas Surveilans Kab/Kota mengikuti Pertemuan Penguatan Kapasitas/ Refreshing Petugas Tim Gerak Cepat;</p> <p>6) Jumlah spesimen yang terkirim melalui petugas ke Litbangkes;</p> <p>7) Jumlah laporan hasil penyelidikan epidemiologi yang melaporkan kasus AFP/Campak dan Rubela;</p> <p>8) Petugas Surveilans Kab/Kota melaporkan hasil evaluasi dari awal sampai dengan akhir tahun;</p> <p>9) Jumlah petugas Kesehatan Kab kota dan Rumah Sakit mengikuti pertemuan peningkatan sistem pelaporan surveilans puskesmas dan rumah sakit;</p> <p>10) Jumlah Petugas Pengelola Surveilans dinas Kab/Kota mengikuti pertemuan riview penanggulangan KLB tingkat provinsi;</p>							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program /	Output	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	Kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			11) Jumlah Tenaga Teknis Program yang terbayar honorarium;							
			12) Petugas Kab/Kota yang melaksanakan respon terhadap sistem Rumort/Alert							
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN								13,452,628,600	10,623,522,041	78,97 %
	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Persentase Puskesmas siap Akreditasi	1) Jumlah Petugas Tim Pendamping Akreditasi FKTP kab/ kota dan provinsi dapat melaksanakan evaluasi akreditasi FKTP dan mempersiapkan re-akreditasi puskesmas; 2) Jumlah Petugas Tim Pendamping Akreditasi Klinik Pratama kab/ kota dan provinsi mendapatkan informasi standar akreditasi Klinik Pratama; 3) Jumlah Petugas Pendamping Akreditasi FKTP Kab/ Kota/ Provinsi dapat mendapat informasi tentang Audit Internal dan Tinjauan Manajemen di FKTP; 4) Jumlah Petugas Pengelola Program Dinkes Kab/ Kota dan LP/ LS provinsi mendapat sosialisasi tentang akreditasi klinik pratama, akreditasi tempat praktek	100 %	6,148,538,240	100 %	94,92 %	144,510,100	136,831,100	94,69 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program /	Output	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	Kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			mandiri dokter dan dokter gigi;							
			5) Jumlah Petugas Pendamping Akreditasi FKTP Kab/ Kota/ Provinsi dapat mendapat informasi tentang keselamatan pasien;							
			6) Jumlah Peserta Kab/ Kota yang membawahi akreditasi, Mengikuti Pendamping Akreditasi FKTP dan LP/ LS provinsi dan mendapat sosialisasi tata kelola rekam medis di FKTP;							
			7) Jumlah Laporan Hasil pembinaan, monitoring dan evaluasi akreditasi & pasca akreditasi FKTP							
	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Sarana Pelayanan Kesehatan Lain	Persentase Kab/Kota memiliki Laboratorium Kesehatan terakreditasi	1) Jumlah Pengelola Lab Kesehatan dan atau Pendamping Akreditasi Labkes Kab/ Kota/ Provinsi dapat mendapat informasi tentang revisi Standar Akreditasi Laboratorium Kesehatan; 2) Jumlah Laporan Hasil pembinaan, monitoring dan evaluasi akreditasi & pasca akreditasi Sarana Kesehatan Lain serta koordinasi LP/ LS; 3) Jumlah Pengelola Laboratorium Kesehatan dan atau Pendamping	60 %	2,632,784,760	30 %	85,20 %	0	0	0%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program /	Output	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	Kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Akreditasi Labkes Kab/ Kota/ Provinsi dapat mendapat informasi tentang program K3 di Labkes							
	Peningkatan Manajemen dan upaya Pelayanan Kesehatan Primer	Persentase Kab/Kota Puskesmas sesuai standar	1) Jumlah Dokumen Pembinaan dan Penilaian FKTP Berprestasi Tk Provinsi Jawa Barat; 2) Jumlah Jumlah Pengelola Program yankes primer dari 27 Kab/Kota dan provinsi yang mampu bersinergi dalam pelaksanaan kegiatan program yankes; 3) Jumlah Dokumen laporan kegiatan monev PIS-PK rakor LP/LS Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga Tahun 2020; 4) Jumlah Dokumen laporan kegiatan rakor LP/LS Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga; 5) Jumlah Dokumen laporan kegiatan Penguatan quick wins Pelayanan Darah di Provinsi Tahun 2020; 6) Jumlah Dokumen laporan sinergitas program pelayanan kesehatan primer; 7) Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan	100 %	19,694,848,080	86 %	82 %	301,780,700	130,880,548	43,37 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program /	Output	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	Kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			monitoring dan evaluasi program pelayanan kesehatan primer;							
			8) Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan arus mudik dan arus balik							
	Peningkatan Program Pelayanan Kesehatan Tradisional di Provinsi Jawa Barat	Persentase Kabupaten/kota dengan minimal 50 % puskesmas menyelenggarakan kesehatan tradisional	1) Jumlah Dokumen laporan kegiatan rakor Peningkatan Pembinaan Pengawasan Program Kesehatan Tradisional; 2) Jumlah Dokumen validasi dan sinkronisasi data program pelayanan kesehatan tradisional; 3) Jumlah Dokumen laporan kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan tradisional di FKTP dan FKTL; 4) Jumlah dokumen konsolidasi Sentra Penapisan dan Pengembangan Penyehatan Tradisional (SP3T) Pelayanan Kesehatan Tradisional	96 %	3,633,083,170	72 %	75,23 %	213,404,000	62,742,200	29,40 %.
	Peningkatan Program LAYAD RAWAT Jawa Barat	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kerjasama dengan provinsi terkait layad rawat	1. Jumlah dokumen kerjasama 2. Terlaksananya manajemen layad rawat di provinsi dan Kabupaten/kota	100 %	277,433,500,000	48,15 %	100,0 %	12,186,653,000	9,692,954,099	79,53 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program /	Output	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	Kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL)	Persentase RS siap Akreditasi	<p>1) Jumlah Petugas Penanggung Jawab Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dan LP/LS Provinsi mendapat informasi tentang Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1;</p> <p>2) Jumlah Kepala Seksi Mutu/ Kepala Seksi Kab/ Kota yang membawahi akreditasi dan LP/ LS provinsi mendapat informasi tentang kegiatan dan evaluasi kegiatan mutu pelayanan kesehatan;</p> <p>3) Jumlah Laporan Hasil pembinaan, monitoring dan evaluasi akreditasi & pasca akreditasi Rumah Sakit dan koordinasi LP/ LS;</p> <p>4) Jumlah Peserta Kab/ Kota/ Provinsi dapat mendapat informasi tentang tata kelola pelayanan penunjang di RS</p>	100 %	2,137,477,000	70,0 %	86,64 %	4,775,000	4,666,000	97,72 %
	Pengelolaan Fasilitas Kesehatan	Persentase Rekomendasi Izin RS Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<p>1) Dokumen Berita Acara Sertifikat Distribusi Cabang Pedagang Besar Farmasi;</p> <p>2) Dokumen Berita Acara Sertifikat Distribusi Cabang Penyalur Alat Kesehatan;</p> <p>3) Dokumen Berita Acara Sertifikat</p>	100 %	638,981,500	100 %	100%	95,049,000	93,634,500	98,51 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program /	Output	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	Kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Produksi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)							
	Peningkatan pelayanan kesehatan Rujukan	Persentase Kab/Kota yang mempunyai 80% RS dengan pencapaian SPM	1) Jumlah Dokumen Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan; 2) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pertemuan dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kesehatan; 3) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Kesepakatan dan Rencana Tindak Lanjut dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan rujukan; 4) Jumlah Petugas Kab/Kota; 5) Jumlah peserta yang mengikuti Pertemuan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan rujukan;	78 %	12,356,746,000	33 %	-	506,456,800	501,813,594	99,08 %.
	Pendampingan Penguatan Pelayanan Kesehatan RS Regional	Persentase RS Regional yang memenuhi standar	1) Jumlah Dokumen Kegiatan Pendampingan Penguatan Pelayanan Rumah Sakit Regional; 2) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pertemuan dalam rangka Pendampingan Penguatan Pelayanan Rumah Sakit Regional;	88 %	1,933,836,820	50 %	-	0	0	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program /	Output	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	Kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Kesepakatan dan RTL dalam rangka Pendampingan Penguatan Pelayanan Rumah Sakit Regional; 4) Jumlah Petugas Kab/Kota; 5) Jumlah Peserta yang mengikuti Pertemuan dalam rangka Pendampingan Penguatan Pelayanan Rumah Sakit Regional							
PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN								56,839,153,785	47,535,904,156	83,63 %
	Ketersediaan, Pemerataan, Keterjangkauan dan Mutu Sediaan Farmasi Kosalkes dan Mamin	Persentase Ketersediaan Obat Esensial	Dokumen Rencana Kebutuhan Obat (RKO) 27 Kabupaten/ Kota dan Buffer Stok Provinsi	95 %	4,687,694,772	91 %	91,12 %	387,194,560	369,762,840	95,50 %
	Peningkatan, Pengawasan, dan Pengendalian Penggunaan Obat Rasional, Peredaran Sediaan Farmasi Kosalkes dan Mamin	Persentase Rekomendasi Perijinan yang Dikeluarkan (Persentase dokumen BA Cabang distribusi alkes)	1) Dokumen Berita Acara Sertifikat Distribusi Cabang Pedagang Besar Farmasi; 2) Dokumen Berita Acara Sertifikat Distribusi Cabang Penyalur Alat Kesehatan; 3) Dokumen Berita Acara Sertifikat Produksi Usaha Kecil Obat Tradisional	100 %	3,553,455,906	90 %	87,52 %	120,443,987	116,591,900	96,80 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program /	Output	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	Kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(UKOT)							
	Perencanaan, Pengelolaan dan Mutu Nakes	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Melaksanakan Perencanaan dan Pengelolaan Mutu Tenaga Kesehatan	1) Penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK di kab/kota dan RSUD; 2) Koordinasi Kab/ Kota dalam pengelolaan data SDM; 3) Jumlah registrasi tenaga kesehatan difasilitasi; 4) Koordinasi pengelolaan Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi; 5) Bimbingan teknis pengelolaan PIDI di wahana; 6) Koordinasi pengelolaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing; 7) Kab/Kota difasilitasi peningkatan kompetensi tugas belajar; 8) Pengelola tenaga teknis dan tenaga komputer SDM; 9) RSUD yang mengelola Wajib Kerja Dokter Spesialis difasilitasi	90 %	8,000,000,000	75 %	75 %	49,045,848	32,169,866	65,59 %
	Pengelolaan Tenaga Kesehatan Non PNS	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Prioritas Terisi	1) Tenaga kesehatan non PNS Jabar didayagunakan di fasilitas pelayanan	70 %	312,000,000,000	70 %	70 %	56,260,892,390	46,995,802,550	85,53 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Output	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	Kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Provinsi Jawa Barat	Tenaga Kesehatan	kesehatan; 2) Kontrak kerja tenaga kesehatan non PNS Jabar; 3) Tenaga kesehatan non PNS Jabar di evaluasi kinerja ; 4) Evaluasi Pengelolaan Tenaga Kesehatan Non PNS Jabar; 5) Tenaga non PNS Jabar mengikuti pembekalan program; 6) Koordinasi Pengelolaan Tenaga Kesehatan Non PNS Jabar; 7) Monitoring dan evaluasi pengelolaan di Kab/Kota							
	Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Dinas Kesehatan Jawa Barat	Persentase Tenaga Kesehatan Mengikuti Pemilihan Tenaga Kesehatan Puskesmas Teladan	1) Dokumen penyelenggaraan nakes teladan Puskesmas Teladan; 2) Tenaga kesehatan teladan Puskesmas mengikuti pemilihan; 3) Tenaga Kesehatan teladan Puskesmas lolos seleksi; 4) Tenaga Kesehatan teladan Pusk Tk	90 %	8,800,000,000	75 %	0 %	1,375,000	1,375,000	100 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program /	Output	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	Kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			provinsi mengikuti pemilihan di Tk. Pusat; 5) Tenaga Kesehatan teladan Puskesmas tk provinsi mendapat penghargaan;							
	Penguatan Jaminan Kesehatan	Persentase Penduduk Yang Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan	1) Jumlah Dokumen Penguatan Penyelenggaraan JKN dan Pembiayaan di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat; 2) Jumlah Dokumen Pelaksanaan Capacity Buiding agar terpapar pengetahuan terbaru guna peningkatan kapasitas kemampuan dalam melaksanakan pembiayaan dan jaminan kesehatan; 3) Jumlah Dokumen LapanHasil Rapat Koordinasi dan Evlasi JPKMM di 5 UPTD Ruma Sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat; 4) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Recan Aksi Multi Pihak dalam Pencapaian UHC; 5) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Identifikasi Pelaksanaan JKN	95 %	4,073,834,445	90 %	85,51 %	9,967,000	9,967,000	100 %
	Penguatan	Persentase Pembiayaan	1) Jumlah Dokumen Pelaksanaan	40 %	3,331,779,280	40 %	40 %	10,235,000	10,235,000	100 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program /	Output	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	Kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pembiayaan Kesehatan	Kesehatan PBI Ke Kab/Kota	Persiapan Penyusunan PHA/DHA Provinsi Jawa Barat; 2) Jumlah DOKumen Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pembiayaan tingkat Provinsi Jawa Barat di 4 Wilayah;							
PROGRAM MANAJEMEN KESEHATAN										
	Penyusunan Regulasi Bidang Kesehatan	Persentase Draft Regulasi Bidang Kesehatan Yang Diusulkan Oleh Dinas Kesehatan Prov Jawa Barat	1) Jumlah Pertemuan penyusunan Regulasi bidang kesehatan 2) Jumlah UPTD difasilitasi penyusunan regulasi bidang kesehatan 3) Jumlah kaji Banding Regulasi Pembangunan bidang Kesehatan	100	2,747,295,000	100 %	100 %	813,427,550	428,193,915	52,64%
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) DAK Non Fisik	Jumlah Dinas Kesehatan Kab/Kota Dilakukan Pembinaan Pelaksanaan BOK Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	1). Jumlah Dokumen Laporan dan Kesepakatan 27 Kabupaten/Kota dalam Pembinaan PIS-PK di masing-masing-masing Daerahnya ; 2). Jumlah Dokumen Laporan	27	18,116,250,000	27	27	26.390,774,823	19,643,759,048	74,43

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program /	Output	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	Kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Hasil Pertemuan Perencanaan BOK Tahun 2021 terdiri dari Puskesmas dan Dinkes Kab/Kota; 3). Jumlah Dokumen Kesepakatan Penggunaan Data PISPK dalam intervensi dan perencanaan kegiatan; 4). Jumlah Dokumen Laporan Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut pelaksanaan BOK di 5 Wilayah.							
UPTD										
1. LABKES										
a. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN								133,573,953,215	98,259,573,867	73,56 %
	Peningkatan Mutu dan Akreditasi Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Jumlah Penambahan Parameter Pemeriksaan yang diakreditasi	Terpeliharanya akreditasi lab medik, lab penguji dan penyelenggara UP oleh KAN serta bertambahnya parameter pemeriksaan yang terakreditasi	76 %	1,903,720,000	70	75	223,960,000	173,517,807	77,48 %
	Pelayanan	Persentase Kepuasan Pelanggan	Seluruh Tenaga Pranata Labkes, Dokter,	75	400,000	60	70	8,586,683,241	7,914,834,378	94,33 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program /	Output	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	Kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat (BLUD)		dan Radiografer mempunyai STR dan SIP							
	Pengembangan Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Jumlah Penambahan Parameter Pemeriksaan Baru	'1) Jumlah Pengadaan Reagen	247	30,890,000,000	241	241	124,763,309,974	89,986,597,682	72,13 %
b. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM KESEHATAN								249,010,381	124,321,600	49,93 %.
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Jumlah Penambahan Pengunjung		24000	7,000,000,000			0	0	0
c. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN LABORATORIUM KESEHATAN										
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi di Laboratorium Kesehatan		100 %	2,441,800,000			5,773,309,790	4,506,430,793	78,06 %.
2. UPELKES										
PROGRAM PENINGKATAN MUTU UNIT PELATIHAN KESEHATAN								752,398,350	350,048,250	78,63%
	Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga	Persentase Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan	Jumlah peserta pelatihan; Bimtek Laboratorium Lapangan; Desiminasi	16,63	10,054,525,576	1,00 %	0,93 %	573,465,000	182,340,000	31,80 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program /	Output	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	Kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
	Kesehatan	melalui Pelatihan	Informasi Pelatihan Kesehatan dengan Fasyankes Swasta Kabupaten/Kota; Pertemuan Konsolidasi Pelatihan dengan Kabupaten/Kota; Pertemuan Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan Kesehatan dengan Kabupaten/Kota; Perjalanan dinas Konsultasi Pelatihan ke Pusat							
	Peningkatan Kapasitas UPTD Pelatihan Kesehatan sebagai Pusat Pelatihan Kesehatan	Nilai Komponen yang Sesuai dengan Pembobotan	Penilaian akreditasi institusi; Persentase pelatihan yang terakreditasi dalam satu tahun; Jumlah Review dan Penyusunan Kurikulum dan Modul; Evaluasi Pasca Pelatihan, Jumlah Tenaga Kerja Non PNS	≥ 3,5	2,732,886,964	≥ 3,5	3,64	178,933,350	167,708,250	93,73%
b. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA UNIT PELATIHAN KESEHATAN				80 %	65,020,414,187	65%	33,48 %	173,100,000	136,100,000	78.63
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pelatihan Kesehatan	Persentase Peningkatan Sarana dan PRASARANA UPTD PELATIHAN KESEHATAN	Penyediaan alat tulis kantor pengadaan; Penyediaan belanja cetak dokumen pengadaan; Jasa konsultasi perencanaan; Jasa konsultasi pengawasan; Pengadaan mesin penghancur kertas; Pengadaan visual elektronik; Pengadaan almari; Pengadaan AC; Pengadaan Nama OPD dan papan petunjuk; Pengadaan water heater; Pengadaan setrika uap; Pengadaan komputer; Pengadaan Laptop; Pengadaan printer; Pengadaan Stabilizer; Pengadaan sarpras internet 1 paket; Pengadaan mebelair meja kerja;	80 %	65,020,414,187	65%	33,48 %	173,100,000	136,100,000	78.63

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program /	Output	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	Kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pengadaan mebelair meja rapat; Pengadaan mebelair kursi kerja; Pengadaan mebelair kursi rapat; Pengadaan mebelair sofa; Pengadaan kulkas; Pengadaan CCTV; Pengadaan projector; Pengadaan soundsystem; Pengadaan handy talky; Pengadaan Interior Gedung; Pengadaan buku perpustakaan; Pengadaan software.							
c. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN UNIT PELATIHAN KESEHATAN										
	Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur UPTD Pelatihan Kesehatan	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi di Upelkes	Instruktur Senam; Penceramah Rohani; Capacity Building; Pakaian Dinas dan Atributnya; Pakaian Dinas Pegawai Non PNS; Perjalanan dinas dalam daerah PNS Provinsi; Perjalanan dinas luar provinsi PNS Provinsi; Kursus/pelatihan/bimtek/sosialisasi	100 %	1,358,653,115	100 %	50%	173,100,000	136,100,000	78,63 %
3. RS AL-IHSAN										
a. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT AL-IHSAN										
	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Jawa Barat RSUD Al Ihsan	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Di RS AL IHSAN	Prosentase pencapaian kinerja atas pelaksanaan operasional pelayanan kesehatan	80,91 %	1,230,309,698,187	62%	80,45 %	341,963,621,724	303,327,838,515	88.70%.

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program /	Output	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	Kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
b. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT AL-IHSAN										
	Kegiatan Pembangunan Gedung Utama Pelayanan, Perawatan, Perkantoran dan Perparkiran Lanjutan RSUD	PERSENTASE BOR (Bed Occupancy Ratio) di RS AL-IHSAN	Persentase pembangunan gedung perawatan, pelayanan, perkantoran yang selesai	80 %	405,901,746,000	67%	80,29 %	52,654,490,773	30,284,534,400	57.52 %
c. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN RUMAH SAKIT AL-IHSAN										
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi di RS Al Ihsan	1. Persentase dokumen penyusunan perencanaan program kegiatan dan dokumen laporan keuangan 2. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur yang terlaksana dalam menunjang pelayanan	100 %	4,673,770,000	100%	50%	214,695,550	105,676,510	49.22 %
4. RS JIWA										
a. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT JIWA										
		Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Di RS JIWA		90 %	9,234,921,696	70 %	88,86 %	7,110,889,700	5,404,276,172	76,72%
b. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT JIWA										

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program /	Output	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	Kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kegiatan Penyediaan Saprass Pelayanan Medis RS Jiwa	PERSENTASE BOR (Bed Occupancy Ratio) di RS JIWA	Belanja Modal Pengadaan Alat kesehatan dan Alat Kedokteran 43 Jenis Alat, Belanja alat terapi keswara 14 Jenis Alat, Belanja alat rehabilitasi medik 19 Jenis Alat, Operasional Pendukung pelayanan 1 keg	70 %	7,184,241,476	50 %	47,65 %	1,543,821,630	898,232,822	58,18
c. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN RUMAH SAKIT JIWA										
	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Pelaporan RS Jiwa	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi di RS Jiwa	Dokumen Rencana Kerja Tahunan dan RBA 2 Dokumen, Dokumen RKA dan DPA 3 Dokumen, Dokumen PK dan Casecade 2 Dokumen, Dokumen Casecade 12 Dokumen, AKIP 1 Dokumen, Dokumen Kinerja Pelayanan 12 Dokumen.	100 %	1,830,160,532	100%	50%	13,696,964,149	10,604,119,517	61,61%
5. RS PARU										
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT PARU										
		Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Di RS PARU		61 %	28,809,966,900	70 %	77,09 %	14,792,957,090	1,309,610,078	87,94 %
b. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT PARU										
		Jumlah Hari Perawatan di Bagi Tempat Tidur dikali Pasien di Kali 100%		61%	28,809,966,300	50%	50%	8,841,891,520	8,390,211,779	94,89 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program /	Output	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	Kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
c. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN RUMAH SAKIT PARU										
	Peningkatan pengelolaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja RS Paru	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi di RS Paru	Prosentase laporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	1,221,020,000	100%	76%	15,564,140,901	12,111,608,867	77,82
6. RS JAMPANGKULON										
a. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT JAMPANGKULON										
	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD RS Jampangkulon	PERSENTASE INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) di RSUD JAMPANGKULON	Biaya Operasional (Biaya Pelayanan, Biaya Umum Dan Administrasi), Biaya Non Operasional, Biaya Pengeluaran Investasi	77,12 %	237,000,000,000	76,15%	81,04 %	75,509,182,334	71,432,348,661	94,60
b. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT JAMPANGKULON										
	PERSENTASE BOR (Bed Occupancy Ratio) RSUD JAMPANGKULON	Pembangunan Rawat Jalan Baru RSUD Jampangkulon	Gedung Rawat Inap	75 %	98,004,742,045	58 %	61,52 %	143,720,946,759	107,251,448,508	74,62
c. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN RUMAH SAKIT JAMPANGKULON										
	Pengembangan Kompetensi Pegawai RSUD Jampangkulon	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi di RS Jampangkulon	Terlatihnya Kinerja dan Kemampuan Aparatur RS Jampangkulon	100	13,950,000,000	100%	100%	30,869,514,873	28,335,035,385	91,79 %

Kategori	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program /	Output	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	Kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. RS PAMEUNGPEUK										
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT PAMEUNGPEUK				86.92	600,000,000	81,91%	82,78 %	41,201,635,542	32,967,801,788	80,02
	Promosi Kesehatan di RSUD Pameungpeuk	PERSENTASE INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) di RSUD PAMEUNGPEUK	Terselenggaranya Promosi Kesehatan kepada Pasien, Karyawan, Keluarga Pasien, Mitra Kerja dan Seluruh Pengunjung Rumah Sakit melalui Media Cetak, Elektronik dan Penyuluhan	86.92	600,000,000	81,91%	82,78 %	41,201,635,542	32,967,801,788	80,02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT PAMEUNGPEUK				70 %	32,000,000,000	62 %	63,59 %	71.659.559.103	54.084.907.369	75.47 %
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di RSUD Pameungpeuk	PERSENTASE BOR (Bed Occupancy Ratio) di RS PAMENGPEUK	Terselenggaranya pengadaan sarana dan prasarana pelayanan dan perkantoran serta Pengadaan Lahan di RSUD Pameungpeuk	70 %	32,000,000,000	62 %	63,59 %	71.659.559.103	54.084.907.369	75.47 %
c. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN RUMAH SAKIT PAMEUNGPEUK										
	Peningkatan Kompetensi PNS RSUD Pameungpeuk	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi di RS Pameungpeuk	Terselenggaranya Pelatihan dan Bimtek PNS	100 %	1,163,060,766	50%	50%	13,572,099,021	9,982,263,697	72,55
8. RS KESEHATAN KERJA										
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT KESEHATAN KERJA										
	Peningkatan Pelayanan Prima dan Komprehensif	PERSENTASE INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) di RS KESEHATAN	Hasil survey kepuasan pelanggan	70 %	131,400,000,000	62 %	81,3 %	7,349,574	3,179,120	43.26

Kategori	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program /	Output	Target Capaian Program Renstra 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 terhadap renstra		Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020		
				Target Kinerja	Target Anggaran	Kinerja	Keuangan	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		KERJA								
b. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT KESEHATAN KERJA										
	Penataan RSUD Kesehatan Kerja	PERSENTASE BOR (Bed Occupancy Ratio) di RS KESEHATAN KERJA	Jumlah Pohon yang ditanam di RSUD Kesehatan Kerja	80 %	239,000,000,000	67 %	1,91 %	195,909,827,918	98,289,784,343	50,17%
c. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN RUMAH SAKIT KESEHATAN KERJA										
	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi di RS Kesehatan Kerja	Jumlah pekerjaan pemeliharaan yang dilaksanakan	100 %	10,000,000,000	100%	100%	17,568,263,592	13,463,861,663	76,64

Berdasarkan tabel di atas capaian indikator kinerja outcome tahun 2020 untuk setiap program adalah sebagai berikut :

1. Program Kesehatan Masyarakat

Program Kesehatan Masyarakat mempunyai outcome meningkatnya pembinaan dan pengendalian teknis kesehatan masyarakat, dengan indikator outcome :

a) Persentase Kab/Kota dengan cakupan Persalinan di fasilitas Pelayanan Kesehatan minimal 88%.

Realisasi Persentase Kabupaten/Kota Dengan Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan tahun 2020 belum mencapai target yaitu 56% (15 kabkota) dari target 70% (19 kab/kota). Dibandingkan dengan tahun 2019, menurun pencapaian sebesar 89% (24 kab/kota). Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan terutama terkait pelayanan ANC tertunda sehingga persalinan di faskes tidak terpantau selama pandemi covid19.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah, tidak tersedia seluruh kab/kota memiliki fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk rujukan ibu bersalin dengan status reaktif Covid 19, Kualitas layanan antenatal, perbedaan sasaran estimasi dan sasaran riil, Pandemi Covid-19, dan refocusing anggaran.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah penyesuaian pelaksanaan program selama Pandemi Covid-19, pembuatan pedoman pelayanan kesga selama Pandemi Covid-19, pelaksanaan kegiatan untuk akselerasi dengan sifat non budgeting, supervisi fasilitatif berjenjang terkait kualitas layanan antenatal, koordinasi dan kolaborasi dengan stake holder terkait

b). Persentase Kabupaten/Kota Dengan Cakupan Pemberian Tablet Tambah Darah Pada Bumil Minimal 95%.

Capaian Kabupaten/Kota dengan Cakupan Pemberian Tablet Tambah Darah pada Bumil Minimal 95% tahun 2020 menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan laporan dari kabupaten kota belum lengkap, masih dalam proses pengumpulan dan validasi sampai 31 Januari 2020.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah logistik tablet tambah darah tidak dipenuhi 100%, pelayanan pemberian tablet tambah darah terkendala pandemik covid 19, capaian yang ada baru sebatas distribusi belum ada data konsumsi dan pemantauan minum obat TTD bagi ibu hamil.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah pembinaan ke kabupaten kota secara daring dan luring, penyusunan protokol kesehatan pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil semasa pandemi, pertemuan sosialisasi pelayanan gizi semasa pandemik, evaluasi progam yang sudah dilakukan.

c). Persentase Penduduk yang menggunakan air minum yang berkualitas

Tahun 2019 realisasi tidak mencapai target, tetapi pada tahun 2020 dengan target yang sama tahun 2020 (yaitu 80%, disamakan targetnya dengan tahun 2019 mengingat pandemi Covid-19), realisasi tercapai sebesar 80,29%. Hal ini karena petugas Kabupaten/Kota walaupun sedang pandemi Covid-19 tapi tetap melaksanakan pembinaan teknis sampai ke Desa/Kelurahan, disamping pendataan lebih dipertajam lagi. Selain itu kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator dilaksanakan di awal tahun, sehingga progres pencapaiannya lebih cepat.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah masih kurangnya koordinasi dan advokasi dengan lintas sektor terkait (dengan anggota Pokja Air Minum dan Sanitasi), terjadinya kondisi pandemi Covid-19, sehingga pelaksanaan kegiatan sempat dihentikan beberapa bulan, dan efisiensi anggaran, yaitu dengan merefocusing anggaran dengan memfokuskan pada upaya pengendalian dan pencegahan Covid-19.

Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah melakukan koordinasi melalui virtual meeting dengan Kabupaten/Kota dan lintas sektor (Pokja Air Minum dan Sanitasi), dan melakukan percepatan kegiatan di awal tahun 2020 dan melakukan kegiatan menjelang akhir tahun 2020 untuk mengejar ketertinggalan program.

d) Persentase Penduduk menggunakan Jamban Sehat

Tahun 2020 target persentase penduduk menggunakan jamban sehat pada masa pandemi Covid-19 dikhawatirkan ada penurunan capaian, ternyata pada tahun 2020 capaian (realisasi) melebihi target, hal ini karena petugas Kab/Kota lebih banyak melakukan pemecuan dan pendataan walaupun dengan kondisi terbatas karena pandemi Covid-19. Selain itu kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator dilaksanakan di awal tahun, sehingga progres pencapaiannya lebih cepat.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah koordinasi dengan lintas sektor yang masih kurang terutama dalam berkolaborasi dan bersinergi terkait lokasi desa sasaran yang penerima bantuan (dengan Dinas Permukiman dan Perumahan Kab/Kota), Terjadinya kondisi pandemi Covid-19, sehingga pelaksanaan kegiatan sempat dihentikan beberapa bulan, dan efisiensi anggaran, yaitu dengan merefocusing anggaran dengan memfokuskan pada upaya pengendalian dan pencegahan Covid-19.

Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah lebih meningkatkan lagi koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait, dan melakukan percepatan kegiatan di awal tahun 2020 dan melakukan kegiatan menjelang akhir tahun 2020 untuk mengejar ketertinggalan program.

e) Persentase Puskesmas di Kab/Kota menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar

Indikator outcome presentase puskesmas di kabupaten/kota menyelenggarakan kesehatan kerja pada tahun 2019 dengan target 55% diperoleh realisasi 57%, pencapaian target di tahun 2019 ini merupakan upaya terintegrasi program kesehatan kerja dalam pelaksanaan kegiatan, dampak positif dalam hal ini adalah kemajuan pesat pelaksanaan kesehatan kerja. Pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja sebagai needs dari semua aspek pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu puskesmas di Kabupaten/Kota mengharuskan pelayanan kesehatan kerja internal melalui pelaksanaan K3 puskesmas yang tercantum pada penilaian akreditasi puskesmas, yang menjadikan hak asasi dari setiap pekerja, lingkungan, pasien dan masyarakat untuk selamat, sehat, aman dan nyaman ketika mendapatkan pelayanan di puskesmas. Pelaksanaan kesehatan kerja eksternal melalui upaya penggerakan dan pemberdayaan kesehatan kerja di sektor nonformal, yang menduduki 60% dari seluruh jenis pekerjaan pada penduduk di Jawa Barat. Sehingga komitmen pelaksanaan program kesehatan kerja memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai produktifitas masyarakat pekerja.

Berdasarkan hasil realisasi tahun 2020 untuk indikator outcome presentase puskesmas di kabupaten/kota menyelenggarakan kesehatan kerja didapatkan sebesar 79,91%, dari target 60%, hal ini merupakan keberhasilan yang sangat signifikan dalam pencapaian indikator presentase puskesmas di kab/kota dalam menyelenggarakan kesehatan kerja. Dalam kondisi pandemi Covid-19 sejak bulan maret 2020, kegiatan – kegiatan di fokuskan dalam upaya pengendalian pencegahan Covid-19. Sehingga menjadi tantangan dalam pencapaian indikator outcome. Puskesmas kab / kota dalam melaksanakan kegiatan kesehatan kerja yang mendukung pencapaian indikator dilaksanakan di awal tahun, dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dan sosialisasi dari indikator outcome, yang secara sinergisitas di lakukan juga dengan dukungan kab/kota, sehingga kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan tingkat puskesmas sesuai dengan pencapaian tujuan indikator outcome.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah terjadinya kondisi pandemic Covid-19, dimana seluruh pelaksanaan kegiatan sempat dihentikan pada pertengahan bulan maret sampai dengan bulan mei, penetapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di beberapa wilayah atau Kab/ Kota yang merupakan menjadi target percepatan pencapaian indikator outcome dari kesehatan kerja sempat stagnan di beberapa bulan, awal penetapan pandemic. Selain itu adalah efisiensi anggaran, yaitu dengan merefocusing anggaran dengan memfokuskan pada upaya pengendalian dan pencegahan Covid-19.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah melakukan upaya percepatan diawal tahun 2020, dengan melaksanakan kegiatan koordinasi dan peningkatan kapasitas melalui orientasi kesehatan kerja untuk Kepala Seksi yang

bertanggung jawab pada program kesehatan kerja dan petugas atau pengelola kesehatan kerja. Hal ini sangat efektif dalam percepatan capaian indikator outcome kesehatan kerja. Kedua adalah, kondisi pandemik Covid-19 menjadikan concern pada puskesmas maupun fasyankes untuk melaksanakan pelayanan yang safety, dimana peningkatan capaian penggunaan APD (Alat Pelindung Diri), kepatuhan terhadap SOP (Standar Operasional Prosedur), dan sebagainya, pandemi Covid-19 juga membawa dampak kreatifitas dalam pelaksanaan program program kesehatan kerja, yaitu dimana kegiatan dapat tetap dilaksanakan secara daring, yang dapat diikuti oleh banyak target sasaran pencapaian program kesehatan kerja.

f) Persentase Puskesmas di Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kesehatan Olah Raga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya

Berdasarkan hasil realisasi tahun 2020 untuk indikator outcome presentase puskesmas di kabupaten / kota yang menyelenggarakan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya didapatkan sebesar 86%, dari target 60%, hal ini merupakan keberhasilan yang sangat signifikan dalam pencapaian indikator presentase puskesmas di kab / kota dalam pelaksanaan kesehatan olahraga.

Berdasarkan penyebab keberhasilan dari indikator outcome presentase puskesmas di kabupaten / kota yang menyelenggarakan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya adalah fokus pembuatan perencanaan kegiatan – kegiatan pada tahun 2020 dalam pencapaian target outcome, kegiatan yang langsung pada sasaran capaian yaitu:

1. Seluruh masyarakat dalam upaya perubahan perilaku untuk melakukan aktivitas fisik, bergerak dan olahraga sesuai dengan BBTT (Baik, Benar, Terukur, dan Teratur), pembinaan kelpompok – kelompok Olahraga di masyarakat.
2. Pembinaan kebugaran CJH (Calon Jemaah Haji), meskipun pada situasi pandemi Covid-19, Jemaah Haji dibatalkan keberangkatannya untuk tahun 2020, akan tetapi pelaksanaan pengukuran kebugaran CJH diawal tahun tetap dilaksanakan (januari s.d maret 2020), dan pelaksanaan di akhir tahun 2020 pada bulan november s.d desember tetap dilaksanakan, dengan metode pengukuran kebugaran secara mandiri melalui aplikasi SIPGAR
3. Pembinaan kebugaran anak sekolah, dengan melalui daring, pembinaan kepada guru – guru olahraga di beberapa kabupaten kota tetap dilaksanakan, penyampaian informasi dan edukasi kepada orang tua murid, untuk tetap melakukan aktivitas fisik dan bergerak untuk siswa – siswa meskipun dilaksanakan dirumah masing – masing.
4. Pembinaan kebugaran di OPD, dengan melakukan sosialisasi SIPGAR, sehingga kondisi pandemi Covid-19 tidak menghalangi untuk pengukuran kebugaran.

Indikator outcome presentase puskesmas di kabupaten/kota yang menyelenggarakan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya pada

tahun 2019 dengan target 55% diperoleh realisasi 57%, sedangkan pada tahun 2020 dengan target 60% didapatkan realisasi sebesar 86%. Pencapaian realisasi di tahun 2020 yang sangat signifikan, hal ini disebabkan antara lain adalah proses tahapan pelaksanaan kegiatan yang simultan dan berkelanjutan dari tahun 2019, yaitu kegiatan yang spesifik dan measurable dalam pencapaian indikator outcome, yaitu:

1. Pelaksanaan kegiatan yang dimulai dari tahap koordinasi dengan lintas program, lintas sektor dan dukungan dari pusat baik pemberian stimulant kit kebugaran untuk kabupaten/kota, anggaran dana dekonsentrasi, dsbnya.
2. Pelaksanaan kegiatan bertujuan peningkatan skill, kapasitas, pembekalan ataupun orientasi bagi petugas kesehatan olahraga di kabupaten/kota dan puskesmas. Kegiatan orientasi ini tidak hanya dilaksanakan oleh dinkes provinsi akan tetapi juga oleh BKOM (Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat), dan kabupaten/kota dengan menggunakan anggaran BOK ataupun APBD
3. Pelaksanaan kegiatan dengan pembinaan secara terintegrasi melalui tahap monitoring, pemantauan, dan evaluasi kegiatan.
4. Pelaksanaan kegiatan dengan memberikan umpan balik dari setiap selesai kegiatan, tujuannya adalah kabupaten / kota mengetahui dan memahami apa yang menjadi tahapan lanjutan untuk pencapaian indikator outcome kesehatan olahraga.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah dengan terjadinya kondisi pandemi Covid-19, dimana sama halnya dengan program kesehatan kerja, program kesehatan olahraga terkena dampak dalam proses pencapaian indikator outcome. Pada awal pandemi Covid-19, Masyarakat di Jawa Barat terhenti keseluruhan dalam kegiatan olahraga. Pada kondisi normal sebelum pandemi Covid-19, masyarakat banyak yang sudah memiliki kebiasaan berolahraga baik olahraga berkelompok maupun individu. Penurunan aktivitas fisik dan berolahraga berdampak pada stagnannya laporan pembinaan kelompok olahraga, yang merupakan subouput dalam pencapaian indikator outcome. Selain itu refocusing anggaran yang hanya terfokus pada pengendalian dan pencegahan penularan Covid-19. Seluruh petugas di puskesmas dan kabupaten /kota terfokus pada pengendalian Covid-19.

Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah kegiatan yang harus terintegrasi dalam rangka pengendalian Covid-19, yaitu bagaimana kesehatan olahraga sangat berperan dalam peningkatan imunitas pada masa pandemi Covid-19. Dengan protokol kesehatan olahraga secara individu dapat dilakukan, kegiatan olahraga di masyarakat dapat dilakukan dan pembinaan-pembinaan kebugaran dapat dilaksanakan. Diawal tahun 2020, petugas kesehatan olahraga kabupaten/kota mendapatkan orientasi pelaporan SITKO (Sistem Informasi Terpadu Kesehatan Kerja dan Olahraga), hal ini menjadi sangat penting bahwa setiap kegiatan-kegiatan kesehatan olahraga yang kabupaten/kota

maupun puskesmas laksanakan bisa dilaporkan. Kegiatan ini signifikan membantu dalam pencapaian indikator outcome.

Pada tahun 2020, dalam upaya pencapaian indikator outcome kesehatan olahraga adalah dengan melibatkan pelaksanaan kegiatan kesehatan olahraga secara terintegrasi, seperti halnya dalam pelaksanaan orientasi K3 perkantoran, dimasukkan juga perihal pengukuran kebugaran pekerja, yaitu sebagai indikator produktivitas pekerja, asumsinya adalah ketika pekerja itu bugar maka produktivitasnya akan meningkat, Upaya lain yang dilakukan di tahun 2020 dalam rangka pencapaian indikator outcome kesehatan olahraga adalah pelaksanaan kegiatan-kegiatan daring yang bersifat up to date dengan melakukan survey -survey secara online, sehingga petugas kesehatan olahraga di kabupaten/kota dan puskesmas mengetahui kondisi dan status pelaksanaan kesehatan olahraga di wilayah kerjanya.

g) Jumlah Unsur Masyarakat Tingkat Provinsi Yang Dilibatkan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Kegiatan Pemberdayaan masyarakat tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal, dikarenakan kegiatan harus dilaksanakan secara tatap muka, sedangkan dimasa pandemi semua kegiatan dilaksanakan secara online.

Pembinaan melalui tokoh masyarakat yang sudah tergabung dengan Forum Komunikasi (Forkom) Kesehatan tingkat Provinsi Jawa Barat. Berkolaborasi dan kerjasama dengan lintas sektor terkait, Organisasi Masyarakat (Ormas) keagamaan. Melibatkan dalam kegiatan Bidang Kesehatan melalui kegiatan Gerakan Masyarakat (GEMA) 3 M (Memakai Masker, Menjaga Jarak dan Mencuci Tangan Pakai Sabun).

2. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit mempunyai outcome Meningkatnya Pembinaan Dan Pengendalian Teknis Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, dengan indikator outcome :

a) Persentase Keberhasilan Pengobatan TB (Treatment Succes Rate)

Persentase keberhasilan pengobatan TB Tahun 2020 realisasi indikatornya sebesar 73,16% dari target tahun 2020 sebesar 89% atau sebesar 82,20% dari target yang ditentukan, tidak mencapai target yang diharapkan karena dampak dari adanya pandemi Covid-19 dimana jumlah pasien yang di obati sebanyak 111.256 kasus, jumlah pasien sembuh sebanyak 26.730 kasus dan jumlah pasien pengobatan lengkap sebanyak 54.664 kasus.

Permasalahan yang dihadapi selama Pandemi Covid-19 beberapa fasilitas kesehatan TCM TBC digunakan untuk pemeriksaan covid-19, tenaga pengelola/petugas TBC di kabupaten/kota maupun di fasilitas kesehatan merangkap menjadi petugas COVID-19

sehingga menyebabkan angka keberhasilan pengobatan rendah karena masih banyak hasil akhir pengobatan yang belum dievaluasi, adanya pergantian sistem Pencatatan dan Pelaporan TBC dari SITT/eTB Manager ke SITB, dan terkendalanya pemantauan minum obat (PMO) terhadap pasien oleh petugas.

Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat ialah melaksanakan virtual meeting "Penguatan Jejaring Laboratorium TB di masa pandemi COVID-19" dengan mengundang Kab/Kota dan narasumber Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan PATELKI pada 29 Juni 2020, memberikan intruksi kepada Kab/Kota untuk kembali mengatur jejaring fasilitas kesehatan TCM dalam penggunaan alat TCM TBC untuk pemeriksaan Covid-19 oleh Kabupaten/Kota, melaksanakan On the Job Training (OJT) SITB secara bertahap oleh Kab/Kota di wilayah masing-masing, mendorong petugas TBC di Kab/Kota maupun di faskes untuk menyelesaikan pencatatan pelaporan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan beberapa faskes memberlakukan Pemantauan Minum Obat (PMO) dilakukan oleh keluarga pasien atau media elektronik/video call.

b) Persentase Pasien HIV yang di obati

Jumlah ODHA on ARV atau persentase pasien yang diobati di tahun 2019 hanya 40% dikarenakan belum semua faskes terdapat pengobatan ARV sedangkan di Tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 2% pada pasien HIV yang diobati.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini pada masa Pandemi Covid 19 ini ialah tidak semua pasien mau datang ke Fasyankes, adanya pembatasan ODHA yang datang ke layanan Fasilitas Kesehatan, dan adanya keterlambatan stok ARV karena terjadi Pembatasan Sosial Bersekala besar di kab/Kota.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah pemantauan logistic ke Kab/Kota, Bimbingan Teknis Pelayanan Perawatan 2 Dukungan pada ODHA, Validasi Data ODHA, dan Pelatihan Layanan PDP pada 190 Layanan.

c) Persentase Desa/Kelurahan yang mencapai UCI > 90%

Pada Tahun 2019, capaian UCI Desa Provinsi Jawa Barat mencapai 93.8% yang berarti telah melebihi 90%. Namun pada tahun 2020 capaian UCI Desa Provinsi Jawa Barat, data s.d Triwulan 3 baru mencapai 44.8%, belum mencapai target 2020 sebesar 90.5%. Hal ini sangat jauh dari pencapaian tahun 2019, karena mulai bulan Maret 2020 pelayanan imunisasi di Provinsi Jawa Barat sempat terganggu karena adanya Pandemi Covid-19. Pelayanan imunisasi sempat terhenti karena adanya surat edaran dari pemerintah daerah setempat untuk tidak membuka Posyandu dan Puskesmas hanya untuk pelayanan orang sakit.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah ada surat edaran dari pemerintah daerah setempat untuk menghentikan posyandu dan pelayanan

imunisasi di puskesmas karena adanya Pandemi Covid-19 (sekitar bulan April-Mei), Petugas Imunisasi baik Pengelola Program Imunisasi di Kabupaten/Kota dan Koordinator Imunisasi di Puskesmas terlibat dalam kegiatan penanggulangan Covid-19 seperti ikut dalam tracing kontak dan pemegang data Covid-19 sehingga mengganggu kegiatan imunisasi, orang tua khawatir membawa anaknya imunisasi karena takut tertular Covid-19, sempat kekurangan APD (Alat Pelindung Diri) untuk pelayanan imunisasi.

Pada triwulan 4, sudah mulai disibukkan dengan persiapan imunisasi Covid-19 sehingga pekerjaan menjadi bertambah dan harus membagi waktu dengan kegiatan imunisasi rutin. Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah melakukan pengajuan APD (Alat Pelindung Diri) Petugas Imunisasi ke Gugus Tugas Provinsi, melakukan pengajuan APD (Alat Pelindung Diri) ke Pusat, melakukan koordinasi dengan pengelola program imunisasi Kab/Kota melalui zoom meeting, Membuat surat edaran mengenai petunjuk teknis pelayanan imunisasi selama masa Pandemi Covid-19, membagikan dan sosialisasi buku petunjuk teknis pelacakan anak yang belum diimunisasi (Default Tracking) kepada Kab/Kota, dan berkoordinasi dengan lintas sector seperti gugus tugas, TP PKK dll untuk mendukung kegiatan imunisasi.

d). Persentase Kab/Kota yang 50 % Puskesmas melaksanakan tatalaksana pneumonia balita sesuai standar

Adanya penurunan ini dampak dari adanya Pandemi Covid-19 sehingga pelayanan menurun karena ada anjuran untuk membatasi berpergian ke tempat umum termasuk ke Rumah Sakit apabila kondisi masih memungkinkan untuk pemulihan di rumah, untuk realisasi 44,44% masih belum final dikarenakan masih menunggu laporan dari kabupaten kota.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah melakukan koordinasi dengan Kab/Kota untuk tepat menjalankan pelayanan di Puskesmas secara optimal, pemberian/pendistribusian logistic berupa rapid test antibody ke 27 Kab/Kota, pendistribusian vitamin dan multivitamin ke 27 Kab/Kota dan RS yang ada di wilayah masing-masing, dan pembentukan RS SIBI di Kota Sukabumi tepatnya di RS R Syamsudin.

e) Persentase Kab/Kota yang melakukan deteksi dini hepatitis B pada Ibu Hamil

Dampak dari Pandemi Covid-19 sehingga pelayanan menurun karena ada anjuran untuk membatasi berpergian ke tempat umum termasuk ke Rumah Sakit apabila kondisi masih memungkinkan untuk pemulihan di rumah.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah melakukan koordinasi dengan Kab/Kota untuk tetap melaksanakan pelayanan DDHB di Puskesmas secara optimal, pemberian/ pendistribusian logistic berupa rapid test HbsAg dan HbIg ke 27 kab/kota, monitoring pelaksanaan pengendalian HPISP ke 6 kab/kota, Pelatihan

SIHEPI di Kabupaten Purwakarta, Pertemuan Validasi Data HPISP untuk 27 kab/kota secara daring, dan Pertemuan Kegiatan Manajemen Zinc pada Balita Diare di Lokus Stunting di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Kuningan.

f) Persentase kab/kota yang mencapai IR DBD < 49/100.000 pddk

Tahun 2019 realisasi 55,55% (sebanyak 15 kabupaten/kota dengan Incidence Rate kurang dari 49/100.000 penduduk), hal ini tahun 2019 data kasus di semua kabupaten/kota meningkat dibandingkan data tahun sebelumnya. dan kemudian pada tahun 2020 kasus DBD jumlahnya hampir di semua kabupaten/kota sama dengan tahun 2019, namun setelah di jumlah masih di bawah tahun lalu. Untuk target tahun 2020 ada peningkatan kasus DBD di setiap Kabupaten/Kota, sehingga pencapaian tahun 2020 tidak sesuai target yaitu sebanyak 15 Kabupaten/Kota mencapai Incidence Rate kurang dari 49/100.000 penduduk. Justifikasi sebagai target adalah $IR \leq 49/100.000$ penduduk adalah Target global untuk pengendalian DBD adalah penurunan angka kasus 25 % pada tahun 2020.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik belum optimal, Kurangnya Sumber daya manusia seperti tenaga kesehatan di setiap fasilitas pelayanan kesehatan untuk program DBD, belum terbangun dengan baik jejaring kerja antara lintas sektor dan lintas program untuk pencegahan dan pengendalian DBD, dan masih belum kuatnya komitmen pemerintah daerah setempat dalam penganggaran program pencegahan dan penanggulangan DBD.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah pemantauan dalam rangka Peningkatan Tatalaksana dan penanggulangan kasus DBD, Pemantauan Wilayah Bebas Jentik dengan Akselerasi Pelaksanaan Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik, Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor/Lintas Program Kawasan Bebas Jentik dengan Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik, Pertemuan Penguatan Jejaring dalam Pencegahan dan Pengendalian DBD, dan Pertemuan Peningkatan Tata Laksana dalam Pengendalian Penyakit DBD.

g) Persentase Kab/kota yang sudah eliminasi malaria

Tahun 2019 realisasi 85% (sebanyak 23 kabupaten/kota sudah mencapai eliminasi malaria). Hal tersebut karena tidak ada kasus penularan setempat hanya kasus import saja, namun pada bulan April kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya sudah mendapat sertifikat eliminasi malaria sehingga pencapaian menjadi 93 %.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah ada 2 (dua) kabupaten yaitu kab sukabumi, pangandaran masih belum memenuhi syarat eliminasi malaria, masih di temukan kasus malaria penularan setempat, belum terbangun dengan baik jejaring kerja antara lintas sektor dan lintas program untuk pencegahan dan pengendalian

Malaria, dan masih belum kuatnya komitmen pemerintah daerah setempat dalam penganggaran program Penanggulangan dan pencegahan penyakit Malaria.

i) Proporsi kab/kota yang mencapai eliminasi filariasis

Analisis penyebab kegagalan pencapaian indicator outcome dibandingkan dengan capaian tahun 2019. Kegiatan Monitoring & Evaluasi dapat dilaksanakan pada tahun 2019 di Kabupaten/Kota karena tidak ada kendala yang berarti sama sekali sehingga kegiatan Survei Penilaian Kejadian/TAS dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Monitoring & Evaluasi dengan Survei Penilaian Kejadian/TAS pada Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi tidak dapat dilaksanakan karena terdapat pandemic Covid-19 pada tahun 2020 dan pendanaan yang akan digunakan untuk kegiatan tersebut pada BBTCL-PP Kementerian Kesehatan digunakan untuk focusing penanganan Covid - 19.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah adanya pandemic Covid-19 sehingga banyak kegiatan untuk Monitoring dan Evaluasi Eliminasi Filariasis tidak bisa terlaksana terkait dengan peraturan yang tidak diperbolehkan mengumpulkan massa/kerumunan dan anak sekolah sebagai sasaran pemeriksaan antigen Filariasis harus belajar secara on line tidak tatap muka. Anggaran kegiatan pencegahan dan pengendalian Filariasis dan Cacingan mengalami efisiensi mencapai sebesar 70%. Semua Kabupaten/Kota fokus pada penanganan Covid-19 sehingga kegiatan untuk meningkatkan upaya eliminasi Filariasis tidak berjalan sama sekali, dan terdapat beberapa petugas pengelola program Puskesmas maupun Kabupaten/Kota yang terinfeksi Covid-19 atau kontak erat dengan kasus Covid-19 sehingga banyak kegiatan pencegahan dan pengendalian Filariasis tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya/tertunda.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah mengadakan Pertemuan Koordinasi pencegahan dan pengendalian Filariasis dan Cacingan pada masa pandemic Covid-19 secara Virtual, Bimbingan teknis Filariasis pada 2 Kab/kota dan bimbingan pengendalian cacingan pada 3 Kab/Kota, Pendampingan POPM Cacingan pada 18 Kab/Kota, Pemantauan POPM Cacingan pada 20 Kab/Kota, dan melakukan koordinasi terkait penemuan kasus dan tatalaksana kasus Filariasis pada 27 Kab/Kota, baik pada saat adanya permintaan narasumber Pertemuan di Kab/Kota maupun pada saat melakukan fasilitasi ke Kab/Kota.

j) Persentase Kab/Kota yang mencapai Eliminasi Rabies

Tahun 2019 Jawa Barat mempunyai 4 (empat) daerah endemis Rabies dan mempunyai target I (satu) kabupaten bisa mencapai eliminasi. Tahun 2019 target bisa di realisasikan dan 1 (satu) kabupaten/kota bisa eliminasi sehingga tahun 2020 Jawa Barat mempunyai 3 daerah endemis Rabies. Tahun 2020 di targetkan 1 (satu) kabupaten/kota bisa

eliminasi tetapi target tersebut tidak dapat direalisasikan sehingga sampai akhir tahun 2020 masih mempunyai 3 daerah endemis rabies.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah kondisi pandemi Covid 19 sangat mempengaruhi kegiatan program zoonosis baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota, anggaran untuk program Zoonosis di efisiensi kurang lebih sebesar 75%, begitu pula dengan anggaran untuk program Zoonosis di kabupaten/kota, dan semua tenaga, sarana di fokuskan untuk penanggulangan pandemi Covid 19.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah bimbingan teknis dan monitoring kegiatan pengendalian program Zoonosis ke 11 kabupaten/kota, pertemuan evaluasi program Zoonosis dan validasi data kasus Zoonosis di 27 Kabupaten/Kota secara Daring. Konsultasi program Zoonosis ke Subdit Zoonosis Kementerian Kesehatan RI, koordinasi lintas sektor dan lintas program, dan pemenuhan kebutuhan logistik program zoonosis untuk 27 kabupaten/kota.

k) Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM Terpadu (PANDU)

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah masih banyak pengelola program P2PTM di Kabupaten/Kota maupun puskesmas yang belum terlatih, sering terjadi pergantian pengelola Program P2PTM di Kabupaten/Kota maupun puskesmas, dan pencatatan dan pelaporan di puskesmas melalui Portal Web belum optimal dikarenakan masih banyak pengelola program yang belum terlatih sehingga data bisa under reporting.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah meningkatkan kapasitas pengelola program P2PTM di Kabupaten/Kota dan puskesmas melalui pelatihan pandu PTM dengan sumber dana APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Selain itu membuat surat edaran kepada Kabupaten/Kota bahwa petugas yang telah terlatih tidak dipindah selama 3 tahun setelah pelatihan, dan meningkatkan kapasitas pengelola program P2PTM di Kabupaten/Kota dalam penggunaan Portal Web melalui workshop SI PTM.

l) Persentase penduduk yang mengalami gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Hasil capaian presentasi penduduk yang mengalami gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada tahun 2020 sebesar 74% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 100%. Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah Pandemi Covid-19 yang menyebabkan akses untuk pelayanan di puskesmas terbatas, hanya untuk pelayanan asidentil, kepatuhan penderita gangguan jiwa untuk berobat masih rendah, masalah kesehatan jiwa masih merupakan stigma di masyarakat, dan

ketersediaan obat jiwa masih mengandalkan dari Kemenkes, untuk Kabupaten/Kota masih terbatas dalam penyediaan obat jiwa.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah pertemuan virtual Orientasi Program Keswa bagi Petugas Kab/Kota dan Puskesmas yang telah diselenggarakan oleh Program Keswa Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Pelatihan virtual Program Resiliensi Kesehatan Mental Pada Tenaga Kesehatan di Jawa Barat yang didukung oleh HOPE dan KUN, pertemuan virtual koordinasi dengan Kepala Seksi P2PTM dan Keswa beserta pengelola program Keswa di Kab/Kota, dan Sosialisasi virtual untuk SISKEWA (Sistem Informasi Kesehatan Jiwa) Bagi Pengelola Program Keswa di Kab/Kota dan puskesmas.

3. PROGRAM KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN KESEHATAN AKIBAT KE KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) PROVINSI

Program kesehatan akibat bencana dan kesehatan akibat kejadian luar biasa (KLB) provinsi mempunyai outcome meningkatnya pembinaan dan pengendalian teknis pencegahan dan pengendalian penyakit, dengan indikator outcome :

a. Persentase Kegiatan Rapid Health Assessment

Pada tahun 2020 pelaksanaan Rapid Health Assessment (RHA) pada kondisi bencana alam masih dilaksanakan oleh tim RHA sesuai prosedur sehingga pemantauan dan atau pelayanan kepada masyarakat yang terdampak krisis masih berjalan walaupun kondisi sedang dalam Pandemi Covid-19 dengan menjalankan protokol kesehatan sehingga capaian tahun 2019 dan 2020 masih sesuai target.

Permasalahan yang dihadapi tahun 2020 masih terbatasnya SDM dan banyaknya Petugas Kabupaten /Kota yang belum terlatih untuk melaksanakan RHA.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah fasilitasi pencegahan dan penanggulangan KLB wabah bencana alam bidang kesehatan, pemantauan penyakit dan masalah kesehatan matra.

b. Persentase masyarakat yang dilayani dilokasi bencana

Kegiatan pelayanan kepada masyarakat tahun 2019 dan 2020 di wilayah Provinsi Jawa Barat cukup berhasil dalam penanganan dan memfasilitasi beberapa wilayah lokasi bencana alam (penyediaan obat-obatan dan alat kesehatan),

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak krisis tidak mengalami permasalahan yang berat, walaupun dengan kondisi pandemi covid-19 semua masyarakat dilokasi pengungsian dapat dilayani seluruhnya, hanya ada beberapa lokasi yang kekurangan APD dan obat namun langsung dapat difasilitasi oleh Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan Dinkes Provinsi Jawa

Barat, tidak berfungsinya secara optimal kendaraan operasional roda empat dan roda dua milik program bencana. Upaya yang dilakukan mengatasi permasalahan Tahun 2019 adalah salah satunya menyediakan stok Obat-obatan dan alat kesehatan yang dialokasikan untuk memfasilitasi Kab/Kota yang kekurangan pada saat terjadi bencana, mengajukan pengadaan kendaraan Operasional bencana pada Tahun anggaran 2021.

4. PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN

Program Pelayanan Kesehatan mempunyai outcome meningkatnya pembinaan dan Pengendalian Teknis Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dengan indikator outcome :

a. Persentase Puskesmas siap akreditasi

Bila dibandingkan antara realisasi tahun 2020 dengan realisasi tahun 2019 mengalami sedikit penurunan, hal ini dikarenakan pada akhir tahun 2020 jumlah puskesmas terakreditasi masih tetap (1.028 puskesmas) sedangkan pembaginya (jumlah puskesmas teregistrasi bertambah, yaitu menjadi 1.083) sehingga mempengaruhi persentase sebagai hasil pembaginya, dan apabila dibandingkan dengan target tahun 2020 maka belum mencapai target yang sudah ditetapkan.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah awal Maret 2020 terjadi Pandemi Covid-19 sehingga sesuai dengan Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/455/2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Penetapan RS Pendidikan pada masa pandemi Covid-19, kegiatan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara ditunda sampai 1 tahun masa Pandemi Covid-19 ini dicabut. Pendampingan baik untuk puskesmas yang akan akreditasi perdana ataupun yang akan reakreditasi tidak bisa dilaksanakan optimal, melihat kondisi lapangan, bila ada kasus maka pendampingan tidak dilakukan, Pendampingan untuk puskesmas yang akan akreditasi perdana ataupun akan reakreditasi tidak bisa dilaksanakan secara optimal, melihat kondisi lapangan dan bila di puskesmas ada yang terpapar Covid-19 maka pendampingan dihentikan dulu. Beberapa pertemuan/ workshop di provinsi tidak bisa dilaksanakan karena efisiensi anggaran, dan Workshop Tata Kelola Mutu, Workshop Pemahaman Standar di Kab/ Kota dengan sumber biaya DAK NF Kab/ Kota dilaksanakan menjelang akhir tahun karena menunggu kebijakan Kemenkes.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah untuk puskesmas yang harus akreditasi perdana dan puskesmas yang akan reakreditasi tetap dilakukan pendampingan dengan memperhatikan protokol kesehatan, Pendampingan dan workshop dilaksanakan secara online atau offline, koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Kab/ Kota dan Surveyor Akreditasi FKTP Jawa Barat, dan menindaklanjuti edaran kemenkes agar fasyankes membuat surat pernyataan kesediaan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada masa Pandemi Covid-19.

b). Persentase kab/kota memiliki Laboratorium Kesehatan terakreditasi

Capaian persentase Kabupaten/Kota memiliki Laboratorium Kesehatan terakreditasi pada tahun 2020 sebesar 85,20%, bila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 masih sama sebesar 85,20%, tetapi bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan baik target tahun 2019 (19%) ataupun target tahun 2020 (30%), sudah mencapai target yang ditetapkan.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah awal Maret 2020 terjadi Pandemi Covid-19 sehingga sesuai dengan Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/455/2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Penetapan RS Pendidikan pada masa Pandemi Covid-19, kegiatan akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk sementara ditunda sampai 1 tahun masa Pandemi Covid-19 ini dicabut, dan beberapa pertemuan/ workshop di provinsi tidak bisa dilaksanakan karena efisiensi anggaran.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah melaksanakan pendampingan pasca akreditasi labkes, mengikuti workshop yang dilaksanakan oleh Kemenkes, dan menindaklanjuti edaran Kemenkes agar fasyankes membuat surat pernyataan.

c. Persentase Puskesmas di Kab/Kota sesuai standar

Bila dibandingkan antara realisasi tahun 2020 dengan realisasi tahun 2019 mengalami sedikit penurunan, hal ini dikarenakan pada akhir tahun 2020 jumlah puskesmas sesuai standar masih tetap (888 puskesmas) sedangkan pembaginya (jumlah puskesmas teregistrasi bertambah, yaitu menjadi 1.083) sehingga mempengaruhi persentase sebagai hasil pembaginya, dan apabila dibandingkan dengan target tahun 2020 maka belum mencapai target yang sudah ditetapkan.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah awal maret 2020 terjadi Pandemi Covid-19, pada tanggal 13 April 2020, Presiden Republik Indonesia menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam penyebaran Coronavirus Disease 19 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Puskesmas menjadi lebih fokus pada pemberian pelayanan pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di masa Pandemi Covid 19, mengingat pada masa pandemi banyaknya masyarakat dan tenaga kesehatan yang terkonfirmasi Covid-19 sehingga anggaran untuk pemenuhan puskesmas sesuai standar banyak dialihkan untuk penanggulangan Covid 19.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah mengintegrasikan dengan kegiatan Satgas Covid 19 kegiatan monitoring dan pembinaan ke puskesmas agar dapat memberikan pelayanan sesuai standar pada masa pandemi, dan

mengikuti workshop yang dilaksanakan oleh Kemenkes terutama terkait pelayanan pada masa pandemi.

d) Persentase kab/kota dengan minimal 50% puskesmas menyelenggarakan obat tradisional

Capaian persentase Kabupaten/ Kota dengan minimal 50% puskesmas menyelenggarakan kesehatan tradisional pada tahun 2020 sebesar 75,23%, bila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 adanya peningkatan sebesar 8,56% dari capaian 66,67%, tetapi bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan baik target tahun 2019 (64%) ataupun target tahun 2020 (72%), sudah mencapai target yang ditetapkan. Definisi operasional puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional adalah puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional terhadap masyarakat di wilayah kerjanya, yang memenuhi salah satu kriteria, antara lain : a. Puskesmas yang melaksanakan asuhan mandiri kesehatan tradisional ramuan (pemanfaatan taman obat keluarga) dan keterampilan (akupresur untuk keluhan ringan), b. Puskesmas yang melaksanakan kegiatan pembinaan, meliputi pengumpulan data kesehatan tradisional, fasilitasi registrasi/perizinan dan bimbingan teknis serta pemantauan pelayanan kesehatan tradisional, c. Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sudah dilatih pelayanan kesehatan tradisional (akupuntur untuk dokter, akupresur untuk perawat, bidan dan fisioterapi)

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah adanya Pandemi Covid-19 menimbulkan efisiensi anggaran.

Peningkatan Program Pelayanan Kesehatan Tradisional di Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan di tahun 2020 berkurang, dari 5 kegiatan menjadi 1 kegiatan karena adanya efisiensi anggaran, dan kegiatan dilaksanakan mendekati akhir tahun (September 2020). Kegiatan yang tidak dapat terlaksana tahun 2020 antara lain : Pertemuan Koordinasi dan Peningkatan Pembinaan Pengawasan Program Kesehatan Tradisional, Pertemuan Validasi dan Sinkronisasi Data program Pelayanan kesehatan Tradisional, Sosialisasi SP3T Provinsi Jawa Barat, Konsolidasi Penapisan dan Pengembangan Penyehat Tradisional (SP3T) Yankestrad, dan kegiatan yang dapat terlaksana tahun 2020 adalah monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan tradisional di FKTP dan FKTL, akan tetapi kegiatan ini terlaksana di 15 kabupaten/kota dari 27 kabupaten/kota yang dialokasikan.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah memaksimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan tradisional di FKTP dan FKTL di 15 Kabupaten/Kota, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional Kemenkes RI Jakarta, menindaklanjuti surat edaran Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional Kemenkes RI Jakarta Nomor HK.02.02/IV.2243/2020 tentang Pemanfaatan Obat Tradisional untuk Pemeliharaan Kesehatan, Pencegahan Penyakit dan Perawatan Kesehatan, Surat Nomor

HK.01.07/IV/870/2020 tentang Protokol Kesehatan Pelayanan SPA dan salon di Era New Normal Pandemi Covid-19, dan melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

e) Persentase kab/kota yang melaksanakan kerjasama dengan provinsi terkait Layad Rawat

Tahun 2019 kegiatan Layad Rawat di Provinsi adalah melengkapi kegiatan Layad Rawat berupa pemenuhan regulasi yaitu dengan tersusun dan ditetapkannya Peraturan Gubernur No 66 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Layad rawat di Provinsi Jawa Barat, Petunjuk Teknik Pelaksanaan Layad Rawat, serta pembahasan kerja sama dengan kerjasama lintas program dan lintas sektor tentang Pelaksanaan Layad Rawat.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Layad Rawat di 27 Kabupaten/kota, advokasi keberlangsungan kegiatan Layad Rawat di Kab/Kota.

f) Persentase Rumah Sakit siap Akreditasi

Bila dibandingkan antara realisasi tahun 2020 dengan realisasi tahun 2019 mengalami sedikit penurunan hal ini dikarenakan pada akhir tahun 2020 jumlah Rumah Sakit terakreditasi sebanyak 322 RS (hanya bertambah 2 RS bila dibandingkan capaian akhir th 2019) sedangkan pembaginya (jumlah Rumah Sakit teregistrasi bertambah, yaitu menjadi 376) sehingga mempengaruhi persentasi sebagai hasil pembaginya, tetapi bila dibandingkan dengan target Rumah Sakit terakreditasi tahun 2020 (68,99%) sudah mencapai/ melebihi target yang ditetapkan

(86,65%.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah awal Maret 2020 terjadi Pandemi Covid-19 sehingga sesuai dengan Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/455/2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Penetapan RS Pendidikan pada masa Pandemi Covid-19, kegiatan akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk sementara ditunda sampai 1 tahun masa Pandemi Covid-19 ini dicabut.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah mengikuti workshop yang dilaksanakan oleh Kemenkes, KARS, menindaklanjuti edaran Kemenkes agar fasyankes membuat surat pernyataan kesediaan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada masa Pandemi Covid-19.

g) Persentase Rekomendasi Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Provinsi

Rekomendasi dikeluarkan setelah dilakukan visitasi ke rumah sakit, jika hasil visitasi sesuai dengan standar maka rekomendasi akan di buat dan di sampaikan ke DPMPTSP Provinsi Jawa Barat. Semua permohonan yang masuk ke dinkes dari DPMPTSP sudah dilakukan visitasi dan sudah dibuatkan rekomendasinya. Jumlah permohonan sebanyak 17 RS dari DPMPTSP dan semuanya sudah dilakukan visitasi dan diberikan rekomendasi.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah jika sudah mendekati akhir tahun dana untuk visitasi sudah tidak ada lagi. Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah dilakukan visitasi dengan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Rumah Sakitnya.

h) Persentase kab/kota yang mempunyai 80% Rumah Sakit dengan pencapaian SPM

Kegiatan tidak dilaksanakan karena refokusing anggaran.

i) Persentase Rumah Sakit Regional yang memenuhi standar.

Kegiatan tidak dilaksanakan karena refokusing anggaran.

5. PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN (SDK)

Program Sumber Daya Kesehatan mempunyai outcome meningkatnya Pembinaan Dan Pengendalian Teknis Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, dengan indikator outcome :

a). Persentase Ketersediaan Obat Esensial

Target Persentase Ketersediaan Obat Esensial pada tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya kenaikan jumlah item obat yang menjadi indikator Ketersediaan Obat Esensial dari semula 20 jenis item obat menjadi 40 jenis item obat, sehingga target di tahun 2020 menjadi 91%. Realisasi Persentase Ketersediaan Obat Esensial Sebesar 92,12% pada tahun 2020 terdapat penurunan dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu sebesar 94,33%. Namun masih dapat melebihi target yang telah di tentukan. Indikator ketersediaan obat esensial ini merupakan jenis obat yang wajib ada dipuskesmas, obat wajib tersebut semula sebanyak 20 jenis item tetapi sekarang yang diwajibkan sebanyak 40 jenis item, dengan rincian obat : Albendazol /Pirantel Pamoat, Alopurinol, Amlodipin/Kaptopril, Amoksisilin 500 mg, Amoksisilin sirup, Antasida tablet kunyah/ antasida suspensi, Asam Askorbat (Vitamin C), Asiklovir, Betametason salep, Deksametason tablet/deksametason injeksi, Diazepam injeksi 5 mg/ml, Diazepam, Dihidroartemisin+piperakuin (DHP) dan primaquin, Difenhidramin Inj. 10 mg/ml, Epinefrin (Adrenalin) injeksi 0,1 % (sebagai HCl), Fitomenadion (Vitamin K) injeksi, Furosemid 40 mg/Hidroklorotiazid (HCT), Garam Oralit serbuk, Glibenklamid/Metformin, Hidrokortison krim/salep, Kotrimoksazol (dewasa) kombinasi tablet/Kotrimoksazol suspensi, Lidokain inj, Magnesium Sulfat injeksi, Metilergometrin Maleat injeksi 0,200 mg-1 ml, Natrium Diklofenak, OAT FDC Kat 1, Oksitosin injeksi, Parasetamol sirup 120 mg / 5 ml, Parasetamol 500 mg, Prednison 5 mg, Ranitidin 150 mg, Retinol

100.000/200.000 IU, Salbutamol, Salep Mata/Tetes Mata Antibiotik, Simvastatin, Siprofloksasin, Tablet Tambah Darah, Triheksifenidil, Vitamin B6 (Piridoksin), dan Zinc 20 mg.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah pada tahun 2020 terdapat penambahan jenis obat yang menjadi Indikator Ketersediaan Obat Essensial dari semula 20 item obat menjadi 40 item obat.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah mensosialisasikan kepada Kab/Kota untuk menambahkan jenis obat yang menjadi indikator ketersediaan obat dari semula 20 item obat menjadi 40 item obat.

b) Persentase Rekomendasi Perijinan yang Dikeluarkan.

Pada tahun 2020 terdapat penurunan realisasi untuk persentase rekomendasi perijinan yang di keluarkan, adapun realisasi pada tahun 2019 adalah 87,77% dan pada tahun 2020 adalah 87,52%. Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 dan mengakibatkan peninjauan lapangan untuk pemeriksaan sarana di batasi.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah berkoordinasi dengan DPMPTSP Provinsi Jawa Barat untuk dapat berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk memenuhi proses perizinan terkait izin PBF Cabang, PAK dan UKOT untuk dapat di proses dengan semaksimal mungkin proses perizinan dapat terakomodir dengan baik.

c) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Melaksanakan Perencanaan dan Pengelolaan Mutu Tenaga Kesehatan

Dalam Pengelolaan Mutu Tenaga terdapat beberapa program di dalamnya yaitu kegiatan pengelolaan Data SDMK, data rencana kebutuhan, Tubel reguler, Tubel Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), Legalisir STR, Penerbitan Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STR TTK), Program Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS), Penugasan Khusus Nusantara Sehat (NS), Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) dan TKWNA. Meskipun terdapat efisiensi anggaran di tahun 2020, kegiatan mutu SDMK dapat dilaksanakan melalui kegiatan zoom meeting yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan dan kegiatan virtual yang diselenggarakan melalui DPA Perencanaan dan Pengelolaan Mutu Tenaga Kesehatan. Kegiatan Virtual tetap mencapai output yang ditargetkan di tahun 2020.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah secara kualitas bermasalah karena keterbatasan interaksi. Terdapat masalah komunikasi yang disebabkan mekanisme virtual dan pemenuhan berkas secara online. Keterbatasan pendampingan secara klasikal yang mengurangi kualitas pemahaman sasaran program.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah memastikan virtual zoom meeting dengan evaluasi mekanisme pelaksanaannya agar meningkatkan kuantitas dan kualitas penyampaian informasi program. Dengan melaksanakan kegiatan tambahan virtual meeting pada kegiatan program yang bersifat teknis program.

d) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Prioritas Terisi Tenaga Kesehatan

Berkurangnya jumlah nakes Non PNS tahun 2019 sebanyak 940 menjadi 852 untuk tahun 2020 disebabkan karena mengundukan diri dengan alasan karena diterima CPNS. Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah tidak dapat mengevaluasi kinerja secara langsung pada peserta Tenaga Kesehatan Non PNS Provinsi Jawa Barat yang bertugas di 27 Kabupaten/ Kota baik yang bertugas di Puskesmas maupun di Rumah Sakit.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah evaluasi kinerja didelegasikan langsung ke atasan langsung peserta tenaga kesehatan non PNS Provinsi Jawa Barat dan memanfaatkan aplikasi online sebagai sarana di masa pandemi untuk evaluasi kinerja.

e) Persentase Tenaga Kesehatan mengikuti Pemilihan Tenaga Kesehatan Puskesmas Teladan

Untuk indikator persentase tenaga kesehatan mengikuti pemilihan tenaga kesehatan puskesmas teladan Tahun 2020 terdapat efisiensi anggaran hampir 100% sehingga kegiatan nakes teladan ditiadakan. Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah dengan adanya Pandemi Covid-19 dan Refokusing Anggaran untuk Penanganan Covid-19 sehingga kegiatan nakes teladan ditiadakan.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah pemberian penghargaan bagi tenaga relawan dan tenaga nakes non pns yang mengundurkan diri dengan memberikan surat keterangan masa bakti.

f) Persentase Penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan

Pada indikator persentase penduduk yang menjadi Peserta Jaminan Kesehatan terjadi kenaikan pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019, tapi untuk tahun 2020 masih belum mencapai target yang ditetapkan.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah adanya penonaktifan peserta PBI Jaminan Kesehatan sampai sepuluh tahap dari Kementerian Sosial sehingga sangat mempengaruhi jumlah kepesertaan dan capaian Universal Health Coverage. Pada tahun 2020 keluar regulasi baru terkait Jaminan Kesehatan dan Besaran Premi, yaitu Peraturan Presiden No. 64 tahun 2020 dan Permendagri No 64 tahun 2020, Proses Verifikasi dan Validasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota belum bisa berjalan dengan

maksimal, sehingga untuk penambahan ataupun penggantian Peserta PBI JK memerlukan waktu yang cukup lama.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah melaksanakan sosialisasi kepada pihak terkait tentang regulasi Perpres No 64 tahun 2020 dan Permendagri No.64 tahun 2020, koordinasi Lintas Sektor, koordinasi evaluasi Pembiayaan Kesehatan dan Penyusunan PHA/DHA (p).

g) Persentase Pembiayaan Kesehatan PBI ke Kab/Kota

Target Persentase Pembiayaan Kesehatan PBI ke Kabupaten/Kota tiap tahun 2019 dan tahun 2020 sama sebesar 40% sesuai dengan pergub No. 62 tahun 2015, Realisasi Persentase Pembiayaan Kesehatan PBI ke Kabupaten/Kota pada tahun 2020 adalah sebesar 40%, mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2019.

Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator ini ialah tahun 2020 keluar regulasi baru terkait besaran premi, sehingga ada perhitungan kebutuhan yang disesuaikan dengan regulasi tersebut, dan sebagian penganggaran masuk ke perubahan sehingga baru bisa dicairkan oleh kab/kota di akhir desember.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk mencapai indikator ini adalah koordinasi dengan BPKAD dan Kabupaten/Kota untuk proses pencairan dan pemanfaatan dana alokasi.

6. PROGRAM MANAJEMEN KESEHATAN

Program Manajemen Kesehatan mempunyai outcome meningkatnya layanan manajemen kesehatan, dengan indikator outcome :

- a) Persentase Draft Regulasi Bidang Kesehatan yang diusulkan oleh Dinas Kesehatan Prov Jawa Barat. Untuk indikator Persentasi Draf Regulasi Bidang Kesehatan yang diusulkan oleh dinas kesehatan provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 ialah sebanyak 7 Dokumen Draf Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat, 7 dokumen tersebut ialah :
 1. Draf Peraturan Gubernur Jawa Barat Tentang Hospital By Laws (HBL) Rumah Sakit Provinsi Jawa Barat
 2. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum daerah Rumah Sakit Al Ihsan Provinsi Jawa Barat masa Tugas 2020
 3. Gubernur Jawa Barat tentang Tim Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat
 4. Draf Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Hospital By Laws (HBL) RSUD Jampangkulon Provinsi Jawa Barat
 5. Draf Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Barat

6. Draf Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Hospital By Laws (HBL) RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat
 7. Draft Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas keputusan Gubernur Jawa Barat No. 445/Kep.1359-1359-Dinkes/2018 tentang keanggotaan badan pengawas Rumah Sakit Provinsi Jawa Barat
- b) Jumlah Dinas Kesehatan Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan Pelaksanaan BOK oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Telah dilakukan pembinaan terkait Pelaksanaan BOK di kab-kota melalui evaluasi pelaksanaan setiap triwulan. Dimana kab/kota melaporkan hasil evaluasi per triwulan melalui aplikasi e-renggar milik Kementerian Kesehatan yang diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Hasil evaluasi ini diserahkan atau diteruskan ke Kementerian Kesehatan melalui aplikasi e-renggar sebagai bahan pertimbangan Kementerian Kesehatan terkait usulan perencanaan tahun berikutnya.

2.2.3 Capaian Kinerja Tahun 2021 Triwulan I

Berikut disampaikan pencapaian kinerja tahun 2021 triwulan I sebagaimana table terlampir.

Tabel 2.5
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d Tahun 2021 (Triwulan 1)
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

NO	KODE PROG	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU KEGIATAN MURNI	REALISASI MARET 2021
	1:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
			1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
					1.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,877,606,760	0
					1.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	38,137,800	0
					1.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15,948,900	0
					1.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	30,976,900	0
					1.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	16,550,600	0
					1.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	514,200,000	0
					1.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150,932,850	0
			1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
					1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	608,652,048,214	0
					1.02.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	26,753,482	0
					1.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	312,300,000	0
					1.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	46,800,000	0

						Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
			1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
					1.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2,197,901,760	440,472,550
					1.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	851,775,000	0
					1.02.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1,000,000,000	0
			1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
					1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9,429,134,187	31,072,324
					1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	722,456,500	0
					1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17,722,945,501	1,579,135,950
			1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					1.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9,597,700,000	0
					1.02.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	48,500,000,000	0
			1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2,865,316,400	153,407,240
					1.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	276,000,000	2,250,000
					1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5,645,480,951	0
			1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,		

						Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	975,200,000	40,241,579
					1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,820,032,858	0
					1.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,938,238,100	60,100,920
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
			1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				
					1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	87,460,477,000	0
					1.02.02.1.01.07	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	146,570,000	0
					1.02.02.1.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	59,203,907,400	0
					1.02.02.1.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1,196,280,000	0
			1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				
					1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau	1,273,733,922	44,696,800

						Berpotensi Bencana		
					1.02.02.1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	25,717,013,335	2,033,064,680
					1.02.02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	385,502,734	18,184,320
					1.02.02.1.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	515,860,000	0
					1.02.02.1.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	351,986,534	0
					1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	999,999,462	9,092,160
					1.02.02.1.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	226,156,500	1,870,000
					1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	689,243,940	85,257,950
					1.02.02.1.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	423,354,000	4,616,000
					1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	18,776,248,884	226,726,288
					1.02.02.1.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	410,500,000	0
					1.02.02.1.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	656,117,220	9,308,640
					1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1,315,135,189	0
					1.02.02.1.02.18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	5,823,691,000	0
					1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1,371,029,679	16,427,640
					1.02.02.1.02.23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	12,838,570,340	18,374,320
					1.02.02.1.02.27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6,566,129,730	0
			1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi				

					1.02.02.1.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	800,000,000	37,818,080
			1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				
					1.02.02.1.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	234,790,910	0
					1.02.02.1.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	1,046,688,710	Rp 57,556,140
					1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1,258,080,940	9,128,000
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						
			1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi				
					1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	127,795,636,250	0
			1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				
					1.02.03.1.02.02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	993,993,313	0
	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						
			1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi				

				(PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)				
					1.02.04.1.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	605,099,803	0
			1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)				
					1.02.04.1.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	238,331,226	0
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						
			1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				
					1.02.05.1.01.01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	650,000,000	1,950,000
			1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi				
					1.02.05.1.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	2,601,648,000	18,617,280
	01.01	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN						
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG						

		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
			1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
					1.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3,060,627,424	0
					1.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	133,500,000	0
			1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
					1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29,987,980	0
					1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	830,107,375	0
					1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	275,013,500	0
					1.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	320,000,000	0
					1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	837,031,840	0
			1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2,996,460,000	0
					1.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,069,954,175	0
					1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	765,980,651	0
			1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	238,300,000	0
					1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2,980,253,000	0

					1.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	174,100,000	0
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
			1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				
					1.02.02.1.01.04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	228,168,722,781	0
					1.02.02.1.01.14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	497,300,000	0
					1.02.02.1.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	2,062,787,305	
			1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				
					1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	280,000,000	0
	01.02	UPTD PELATIHAN KESEHATAN						
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
			1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
					1.02.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan		0

						Akuntansi SKPD	62,641,163	
			1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
					1.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	135,100,000	2,500,000
			1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
					1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21,919,700	0
					1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66,737,501	0
					1.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	728,142,952	0
					1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	90,901,292	4,906,000
					1.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	94,250,000	330,000
					1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	168,530,000	0
			1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					1.02.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	856,143,200	0
			1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	823,586,820	86,254,424
					1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,736,684,049	97,242,960
			1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	191,061,200	4,697,710

						Operasional atau Lapangan		
					1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	463,800,000	0
					1.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	375,206,680	38,968,520
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
			1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				
					1.02.02.1.01.04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	354,080,000	0
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						
			1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				
					1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	2,129,614,643	27,901,200
	01.03	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMEUNGPEUK GARUT						
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG						

		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
			1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
					1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,358,616,632	0
					1.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	200,250,000	36,900,000
					1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260,785,000	30,343,914
			1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
					1.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	825,900,205	0
			1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7,952,165,473	0
			1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				
					1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	31,440,000,000	0
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
			1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				
					1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat		0

						Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	41,444,313,328	
					1.02.02.1.01.14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	7,400,000,000	0
			1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				
					1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	592,500,000	24,296,000
					1.02.02.1.02.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	50,000,000	204,000
					1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	7,000,000,000	0
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						
			1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi				
					1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	17,919,900,000	0
			1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				
					1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	100,000,000	3,900,000
	01.04	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KESEHATAN KERJA PROVINSI JAWA BARAT						

	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
			1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
					1.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	249,977,012	0
					1.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99,590,400	0
			1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
					1.02.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	200,000,000	8,010,000
					1.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100,000,000	6,980,000
					1.02.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	50,000,000	5,890,000
			1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
					1.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	502,800,000	24,500,000
			1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
					1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,090,797,523	0
					1.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	160,270,200	1,123,976
					1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	134,563,070	0
					1.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8,520,000	0
					1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,200,000,000	15,567,000
			1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik				

				Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
					1.02.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	450,000,000	0
					1.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	850,000,000	0
					1.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	885,193,796	0
			1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					1.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20,000,000	0
					1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	955,948,000	95,479,718
					1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4,596,951,960	880,000
			1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	425,280,000	0
					1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	914,000,000	0
					1.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,030,330,290	0
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
			1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP				

				Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				
					1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	7,422,161,200	880,000
					1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	10,423,644,580	0
			1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				
					1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2,499,709,250	0
					1.02.02.1.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	2,957,474,911	0
					1.02.02.1.02.22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	19,308,474,926	0
			1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi				
					1.02.02.1.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	614,511,900	0
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						
			1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi				
					1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	13,706,976,160	1,362,651,436
			1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				

					1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	2,000,000,000	0
	01.05	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI						
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
			1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
					1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,689,730,000	87,151,622
			1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1,068,042,952	
					1.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	568,700,000	-
					1.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	499,342,952	-
			1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7,813,964,142	
					1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,429,762,592	263,283,790
					1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6,384,201,550	
			1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			50,000,000,000	
					1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	50,000,000,000	6,850,914,566
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					109,621,775,783	

			1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			102,077,875,783	0
					1.02.02.1.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	49,503,987,725	0
					1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	21,240,856,978	0
					1.02.02.1.01.11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	21,060,500,000	0
					1.02.02.1.01.16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	9,997,531,080	0
					1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	275,000,000	0
			1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			7,543,900,000	0
					1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	7,543,900,000	0
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					22,767,500,000	
			1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi			22,668,500,000	0
					1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	22,668,500,000	0
			1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia			99,000,000	0

				Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				
					1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	99,000,000	0
	01.06	UPTD RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI JAWA BARAT					78,405,044,623	
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					44,101,506,006	
			1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			246,278,941	0
					1.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	246,278,941	0
			1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			134,957,957	0
					1.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	134,957,957	0
			1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2,895,820,465	0
					1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	488,298,965	0
					1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	589,065,000	0
					1.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	150,250,000	0
					1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,668,206,500	0
			1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			9,990,848,643	0
					1.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14,580,000	0
					1.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	264,391,672	0
					1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum		0

						Kantor	9,711,876,971	
			1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			833,600,000	0
					1.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	218,450,000	0
					1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	615,150,000	0
			1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			30,000,000,000	0
					1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	30,000,000,000	0
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					30,630,328,617	0
			1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			22,605,983,526	0
					1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	4,549,093,176	0
					1.02.02.1.01.11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	371,954,400	0
					1.02.02.1.01.12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	5,220,383,470	0
					1.02.02.1.01.14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	6,770,479,295	0
					1.02.02.1.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-		0

						alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	1,642,895,000	
					1.02.02.1.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	1,559,178,300	
					1.02.02.1.01.19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	2,286,949,700	0
					1.02.02.1.01.20	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	205,050,185	0
			1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			7,010,401,852	0
					1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	930,380,000	0
					1.02.02.1.02.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	611,619,952	0
					1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	64,606,900	0
					1.02.02.1.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	789,665,000	0
					1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4,500,000,000	0
					1.02.02.1.02.24	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	52,750,000	0
					1.02.02.1.02.28	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	61,380,000	0
			1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			691,143,239	0
					1.02.02.1.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	457,629,010	0
					1.02.02.1.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	233,514,229	0
			1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			322,800,000	0

					1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	322,800,000	0
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					3,673,210,000	0
			1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			3,673,210,000	0
					1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1,086,260,000	0
					1.02.03.1.02.02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2,586,950,000	0
	01.07	UPTD RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT					61,857,954,368	0
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					22,483,533,700	0
			1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			143,625,750	0
					1.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53,577,500	3,191,000
					1.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	35,330,000	0
					1.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54,718,250	0
			1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			108,780,000	0
					1.02.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	108,780,000	0
			1.02.01.1.05	Administrasi				0

				Kepegawaian Perangkat Daerah			863,210,000	
					1.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	863,210,000	12,750,000
			1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2,715,580,594	0
					1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47,716,250	0
					1.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	318,084,344	0
					1.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1,721,100,000	0
					1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	628,680,000	0
			1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4,315,025,071	0
					1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	777,497,200	0
					1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,537,527,871	0
			1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3,617,836,442	0
					1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	534,060,000	0
					1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2,217,236,378	0
					1.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	866,540,064	0
			1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			10,719,475,843	0
					1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	10,719,475,843	0
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN					38,844,395,668	

		PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
			1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			19,152,885,575	0
					1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	19,152,885,575	0
					1.02.02.1.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	-	0
			1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			3,128,530,000	0
					1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2,500,000,000	0
					1.02.02.1.02.22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-	0
					1.02.02.1.02.24	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	628,530,000	0
			1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			16,562,980,093	0
					1.02.02.1.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	12,519,782,000	1,175,525,000
					1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	4,043,198,093	-
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					530,025,000	
			1.02.05.1.01	Advokasi,				0

				Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi			330,025,000	
					1.02.05.1.01.01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	330,025,000	0
			1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi			200,000,000	0
					1.02.05.1.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	200,000,000	0
	01.08	RSUD AL IHSAN					425,068,701,958	
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					343,371,287,181	
			1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			17,500,630,048	0
					1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13,353,526,780	0
					1.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3,557,733,268	0
					1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	0
					1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45,320,000	0
					1.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	251,400,000	0
					1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	292,650,000	0
			1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan				0

				BLUD			325,870,657,133	
					1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	325,870,657,133	0
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					81,697,414,777	
			1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			73,697,414,777	0
					1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	1,639,145,000	0
					1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	22,146,298,587	0
					1.02.02.1.01.12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	49,911,971,190	0
			1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			8,000,000,000	0
					1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	8,000,000,000	0

Tabel 2.6

Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi	
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
19.	Ratio Kematian Ibu	87/ 100.000 KH	86/100.000 KH	85/100.000 KH	84/100.00 0 KH	79,68/ 100.000 KH	70,06/100. 000 KH	85/100.00 0 KH	84/100.000 KH
20.	Rasio Kematian Bayi	5,8/1000 KH	5.2/100.00 0 KH	5/100.000 KH	4.8/100.00 0 KH	3,4/ 1000 KH	2,83/1.00 0 KH	5/100.000 KH	4.8/100.000 KH
21.	Prevalensi Stunting	N/A	27,2	25,2	23,2	N/A	27,2	25,2	23,2
22.	Persentase Keberhasilan Pengobatan TB	88%	89%	89%	90%	87%	69,7	89%	90%
23.	Prevalensi Hipertensi	29,08%	39	38,4%	37,8%	34,50%	39,6	38,4%	37,8%
24.	Persentase Puskesmas Yang Terakreditasi	N/A	94,76%	99,81%	99,81%	N/A	96	99,81%	99,81%
25.	Persentase Kab/Kota Yang Melaksanakan Layanan Layad Rawat	N/A	29,63	48,15	66,67	N/A	48,15	48,15	66,67
26.	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	N/A	59,13	68,99	78,84	N/A	63,75	68,99	78,84

27.	Persentase Penduduk Yang Mendapat Jaminan Kesehatan Menuju Universal Health Coverage	80	85	90	95	83,17	84,99	90	95
-----	--	----	----	----	----	-------	-------	----	----

Sumber : Dinas Kesehatan, 2019

Tabel 2.7
Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Target Renstra		Realisasi Capaian		Proyeksi
		2020	2021	2020	2021	2021
1	Ratio Kematian Ibu	85/100.000 KH	84/100.000 KH	85,77 / 100.000 KH	130,2/100.000 KH	84/100.000 KH
2	Rasio Kematian Bayi	5/100.000 KH	4.8/100.000 KH	3,18/1000 KH	3.13/100.000 KH	4.8/100.000 KH
3	Prevalensi Stunting	25,2	23,2	26,21	26,2	23,2
4	Persentase Keberhasilan Pengobatan TB	89%	90%	73,16	67%	90%
5	Persentase Penduduk Berdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Provinsi yang mendapatkan Pelayanan	100	100	100	100	100
6	Persentase Puskesmas Yang Terakreditasi	99,81%	99,81%	73,16%	100 %	99,81%

7	Persentase Kab/Kota Yang Melaksanakan Layanan Layad Rawat	48,15	66,67	100	78,84	66,67
8	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	68,99	78,84	88,95	66,67	78,84
9	Persentase Ketersediaan Obat Esensial	91,00		92,12	92,0	

Tabel 2.8
Capaian Indikator Kinerja Program/Eselon III
Tahun 2019, 2020 dan 2021

No	Indikator Kinerja Program/Eselon III	Target Renstra				Realisasi Capaian			Proyeksi
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase kabupaten/kota dengan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan minimal 88%	N/A	63	70	78	N/A	63	56	78
2.	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Cakupan Pemberian Tablet Tambah Darah Pada Bumil Minimal 95%	N/A	63	70	78	N/A	86,17	59	78
3.	Persentase penduduk yang menggunakan air minum yang berkualitas	60	80	85	90	76,85	77,84	80,29	90
4.	Persentase penduduk menggunakan jamban	55	75	80	85	67,95	72,39	82,49	85

No	Indikator Kinerja Program/Eselon III	Target Renstra				Realisasi Capaian			Proyeksi
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
	sehat								
5.	Persentase puskesmas di kabupaten/kota menyelenggarakan kesehatan kerja dasar	N/A	55	60	65	N/A	57	79,91	65
6.	Persentase puskesmas di kabupaten/kota yang menyelenggarakan kesehatan olah raga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	N/A	55	60	65	N/A	57	86	65
7.	Jumlah unsur masyarakat tingkat provinsi yang dilibatkan dalam pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	N/A	4	4	4	N/A	4	4	4
8.	Persentase Keberhasilan Pengobatan TB (treatment Succes Rate)	88%	89%	89%	90%	87%	69,7	73,16	90%
9.	Persentase Pasien HIV yg di Obati	N/A	45	45	45	N/A	52	42	45
10.	Persentase Desa/Kelurahan yang mencapai UCI >90%	93	90	90,5	91	91,90	77,5	44,8	91
11.	Persentase Kab/Kota yg 50	N/A	60	60	60	N/A	60	44,44	60

No	Indikator Kinerja Program/Eselon III	Target Renstra				Realisasi Capaian			Proyeksi
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
	% Puskesmas melaksanakan tatalaksana pnemonia balita sesuai standar								
12.	Persentase kab/kota yang melakukan deteksi dini hepatitis B pada Ibu Hamil	N/A	70	80	90	N/A	85	96	90
13.	Persentase kab/kota yang mencapai IR DBD < 49/100.000 pddk	N/A	88	90	92	N/A	70	55,55	92
14.	Persentase Kab/kota yang sudah eliminasi malaria	N/A	85	93	93	N/A	85	93	93
15.	Proporsi cacat kusta TK II	N/A	10	10	9	N/A	9	6	9
16.	Proporsi kab/kota yang mencapai eliminasi filariasis	N/A	27	45	54	N/A	27	27,27	54
17.	Persentase Kab/Kota yang mencapai Eliminasi Rabies	N/A	88	100	100	N/A	88	88	100
18.	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM Terpadu (PANDU)	N/A	50	55	60	N/A	54	51,69	60
19.	Persentasi penduduk yang mengalami gangguan jiwa berat yang mendapatkan	N/A	100	100	100	N/A	55,13	74	100

No	Indikator Kinerja Program/Eselon III	Target Renstra				Realisasi Capaian			Proyeksi
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
	pelayanan kesehatan								
20.	Persentase Kegiatan Rapid Health Assesment	N/A	100	100	100	N/A	100	100	100
21.	Persentase Masyarakat yang dilayanani dilokasi Bencana	N/A	100	100	100	N/A	100	100	100
22.	Persentase Puskesmas siap Akreditasi	N/A	95	100	100	N/A	96	94,92	100
23.	Persentase Kab/Kota memiliki Laboratorium Kesehatan terakreditasi	N/A	19	30	40	N/A	44	85,20	40
24.	Persentase Puskesmas di Kab/Kota sesuai standar	N/A	82	86	91	N/A	82	82	91
25.	Persentase Kabupaten/Kota dengan minimal 50% Puskesmas menyelenggarakan kesehatan tradisional	N/A	64	72	80	N/A	73	75,23	80
26.	Persentase Kab/Kota yang	N/A	29,63	48,15	66,67	N/A	44,44	100	66,67

No	Indikator Kinerja Program/Eselon III	Target Renstra				Realisasi Capaian			Proyeksi
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
	melaksanakan Kerjasama dengan Provinsi terkait Layad Rawat								
27.	Persentase Rumah Sakit siap Akreditasi	N/A	60	68,99	78,84	N/A	88,9	86,64	78,84
28.	Persentase Rekomendasi Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Provinsi	N/A	100	100	100	N/A	100	100	100
29.	Persentase Kab/Kota yg mempunyai 80% Rumah Sakit dengan pencapaian SPM	N/A	19	33	48	N/A	19,23	N/A	48
30.	Persentase Rumah Sakit Regional yg memenuhi standar	N/A	38	50	63	N/A	42,86	N/A	63
31.	Persentase ketersediaan obat esensial	70	90	91	92	94,18	90	92,12	92
32.	Persentase rekomendasi perijinan yang dikeluarkan	N/A	85	90	95	N/A	87,76	87,52	95

No	Indikator Kinerja Program/Eselon III	Target Renstra				Realisasi Capaian			Proyeksi
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
33.	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan perencanaan dan pengelolaan mutu tenaga kesehatan	N/A	70	75	80	N/A	70	75	80
34.	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan prioritas terisi tenaga kesehatan	N/A	65	70	70	N/A	93	70	70
35.	Persentase tenaga kesehatan mengikuti pemilihan tenaga kesehatan puskesmas teladan	N/A	70	75	80	N/A	78,79	0	80
36.	Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan	80	85	90	95	83,17	84,99	85,51	95
37.	Persentase Pembiayaan Kesehatan PBI ke Kab/Kota	N/A	40	40	40	N/A	40	40	40
38.	Persentase Draft Regulasi Bidang Kesehatan yang diusulkan oleh Dinas Kesehatan Prov Jawa Barat	N/A	100	100	100	N/A	100	100	100
39.	Jumlah Dinas Kesehatan Kab/Kota yang dilakukan pembinaan pelaksanaan	N/A	27	27	27	N/A	27	27	27

No	Indikator Kinerja Program/Eselon III	Target Renstra				Realisasi Capaian			Proyeksi
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
	BOK oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat								
40.	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Di RS Al Ihsan	N/A	76,82	77,84	78,87	N/A	79,07	80,46	78,87
41.	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Di RS Jiwa	N/A	75	80	85	N/A	80,8	88,86	85
42.	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RS PARU	N/A	75	76	77	N/A	75	77,09	77
43.	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Di RSUD Jampangkulon	N/A	75,90	76,15	76,62	N/A	79,98	81,04	76,62
44.	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Di RSUD Pameungpeuk	N/A	80,84	81,91	83,54	N/A	81,13	82,78	83,54
45.	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Di RS Kesehatan Kerja	N/A	60	62	65	N/A	74,4	81,30	65
46.	Persentase BOR (bed occupancy ratio) di RSUD Al Ihsan	N/A	60	65	70	N/A	73,12	80,29	70

No	Indikator Kinerja Program/Eselon III	Target Renstra				Realisasi Capaian			Proyeksi
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
47.	Persentase BOR (bed occupancy ratio) di RS Jiwa	N/A	58	61	64	N/A	51	47,65	64
48.	Persentase BOR (bed occupancy ratio) di RS Paru	N/A	57	58	59	N/A	29,65	18	59
49.	Persentase BOR (bed occupancy ratio) di RS Jampangkulon	N/A	65	68	70	N/A	66,73	61,52	70
50.	Persentase BOR (bed occupancy ratio) di RS Pameungpeuk	N/A	60	62	65	N/A	76,72	63,59	65
51.	Jumlah Kunjungan Pasien di RSUD Kesehatan Kerja	N/A	24.000			N/A	22.664	1,91	n/a
52.	Jumlah Penambahan Parameter Pemeriksaan yang diakreditasi di Unit Laboratorium Kesehatan	N/A	68	70	72	N/A	70	75	72
53.	Persentase Kepuasan Pelanggan di Unit Laboratorium Kesehatan	N/A	55	60	65	N/A	70	70	65
54.	Jumlah Penambahan Parameter Pemeriksaan Baru di Unit Laboratorium Kesehatan	N/A	239	241	243	N/A	241	241	243

No	Indikator Kinerja Program/Eselon III	Target Renstra				Realisasi Capaian			Proyeksi
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
55.	Jumlah Penambahan Pengunjung di Unit Laboratorium Kesehatan	N/A	20.000	21.000	22.000	N/A	N/A		22.000
56.	Persentase Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan melalui Pelatihan di Unit Pelatihan Kesehatan	N/A	8,31	1,00	1,5	N/A		0,93	15
57.	Nilai Komponen yang Sesuai dengan Pembobotan di Unit Pelatihan Kesehatan	N/A	3	≥3.5	≥3.5	N/A	3	3,64	≥3.5
58.	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Unit Pelatihan Kesehatan	N/A	60	65	70	N/A	60	70	70
59.	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	N/A	100	100	100	N/A	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan, 2020

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan penyelenggaraan pembangunan Kesehatan di Jawa Barat tetap memperhatikan tupoksi yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan program dan kegiatannya. Program dan kegiatan yang dilakukan selalu diupayakan untuk terus disinergikan dengan kebijakan dan prioritas pembangunan Kesehatan pemerintah pusat dan kabupaten/kota sehingga dapat saling mendukung baik di dalam kebijakan maupun pembiayaan. Dengan adanya perubahan kebijakan dan perkembangan situasi/kondisi terutama akibat dampak pandemic Covid-19, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat merumuskan beberapa isu penting di dalam penyelenggaraan pembangunan Kesehatan sesuai dengan dokumen perubahan Renstra Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran;
2. Pengelolaan BLUD UPTD Provinsi Jawa Barat
3. Pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi pasca pandemic covid-19;
4. Pengembangan pelayanan kesehatan di wilayah pengembangan, pusat-pusat kegiatan dan wilayah perbatasan;
5. Pengelolaan dan pengembangan Rumah Sakit Provinsi berskala nasional dan internasional
6. Akses, mutu, dan pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
7. Jumlah, mutu, dan penyebaran sumber daya Kesehatan;
8. Pemberdayaan masyarakat untuk perilaku hidup bersih dan sehat;
9. Penyakit menular, penyakit tidak menular, dan penyakit menular yang kembali muncul (Triple Burden Diseases);
10. Penatalaksanaan sediaan farmasi, alat kesehatan, vaksin, dan makanan/minuman;
11. Stunting pada anak dan balita;
12. Pembiayaan kesehatan untuk peningkatan pelayanan Kesehatan;
13. Pemanfaatan teknologi (digitalisasi) dalam pelayanan Kesehatan;
14. Peningkatan kualitas dan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Provinsi
15. Penelitian dan pengembangan bidang Kesehatan;

Isu strategis di atas akan menjadi perhatian Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat di tengah berlangsungnya pandemic covid-19 yang belum dipastikan kapan akan berakhir. Beberapa langkah- persiapan baik yang bersifat pencegahan, penanganan pandemic saat ini, maupun persiapan pasca pandemic covid-19 di Jawa Barat, telah disusun skema penanganan kesehatan yang terdiri dari 3 langkah dasar :

1. Langkah Pencegahan

Langkah pencegahan ini menjadi sangat penting dilakukan agar dapat mengendalikan penularan covid-19, menurunkan bahkan jika dimungkinkan tidak ada penularan. Penularan dapat dikendalikan melalui tiga pendekatan yang saling melengkapi: 1) memutus rantai penularan dengan cara mendeteksi, mengetes, mengisolasi, dan mengobati kasus dan mengarantina kontak; 2) memantau titik-titik pusat penyebaran penyakit ini melalui surveilans penyakit saluran pernapasan atau penyakit serupa influenza, yang dilengkapi dengan survei serologis; 3) Pemberdayaan masyarakat untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Faktor ini sangat penting dilakukan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan covid-19.

2. Langkah penanganan saat ini

Salah satu upaya penanganan kesehatan pada masa pandemic adalah melakukan upaya-upaya agar jumlah kasus dapat terkendali, melakukan upaya pengobatan melalui penguatan fasilitas Kesehatan yang tersebar di Provinsi Jawa Barat baik dari sisi SDM Kesehatan maupun sarana prasarana, melakukan penguatan imun tubuh melalui vaksinasi massal yang dilakukan intensif di berbagai tempat di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Selain itu, selama masa penanganan pandemic, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat berupaya memperluas jejaring dan kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait dalam rangka membangun sinergitas dalam hal penanganan kasus covid-19, memperkuat Rumah Sakit Daerah Provinsi agar mampu melayani masyarakat yang memerlukan pelayanan rujukan

3. Langkah Rehabilitasi Pasca Pandemi

Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) penyelenggaraan pelayanan kesehatan merupakan salah satu strategi yang perlu dirumuskan untuk menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Provinsi Jawa Barat. Hal ini diperlukan mengingat kondisi pandemic yang terjadi saat ini tidak dapat dipastikan kapan akan berakhir. Menyikapi hal tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat perlu menyiapkan gambaran besar AKB penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagai upaya menyesuaikan dengan kondisi baru yang berbeda dengan kondisi sebelumnya.

Tiga langkah dasar di atas terbagi ke dalam 3 level penanganan covid-19 yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan yaitu level 3 masa darurat dimana pada tahun 2020 dan 2021 merupakan masa tanggap darurat yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada masa pandemic covid-19, Level 2 yaitu masa transisi dimana Dinas Kesehatan mulai mempersiapkan langkah-langkah menuju new normal sehingga Jawa Barat siap

memperlakukan covid-19 sebagaimana penyakit menular lainnya. Masa transisi ini diharapkan akan dimulai pada pertengahan tahun 2022, Level 1 yaitu masa new normal dimana Jawa Barat sudah dapat menempatkan covid-19 sebagaimana penyakit menular lainnya. Untuk menuju Level 1 diperlukan upaya-upaya pemulihan terhadap kepercayaan masyarakat/publik bahwa covid-19 bisa diperlakukan serupa dengan penyakit menular lainnya. Ada empat strategi pemulihan kepercayaan publik yang harus dilakukan sesuai rekomendasi World Health Organization (WHO) yaitu : Pertama, diagnosa melalui testing, tracing, and treatment (3T) yang harus terus ditingkatkan. Kedua, jaminan adanya terapi yang tepat di rumah sakit dan penggunaan obat-obatan ketika sakit. Ketiga, pemberian vaksin kepada masyarakat, dan keempat yaitu meningkatkan kualitas sistem kesehatan public.

Provinsi Jawa Barat dengan memperhatikan upaya adaptasi terhadap situasi pandemi covid-19 melalui program Jawa Barat Juara (Jabar Juara). Program Jabar Juara bidang kesehatan yaitu:

1. Layad rawat

Layad rawat merupakan program pelayanan kesehatan dengan melakukan kunjungan dan perawatan gratis oleh dokter dan tenaga kesehatan lainnya ke rumah masyarakat di seluruh kabupaten/kota dengan melakukan pelaporan dan panggilan darurat melalui telepon (Hotline) atau media online lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.

2. Puskesmas Juara

Puskesmas juara adalah menciptakan puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dan terakreditasi serta menjadi tambahan ketersediaan sumberdaya kesehatan dalam menghadapi kebencanaan daerah. Pada masa pandemic covid-19, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan Program PUSPA yang bertujuan menguatkan upaya deteksi, lacak kasus, edukasi publik terkait 3M, menyiapkan vaksinasi Covid-19 hingga memastikan pemenuhan layanan kesehatan esensial di Jawa Barat. Program PUSPA berupaya menerjemahkan nilai-nilai keilmiah, inovasi, dan juga kolaborasi. Program ini merekrut tenaga kesehatan sebagai Field Officer yang ditugaskan di di puskesmas-puskesmas di kota/kabupaten di Jawa Barat.

3. Pembangunan dan revitalisasi rumah sakit

Pembangunan gedung dan perbaikan gedung rumah sakit dilakukan dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan primer dan pelayanan rujukan di daerah kabupaten/kota terutama di daerah perbatasan yang menjadi kewajiban provinsi, pengembangan pelayanan Kesehatan di wilayah pengembangan dan pusat kegiatan

lokal, meningkatkan sarana prasarana, alat kesehatan rumah sakit dan puskesmas sesuai dengan standar. Membantu kab/kota dalam pembangunan rumah sakit baru dalam upaya peningkatan/pemerataan akses pelayanan kesehatan rujukan dan peningkatan rasio jumlah tempat tidur perawatan dengan jumlah penduduk di wilayah kabupaten/kota. Pembangunan dan revitalisasi rumah sakit meliputi pembangunan rumah sakit baru, merevitalisasi rumah sakit yang kurang layak, dan melakukan revitalisasi rumah sakit tipe C menjadi tipe B.

4. Jaminan kesehatan masyarakat miskin yang terintegrasi dengan jaminan kesehatan nasional (JKN).

Membantu subsidi pembayaran premi jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin berupa Penerima Bantuan Iuran Daerah Provinsi dan mengalokasikan anggaran pelayanan kesehatan SKTM pada rumah sakit milik Provinsi Jawa Barat.

Selain kondisi pandemic yang menjadi isu penitng dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dan seiring dengan adanya perubahan di dalam kebijakan daerah Provinsi Jawa Barat yang tertuang di dalam dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 maka untuk mendukung tercapainya tujuan, sasaran strategis, dan prioritas pembangunan daerah bidang Kesehatan serta dengan memperhatikan rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2020 dan 2021, kewenangan dan tupoksi, hasil review perubahan Renstra oleh Bappeda, maka dirumuskan kembali tujuan, sasaran, dan indicator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran		
				2021	2022	2023
Meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan ditopang oleh system Kesehatan daerah yang tangguh	Angka Harapan Hidup (AHH)	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang berdaya saing	Persentase pelayanan SPM di kab/kota	67%	16,18%	16,20 %
			Indeks Kepuasan Masyarakat	81,26-81,75	81,76-82,25	82,26 - 83,75
			Jumlah RS Provinsi yang terakreditasi paripurna	3	3	4
		Menurunnya kasus stunting di Jawa Barat	Prevalensi stunting	23,2%	21,2%	19,2 %

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat telah melakukan telaahan terhadap dokumen Rancangan Awal (Ranwal) Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.9
Review terhadap rancangan RKPD tahun 2021
Provinsi Jawa Barat

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Desa/Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota Bandung;	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	15 dokumen	2.644.353.810	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Desa/Kel. Pasirkaliki Kota Bandung;	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	15 dokumen	2.644.353.810	
2	Administrasi Keuangan	Desa/Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota Bandung;	Jumlah laporan administrasi keuangan yang tepat waktu	4 Laporan	609.652.048.214	Administrasi Keuangan	Desa/Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota Bandung;	Jumlah laporan administrasi keuangan yang tepat waktu	4 Laporan	609.652.048.214	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Desa/Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota Bandung;	Jumlah Waktu pelaksanaan administrasi Kepegawaian yang akuntabel	12 Bulan	4.049.676.760	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Desa/Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota Bandung;	Jumlah Waktu pelaksanaan administrasi Kepegawaian yang akuntabel	12 Bulan	4.049.676.760	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Desa/Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota Bandung;	Jumlah Waktu pelaksanaan administrasi Kepegawaian yang akuntabel	12 Bulan	27.874.536.188	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Desa/Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota Bandung;	Jumlah Waktu pelaksanaan administrasi Kepegawaian yang akuntabel	12 Bulan	27.874.536.188	
	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Desa/Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota Bandung;	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1) 15 Unit Roda 4; 2) 30 Unit Motor; 3) 1 Unit Ambulance; 4) 1 Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	58.097.700.00 0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Desa/Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota Bandung;	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1) 15 Unit Roda 4; 2) 30 Unit Motor; 3) 1 Unit Ambulance; 4) 1 Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	58.097.700.00 0	
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Desa/Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota Bandung;	Jumlah waktu pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	8.786.797.351	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Desa/Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota Bandung	Jumlah waktu pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	8.786.797.351	
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Desa/Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota Bandung;	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	4.733.470.958	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Desa/Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota Bandung;	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	4.733.470.958	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
8	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Seluruh Kab./Kota;	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam Upaya Meningkatkan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	21 Kab/Kota	136.431.263.408	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Seluruh Kab./Kota;	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam Upaya Meningkatkan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	21 Kab/Kota	136.431.263.408	
			Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Pelayanan Kesehatan Haji dan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga					Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Pelayanan Kesehatan Haji dan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	23 Kab/Kota		
			Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi dalam Upaya Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	27 Kab/Kota				Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi dalam Upaya Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	27 Kab/Kota		
			Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi dalam Upaya Pemenuhan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduknya yang terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan KLB	27 Kab/Kota				Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi dalam Upaya Pemenuhan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduknya yang terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan KLB	27 Kab/Kota		

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi dalam Upaya Pemenuhan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduknya yang terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan KLB	27 Kab/Kota				Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi dalam Upaya Pemenuhan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduknya yang terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan KLB	27 Kab/Kota		
			Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	27 Kab/Kota				Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	27 Kab/Kota		
			Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	27 Kab/Kota				Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	27 Kab/Kota		
			Jumlah Rumah Sakit Regional yg memenuhi standar	7 RS				Jumlah Rumah Sakit Regional yg memenuhi standar	7 RS		
	9	Seluruh Kab./Kota;	Jumlah Kepala Daerah Kab/Kota yang berkomitmen untuk meningkatkan jumlah masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan diatas 85%	20 Dokumen			Seluruh Kab./Kota;	Jumlah Kepala Daerah Kab/Kota yang berkomitmen untuk meningkatkan jumlah masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan diatas 85%	20 Dokumen		
			Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi untuk pemenuhan Pelayanan Layad Rawat dalam Upaya meningkatkan akses pelayanan terhadap masyarakat	27 Dokumen				Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi untuk pemenuhan Pelayanan Layad Rawat dalam Upaya meningkatkan akses pelayanan terhadap masyarakat	27 Dokumen		
			Jumlah Kab/Kota yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	27 Kab/Kota				Jumlah Kab/Kota yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	27 Kab/Kota		

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Seluruh Kab./Kota;	Jumlah Kabupaten/Kota dengan persentase Ketersediaan Obat Essensial 80 %	23 Kab/Kota	663.314.403.255	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Seluruh Kab./Kota;	Jumlah Kabupaten/Kota dengan persentase Ketersediaan Obat Essensial 80 %	23 Kab/Kota	663.314.403.255	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Seluruh Kab./Kota;	Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	1 Sistem	2.105.655.139	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Seluruh Kab./Kota;	Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	1 Sistem	2.105.655.139	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Seluruh Kab./Kota;	Jumlah Kab/ Kota yang memiliki Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang terakreditasi Indikator kegiatan diisi Jumlah	23 Kab/Kota	19.705.340.653	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Seluruh Kab./Kota;	Jumlah Kab/ Kota yang memiliki Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang terakreditasi Indikator kegiatan diisi Jumlah	23 Kab/Kota	19.705.340.653	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN										

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Seluruh Kab./Kota;	Jumlah Kabupaten/ kota yang melaksanakan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Prioritas	12 Kab/Kota	182.091.012.4 10	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Seluruh Kab./Kota;	Jumlah Kabupaten/ kota yang melaksanakan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Prioritas	12 Kab/Kota	182.091.012.4 10	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Seluruh Kab./Kota;	Jumlah Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan	12 Kab/Kota	8.995.817.956	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Seluruh Kab./Kota;	Jumlah Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan	12 Kab/Kota	8.995.817.956	
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN										
	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Seluruh Kab./Kota;	Jumlah Pertimbangan Teknis Sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan sarana cabang penyalur Alat Kesehatan (PAK)	87	605.099.803	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Seluruh Kab./Kota;	Jumlah Pertimbangan Teknis Sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan sarana cabang penyalur Alat Kesehatan (PAK)	87	605.099.803	
	Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Seluruh Kab./Kota;	Jumlah Pertimbangan Teknis Sarana Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	45	238.331.226	Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Seluruh Kab./Kota;	Jumlah Pertimbangan Teknis Sarana Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	45	238.331.226	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN										

RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Advokasi, Pemberdayaan Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Seluruh Kab./Kota;	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan mengenai upaya advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor Kabupaten/Kota dan Provinsi termasuk UKBM di bidang kesehatan	27 Kab/Kota	980.025.000	Advokasi, Pemberdayaan Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Seluruh Kab./Kota;	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan mengenai upaya advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor Kabupaten/Kota dan Provinsi termasuk UKBM di bidang kesehatan	27 Kab/Kota	980.025.000	
	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Seluruh Kab./Kota;	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan mengenai Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dan Germas termasuk di dalamnya pembinaan PHBS di sekolah, PHBS di Poskestren dan Kampanye Kesehatan di berbagai media	27 Kab/Kota	2.801.648.000	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Seluruh Kab./Kota;	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan mengenai Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dan Germas termasuk di dalamnya pembinaan PHBS di sekolah, PHBS di Poskestren dan Kampanye Kesehatan di berbagai media	27 Kab/Kota	2.801.648.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 dilaksanakan dengan menggunakan 4 (empat) pendekatan, yaitu teknokratik, partisipatif, *bottom-up* dan *top-down* dimana proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Provinsi Jawa Barat, demikian juga pada proses *bottom-up* dan *top-down* dilakukan secara berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kabupaten melalui media musyawarah rencana pembangunan. Usulan yang diperoleh dari para pemangku kepentingan didapatkan pada proses Musrenbang, dimana usulan-usulan tersebut kemudian diinventarisasi berdasarkan program yang ada pada tingkat Dinas Kesehatan. Usulan program dan kegiatan masyarakat berasal masyarakat, Lembaga/organisasi vertical dan non pemerintah PMI, Komisi penanggulangan AIDS, Rumah Sakit vertikal maupun swasta di Jawa Barat sebagai berikut :

Tabel 2.10
Usulan Program dan Kegiatan Hibah Tahun 2021
Melalui RKPD Jabaronline

No.	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Anggaran	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dana Pengembangan Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Barat	Kota Bandung			6.000.000.000	Verval Perangkat Daerah Provinsi
2	Dana Penanggulangan HIV/AIDS Jawa Barat	Kota Bandung			6.000.000.000	Verval Perangkat Daerah Provinsi
3	Dana Penanggulangan HIV/AIDS Jawa Barat	SMP PLUS AL-AITAAM Kab Bandung			500.000.000	Verval Perangkat Daerah Provinsi
4	Pembangunan Gedung Rumah Sakit	Kota Bandung	Rumah Sakit POLDA JABAR		32.460.477.000	Verval Perangkat Daerah Provinsi
5	Pembangunan Gedung Rumah Sakit	Kota Bandung	RUMAH SAKIT SARININGSIH		55.000.000.000	Verval Perangkat Daerah Provinsi

Sumber : BPKAD, 2021

Tabel 2.11
Usulan Program dan Kegiatan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Tahun 2021 Melalui RKPJ Jabaronline

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH
SKPD	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
SUB KEGIATAN : Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				
1	Kabupaten Bogor	Pembangunan Gedung Rumah Sakit	112.599.000.000	Dinas Kesehatan
2	Kabupaten Bogor	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kabupaten Bogor Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa, Kab. Bogor	53.792.726.252	Dinas Kesehatan
3	Kabupaten Bogor	Pengadaan Alat Kedokteran/Alat Kesehatan Rumah Sakit RSUD Cileungsi Kabupaten Bogor Kel.CIPEUCANG, Kec.CILEUNGI, Kab. Bogor	10.000.000.000	Dinas Kesehatan
4	Kabupaten Bogor	Pembangunan Gedung Rumah Sakit Gedung Igd Ponek Tahap 2 RSUD Cibinong Kel.TENGAH, Kec.CIBINONG, Kab. Bogor	15.350.000.000	Dinas Kesehatan
5	Kabupaten Bogor	Pembangunan Gedung Rumah Sakit Rujukan Regional Pembangunan Ipal RSUD Cibinong Kel.TENGAH, Kec.CIBINONG, Kab. Bogor	6.232.000.000	Dinas Kesehatan
6	Kabupaten Bogor	Pembangunan Gedung Rumah Sakit Rujukan Regional Pembangunan Gedung Hemodialisa Dan Rehab Medik RSUD Cibinong Kel.TENGAH, Kec.CIBINONG, Kab. Bogor	40.000.000.000	Dinas Kesehatan
7	Kabupaten Sukabumi	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Dinas Kesehatan Kel.PALABUHANRATU, Kec.PALABUHANRATU, Kab. Sukabumi	35.120.000.000	Dinas Kesehatan
8	Kabupaten Cianjur	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kantor Dinkes (Jl. Prof. Moch Yamien No. 8. Telp. (0263) 268894 Cianjur 43214) Kel.SOLOKPANDAN, Kec.CIANJUR, Kab. Cianjur	20.476.637.451	Dinas Kesehatan

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH
9	Kabupaten Bandung	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Iuran Pbi Kel.PAMEKARAN, Kec.SOREANG, Kab. Bandung	12.816.556.800	Dinas Kesehatan
10	Kabupaten Bandung	Pengadaan Alat Kedokteran/Alat Kesehatan Rumah Sakit Rsud Majalaya Kel.CIPAKU, Kec.PASEH, Kab. Bandung	20.762.364.557	Dinas Kesehatan
11	Kabupaten Bandung	Pembangunan Gedung Rumah Sakit Rsud Majalaya Kel.CIPAKU, Kec.PASEH, Kab. Bandung	7.595.000.000	Dinas Kesehatan
12	Kabupaten Garut	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kabupaten Garut Kel.JAYARAGA, Kec.TAROGONG KIDUL, Kab. Garut	18.260.928.000	Dinas Kesehatan
13	Kabupaten Tasikmalaya	Pengadaan Alat Kedokteran/Alat Kesehatan Rumah Sakit Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Di Rsud Smc Kel.CIKUNTEN, Kec.SINGAPARNA, Kab. Tasikmalaya	8.050.000.000	Dinas Kesehatan
14	Kabupaten Tasikmalaya	Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pembangunan Gedung Hemodialisa Rsud Smc Kabupaten Tasikmalaya Kel.CIKUNTEN, Kec.SINGAPARNA, Kab. Tasikmalaya	3.660.311.900	Dinas Kesehatan
15	Kabupaten Tasikmalaya	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pembiayaan Penerima Bantuan Iuran Daerah Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa, Kab. Tasikmalaya	15.918.084.400	Dinas Kesehatan
16	Kabupaten Ciamis	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Dinas Kesehatan Kab. Ciamis, Jl. M. Iwa Kusumasomantri No.12 Kel. Kertasari Kec. Ciamis Kab. Ciamis Kel.KERTASARI, Kec.CIAMIS, Kab. Ciamis	13.177.416.000	Dinas Kesehatan
17	Kabupaten Kuningan	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pembiayaan Untuk Pembayaran Iuran Pbi Daerah Kabupaten Di Kabupaten Kuningan Tahun 2021 Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa, Kab. Kuningan	9.071.798.400	Dinas Kesehatan

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH
18	Kabupaten Cirebon	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pengintegrasian Data Masyarakat Miskin Dalam Kepesertaan Bpjs Kesehatan Se Kabupaten Cirebon Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa, Kab. Cirebon	26.660.390.400	Dinas Kesehatan
19	Kabupaten Cirebon	Pengadaan Alat Kedokteran/Alat Kesehatan Rumah Sakit Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Rsud Arjawinangun Kabupaten Kel.ARJAWINANGUN, Kec.ARJAWINANGUN, Kab. Cirebon	36.752.291.800	Dinas Kesehatan
20	Kabupaten Majalengka	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) 26 Kecamatan Seluruh Kab Majalengka Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa, Kab. Majalengka	8.295.456.000	Dinas Kesehatan
21	Kabupaten Sumedang	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Dinas Kesehatan Sumedang (Jalan Kutamaya No.21 Sumedang) Kel.KOTAKULON, Kec.SUMEDANG SELATAN, Kab. Sumedang	18.577.104.000	Dinas Kesehatan
22	Kabupaten Indramayu	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Dinas Kesehatan Indramayu Kel.SINDANG, Kec.SINDANG, Kab. Indramayu	56.480.000.000	Dinas Kesehatan
23	Kabupaten Indramayu	Pengadaan Alat Kedokteran/Alat Kesehatan Rumah Sakit Upt Rsud Pantura M.A Sentot Patrol Kel.PATROL, Kec.PATROL, Kab. Indramayu	14.000.000.000	Dinas Kesehatan
24	Kabupaten Indramayu	Pengadaan Alat Kedokteran/Alat Kesehatan Rumah Sakit RSUD Indramayu Kel.SINDANG, Kec.SINDANG, Kab. Indramayu	17.500.000.000	Dinas Kesehatan
25	Kabupaten Subang	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Dinas Kabupaten Subang Kel.CIGADUNG, Kec.SUBANG, Kab. Subang	7.107.357.700	Dinas Kesehatan

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH
26	Kabupaten Purwakarta	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kabupaten Purwakarta Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa, Kab. Purwakarta	11.556.230.440	Dinas Kesehatan
27	Kabupaten Purwakarta	Pengadaan Alat Kedokteran/Alat Kesehatan Rumah Sakit Pengadaan Alat Kesehatan Icu Dan Kamar Operasi Jl. Veteran No.39, Nagri Kaler, Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta 41115 Kel.NAGERI KALER, Kec.PURWAKARTA, Kab. Purwakarta	42.000.000.000	Dinas Kesehatan
28	Kabupaten Karawang	Pembangunan Gedung Rumah Sakit Rujukan Regional Rsud Karawang Jalan Galuh Mas Raya No 1 Desa Sukaharja Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang Kel.SUKAHARJA, Kec.TELUKJAMBE TIMUR, Kab. Karawang	2.422.300.000	Dinas Kesehatan
29	Kabupaten Karawang	Pengadaan Alat Kedokteran/Alat Kesehatan Rumah Sakit Rsud Karawang Jalan Galuh Mas Raya No 1 Desa Sukaharja Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang Kel.SUKAHARJA, Kec.TELUKJAMBE TIMUR, Kab. Karawang	32.358.000.000	Dinas Kesehatan
30	Kabupaten Karawang	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Dinas Kesehatan Kel.ADIARSA BARAT, Kec.KARAWANG BARAT, Kab. Karawang	750.438.910	Dinas Kesehatan
31	Kabupaten Karawang	Pembangunan Gedung Rumah Sakit Rujukan Regional Rsud Karawang Jalan Galuh Mas Raya No1 Kel.SUKAHARJA, Kec.TELUKJAMBE TIMUR, Kab. Karawang	34.858.000.000	Dinas Kesehatan
32	Kabupaten Bekasi	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kabupaten Bekasi Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa, Kab. Bekasi	98.115.528.000	Dinas Kesehatan
33	Kabupaten Bandung Barat	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Kel.MEKARSARI, Kec.NGAMPRAH, Kab. Bandung Barat	12.441.600.000	Dinas Kesehatan

Sumber : BPKAD, 2021

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, kebijakan nasional yang diusung di tahun 2021 adalah Reformasi Sistem Kesehatan dimana Pemerintah akan focus pada penguatan health security dan gerakan hidup sehat (Germas). Adapun prioritas nasional di dalam Perpres tersebut adalah meningkatkan pelayanan Kesehatan menuju cakupan Kesehatan semesta dengan program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas bidang Kesehatan sebagai berikut :

1. Program Prioritas : Peningkatan Akses dan mutu Pelayanan Kesehatan
 - a. Kegiatan Prioritas : Peningkatan Kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana, dan Kesehatan reproduksi, dengan proyek prioritas :
 - Penurunan kematian ibu dan bayi
 - Peningkatan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
 - b. Kegiatan Prioritas : Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat, dengan proyek prioritas:
 - Penurunan stunting
 - c. Kegiatan Prioritas : Peningkatn Pengendalian Penyakit, dengan proyek prioritas:
 - Pengendalian penyakit menular dan tidak menular
 - d. Kegiatan Prioritas : Penguatan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas), dengan proyek prioritas :
 - Pengembangan lingkungan sehat
 - Penguatan promosi Germas
 - e. Penguatan system kesehatan dan pengawasan obat dan makanan, dengan proyek prioritas :
 - Penguatan pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan
 - Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
 - Peningkatan daya saingsediaan farmasi dan alat kesehatan
 - Penguatan tata Kelola, pembiayaan, dan penelitian pengembangan Kesehatan
 - Peningkatan

Adapun arah Kebijakan Pembangunan kesehatan yang tertuang dalam perpres tersebut diarahkan untuk mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi melalui strategi pembangunan bidang kesehatan, meliputi:

1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, mencakup: a) peningkatan pelayanan maternal dan neonatal

berkesinambungan di fasilitas publik dan swasta dengan mendorong seluruh persalinan di fasilitas kesehatan, peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal dan neonatal, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan terutama bidan, perbaikan sistem rujukan maternal, penyediaan sarana prasarana dan farmasi, jaminan ketersediaan darah setiap saat, dan pengembangan pencatatan kematian ibu di fasilitas pelayanan kesehatan; b) perluasan imunisasi dasar lengkap terutama pada daerah dengan cakupan rendah dan pengembangan imunisasi untuk menurunkan kematian bayi; c) peningkatan perilaku higiene; d) peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil; e) peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga khususnya pengasuhan, tumbuh kembang anak dan gizi; f) peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita termasuk inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif; g) perluasan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi sesuai karakteristik wilayah dengan optimalisasi peran sektor swasta dan pemerintah daerah melalui advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) dan konseling tentang pengendalian penduduk, KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) serta kapasitas tenaga lini lapangan serta penguatan fasilitas kesehatan, jaringan dan jejaring fasilitas kesehatan dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta usaha kesehatan bersumber daya masyarakat; serta h) peningkatan pengetahuan dan akses layanan kesehatan reproduksi remaja secara lintas sektor yang responsif gender.

2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda, mencakup: a) percepatan penurunan *stunting* dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi; b) peningkatan intervensi yang bersifat *life saving* dengan didukung data yang kuat (*evidence based policy*) termasuk fortifikasi dan pemberian *multiple micronutrient* yang efektif bagi balita, anak usia sekolah/remaja, calon pengantin, calon ibu hamil, dan ibu hamil; c) penguatan advokasi, komunikasi sosial dan perubahan perilaku hidup sehat terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan (*food based approach*); d) penguatan sistem surveilans gizi termasuk pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak; e) peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisi setempat; f) respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat; g) Pelibatan aktif aktor non pemerintah (swasta, lembaga masyarakat madani, *perguruan* tinggi dan organisasi profesi dan mitra pembangunan lainnya; serta h) penyediaan tenaga gizi yang berkualitas.
3. Peningkatan pengendalian penyakit, dengan perhatian khusus pada HIV/AIDS, TB, malaria, jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, *emerging diseases*, penyakit

yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, penyakit tropis terabaikan (kusta, filariasis, schistosomiasis), penyakit jiwa, cedera, gangguan penglihatan, dan penyakit gigi dan mulut, mencakup: a) pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit melalui edukasi, pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi multisektor termasuk perluasan cakupan deteksi dini, pengembangan *real time surveilans* dan pengendalian vektor; b) penguatan *health security* terutama peningkatan kapasitas untuk pencegahan, deteksi, dan respon cepat terhadap ancaman penyakit termasuk penguatan *alert system* kejadian luar biasa dan karantina kesehatan; c) penguatan tata laksana penanganan penyakit dan cedera; serta d) penguatan sanitasi total berbasis masyarakat.

4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), mencakup: a) pengembangan kawasan sehat antara lain kabupaten/kota sehat, pasar sehat, upaya kesehatan sekolah (UKS) dan lingkungan kerja sehat; b) penyediaan ruang terbuka publik, transportasi massal dan konektivitas untuk mendorong aktivitas fisik masyarakat dan lingkungan sehat serta penurunan polusi udara; c) regulasi yang mendorong pemerintah pusat dan daerah serta swasta untuk menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan dan mendorong hidup sehat termasuk pengembangan standar dan pedoman untuk sektor non kesehatan, peningkatan cukai rokok, pelarangan iklan rokok, dan penerapan cukai pada produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan, dan pengaturan produk makanan dengan kandungan gula, garam dan lemak; d) promosi perubahan perilaku hidup sehat yang inovatif dan pemberdayaan masyarakat termasuk revitalisasi posyandu dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat lainnya, serta penggerakan masyarakat madani untuk hidup sehat; e) peningkatan penyediaan pilihan pangan sehat termasuk penerapan label pangan dan perluasan akses terhadap buah dan sayur; f) penguatan akses, kualitas, advokasi dan tata kelola implementasi gerakan masyarakat hidup sehat di semua tatanan; serta g) penguatan kolaborasi multisektor untuk mendukung upaya promotif dan preventif dengan pendekatan kebijakan berwawasan kesehatan (*Health in All Policies*).
5. Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan, mencakup:
 - a. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang difokuskan pada peningkatan upaya kesehatan masyarakat sebagai elemen pokok dari pelayanan kesehatan dasar; penyempurnaan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang digunakan sebagai acuan pemenuhan standar fasilitas pelayanan kesehatan; pengembangan dan pelaksanaan rencana induk nasional penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan; pemanfaatan inovasi teknologi dalam pelayanan kesehatan meliputi perluasan sistem rujukan *online* termasuk integrasi fasilitas kesehatan swasta dalam

sistem rujukan, sistem rujukan khusus untuk daerah dengan karakteristik geografis tertentu (kepulauan dan pegunungan), perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan *telemedicine*, digitalisasi rekam medis dan rekam medis *online*; perluasan pelayanan kesehatan bergerak (*flying health care*) dan gugus pulau; optimalisasi penguatan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga; pengembangan dan peningkatan kualitas RS khusus; serta perbaikan pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan dan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3)

- b. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan yang difokuskan pada pengembangan paket pelayanan kesehatan (tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, farmasi dan alat kesehatan), afirmasi pemenuhan tenaga kesehatan strategis, dan afirmasi pendidikan (beasiswa dan tugas belajar) tenaga kesehatan untuk ditempatkan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dan daerah kurang diminati; pengembangan kebijakan re-distribusi tenaga kesehatan yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan; pengembangan mekanisme kerjasama pemenuhan tenaga kesehatan melalui kontrak pelayanan; perluasan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan fokus pada pelayanan kesehatan dasar; pembatasan program studi bidang kesehatan yang tidak memenuhi standar kualitas; serta pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan tenaga non-kesehatan termasuk tenaga sistem informasi dan administrasi keuangan untuk mendukung tata kelola di fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan yang difokuskan pada efisiensi pengadaan obat dan vaksin dengan mempertimbangkan kualitas produk; penguatan sistem logistik farmasi *real time* berbasis elektronik; peningkatan promosi dan pengawasan penggunaan obat rasional; pengembangan obat, produk biologi, reagen, dan vaksin bersertifikat halal yang didukung oleh penelitian dan pengembangan *life sciences*; serta pengembangan produksi dan sertifikasi alat kesehatan untuk mendorong kemandirian produksi dalam negeri;
- d. Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan yang difokuskan pada perluasan cakupan dan kualitas pengawasan *pre* dan *post market* obat dan pangan berisiko yang didukung oleh peningkatan kompetensi SDM pengawas dan penguji serta pemenuhan sarana prasarana laboratorium; peningkatan kemampuan riset; percepatan dan perluasan proses layanan publik termasuk registrasi; peningkatan kepatuhan dan kemandirian pelaku usaha dalam penerapan sistem manajemen mutu dan pengawasan produk;

peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan; serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan;

- e. Penguatan tata kelola, pembiayaan kesehatan, penelitian dan pengembangan yang difokuskan pada pengembangan kebijakan untuk peningkatan kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; pendampingan perbaikan tata kelola pada daerah yang memiliki masalah kesehatan untuk pencapaian target nasional dan mendorong pemenuhan SPM kesehatan; integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sistem informasi kesehatan pusat dan daerah termasuk penerapan sistem *single entry*; inovasi dan pemanfaatan teknologi digital termasuk *big data* untuk pengumpulan data, media promosi, komunikasi, dan edukasi kesehatan; peningkatan pemanfaatan anggaran untuk penguatan promotif dan preventif berbasis bukti; pengembangan sumber pembiayaan baru seperti penerapan *earmark* cukai dan pajak, kerjasama pemerintah dan swasta; peningkatan kapasitas dan kemandirian pembiayaan fasilitas kesehatan milik pemerintah; serta penguatan penelitian dan pengembangan untuk efektivitas dan inovasi intervensi kesehatan, dan evaluasi sistem kesehatan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan

3.2.1 Visi dan Misi Gubernur

Visi : Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin Dengan Inovasi Dan Kolaborasi

Misi : Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia, dan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif

3.2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan Renstra

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan ditopang oleh system keehatan daerah yang tangguh

Sasaran 1 : Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang berdaya saing

Strategi 1 :

- a. Peningkatan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat melalui peningkatan mutu layanan dan pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; pencegahan dan pengendalian penyakit dan kedaruratan Kesehatan masyarakat
- b. Peningkatan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan Kesehatan untuk peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan;

- c. Peningkatan jumlah, mutu dan persebaran sumberdaya manusia Kesehatan;
- d. Peningkatan penatalaksanaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan;
- e. Penguatan pemberdayaan masyarakat di bidang Kesehatan;
- f. Penguatan pengelolaan manajemen data dan informasi serta regulasi Kesehatan.

Arah Kebijakan :

- a. Menurunkan angka kesakitan di Jawa Barat dengan memberikan pelayanan sesuai SPM
- b. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan UPTD
- c. Meningkatkan kualitas dan perluasan layanan RS Provinsi
- d. Memperkuat pembinaan dan Pengelolaan BLUD pada UPTD Dinas Kesehatan
- e. Memperkuat system Kesehatan daerah provinsi Jawa Barat
- f. Memperkuat pelayanan Kesehatan di wilayah pengembangan, pusat-pusat kegiatan, dan wilayah perbatasan.

Sasaran II : Menurunnya kasus stunting di Jawa Barat

Strategi 2 :

- a. Penguatan Pelayanan gizi dengan pendekatan 1000 HPK dan continuum of care;
- b. Peningkatan intervensi langsung kepada balita stunting
- c. Penguatan kerjasama /Kolaborasi semua sumber daya meliputi pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas dan media dalam convergensi kegiatan
- d. Peningkatan penyuluhan perubahan perilaku pada keluarga melalui berbagai media promosi Kesehatan
- e. Penguatan system surveilans gizi yang terintegrasi

Arah Kebijakan :

- a. Memperluas intervensi spesifik dan penguatan intervensi sensitif yang terintegrasi.
- b. Memperkuat intervensi konvergensi lintas sektor.

3.2.3 Indikator Sasaran

Indikator sasaran pada perubahan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Persentase Pelayanan SPM pada Kabupaten Kota
2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan UPTD Provinsi
3. Jumlah Rumah Sakit Provinsi Terakreditasi Paripurna
4. Prevalensi Stunting

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pembangunan kesehatan tahun 2021 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pembangunan kesehatan di Provinsi Jawa Barat terkait dengan upaya-upaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat berdasarkan kewenangan adalah sebagai berikut :

- I. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan sasaran program adalah meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Adapun kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, dengan Sub Kegiatan:
 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
 4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji
 6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
 7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
 8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
 9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA
 10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana
 11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
 12. Pengelolaan Surveilans Kesehatan
 13. Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
 14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
 15. Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 16. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
 17. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
 18. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota
 19. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
 20. Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik

21. Pengelolaan Penelitian Kesehatan
 22. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus
 23. Operasional Pelayanan Rumah Sakit
 24. Penilaian/Appraisal Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pasca Bencana
 25. Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan
 26. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional
 27. Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota
 28. Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas
- b. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, dengan Sub Kegiatan :
1. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
 2. Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center
 3. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan
 4. Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan
 5. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
 6. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 7. Pengembangan Rumah Sakit
 8. Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
 9. Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)
 10. Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit
 11. Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
 12. Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 13. Pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
 14. Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
 15. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 16. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
 17. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
 18. Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
 19. Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 20. Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
 21. Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan
 22. Pemeliharaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan

- c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi, dengan Sub Kegiatan:
 1. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
 2. Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
 3. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

- d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi, dengan Sub Kegiatan :
 1. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
 2. Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
 3. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- II. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan sasaran program adalah meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan. Adapun kegiatan sebagai berikut:
 - a. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi, dengan sub kegiatan:
 1. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 2. Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan

 - b. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan:
 1. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

- III. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, dengan sasaran program adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman di Jawa Barat. Adapun kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK), dengan sub kegiatan:
 1. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
 2. Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK
 3. Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik

 - b. Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), dengan sub kegiatan:
 1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional

2. Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik
- IV. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan sasaran program adalah meningkatnya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Adapun kegiatan sebagai berikut:
- a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :
 1. Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
 - b. Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan:
 1. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
 - c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi
 1. Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM
- V. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sasaran program adalah terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Adapun kegiatan sebagai berikut:
- a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan, dengan sub kegiatan :
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Dinas Kesehatan, dengan sub kegiatan :
 1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 5. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 7. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - c. Administrasi Kepegawaian Dinas Kesehatan, dengan sub kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 6. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 7. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 8. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 4. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 5. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 11. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 4. Pengadaan Mebel
 5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 4. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan
 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- h. Peningkatan Pelayanan BLUD, dengan sub kegiatan :
1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

**BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

**Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2021
dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Provinsi Jawa Barat**

URUSAN BIDANG			RENCANA TAHUN 2021					PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
1	2	3	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
I	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
	a. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan:								
	1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Pembinaan Mengenai Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	21 Kab/Kota	385.502.734	PAD		27 Kab/Kota	443.328.144
	2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif		Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Pembinaan Mengenai Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	N/A	515.860.000	PAD		N/A	-
	3) Pengelolaan Pelayanan		Persentase Kab/Kota yang mendapatkan Pembinaan Mengenai Pengelolaan	14 Kab/Kota	351.986.534	PAD		15 Kab/Kota	404.784.514

	URISAN BIDANG		RENCANA TAHUN 2021					PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
			INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	Kesehatan Usia Lanjut		Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut						
	4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan dalam rangka pelaksanaan STBM dan PKAM	15 Kab/Kota	689.243.940	PAD		20 Kab/Kota	5.418.608.169
	5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji		Jumlah Kabupaten/Kota yang TPP (Tempat Pengelolaan Pangan) nya dilakukan pembinaan dalam rangka pengawasan higiene sanitasi pengelolaan kesehatan haji	8 Kab/Kota	410.500.000	PAD		10 Kab/Kota	472.075.000
	6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Puskesmas di Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar dan menyelenggarakan Kesehatan Olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	570 Puskesmas	226.156.500	PAD		600 Puskesmas	260.079.975
	7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Kab/Kota yang mencapai target upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	27 Kab/Kota	18.776.248.884	PAD		27 Kab/Kota	21.666.984.152
	8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi oleh Dinkes Jawa Barat dalam upaya peningkatan pelayanan ODGJ sesuai standard	27 Dokumen Kesepakatan	656.117.220	PAD		27 Dokumen Kesepakatan	1.662.649.553
	9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA		Jumlah Kabupaten kota yang mempunyai rehabilitasi medis napza	10 Kab/Kota		PAD		12 Kab/Kota	600.000.000
	10) Pengelolaan Pelayanan		Jumlah rekomendasi berupa	58 Jumlah	1.273.733.922	PAD		60 Jumlah	1.464.794.010

	URUSAN BIDANG		RENCANA TAHUN 2021					PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
			INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana		data informasi identifikasi kebutuhan hasil Rapid Health Assesment	Rekomendasi				Rekomendasi	
	11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Kab/Kota melaporkan data Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	27 Kab/Kota	25.717.013.335	PAD		27 Kab/Kota	29.574.565.335
	12) Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Kab/Kota yang melaporkan data Discarded rate Campak dalam upaya Eliminasi Campak	10 Kab/Kota				15 Kab/Kota	800.000.000
			Jumlah Kab/Kota mencapai target AFP rate 2/100.000 anak usia < 15 tahun	27 Kab/Kota				27 Kab/Kota	
			Jumlah Respon Alert SKDR	13 Kab/Kota				17 Kab/Kota	
	13) Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan		Jumlah Kab/Kota yang terkait puskesmas sesuai standar dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas	27 Kab/Kota	1.371.029.679	PAD		27 Kab/Kota	1.576.684.131
	14) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		Jumlah Kabupaten/kota dengan minimal 50 % puskesmas menyelenggarakan kesehatan tradisional	22 Kab/Kota	423.354.000	PAD		24 Kab/Kota	486.857.100
	15) Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Rumah Sakit Rujukan Regional di Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pendampingan	7 RS	6.566.129.730	PAD		7 RS	7.551.049.190

	URISAN BIDANG		RENCANA TAHUN 2021					PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
			INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	16) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Kab/Kota yang capaian kepesertaannya lebih dari 75%	24 Kab/Kota	1.315.135.189	PAD		26 Kab/Kota	35.487.890.467
	17) Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Kerjasama dengan Provinsi terkait Layad Rawat	27 Kab/Kota	12.838.570.340	PAD		27 Kab/Kota	14.764.355.891
	18) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota		Jumlah Dinas Kesehatan Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan	27 Kab/Kota	5.823.691.000	PAD		27 Kab/Kota	6.697.244.650
	19) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Pemberian Tablet Tambah Darah Pada Bumil Minimal 95%	21 Kab/Kota	999.999.462	PAD		24 Kab/Kota	1.149.999.381
	b. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan:								
	1) Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Obat Program yang telah disepakati dengan Pengelola Program	3 Dokumen				3 Dokumen	1.375.722.000
	2) Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas		Jumlah Dokumen Pengembangan Software / Aplikasi yang digunakan yang	2 Dokumen				2 Dokumen	168.555.500

	URUSAN BIDANG		RENCANA TAHUN 2021					PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
			INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center		telah dilakukan Maintenance Sesuai Kebutuhan data						
	3) Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan / Peralatan Laboratorium Kesehatan		Jumlah Dokumen Ketersediaan Alat Pemeriksaan Gula darah dan Kolesterol untuk Deteksi dini Faktor risiko PTM pada ASN di provinsi Jawa Barat	2 Dokumen				2 Dokumen	72.346.028.161
	c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi dengan Sub Kegiatan :								
	1) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		Jumlah Rekomendasi Penguatan Sistem Pencatatan Data Rutin Program	2 Rekomendasi	800.000.000	PAD		2 Rekomendasi	2.152.962.047
	d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan :								
	1) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Jumlah pembinaan bagi petugas di Kabupaten/ Kota dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	9 Orang	1.258.080.940	PAD		9 Orang	6.789.690.888
	2) Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit		Jumlah Kab/Kota yg mempunyai 80% Rumah Sakit dengan pencapaian SPM	48 Kab/Kota	1.046.688.710	PAD		63 Kab/Kota	15.601.441.317
	3) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Perizinan		Jumlah Rekomendasi Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	40 RS	234.790.910	PAD		40 RS	270.009.547

	URISAN BIDANG	RENCANA TAHUN 2021					PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022		
		INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
	Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Tingkat Provinsi						
II	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								
	a. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi								
	1) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Kabupaten/ Kota yang melaksanakan fasilitasi pemenuhan fasilitas kesehatan prioritas kesehatan sesuai standar/ jumlah faskes prioritas	12 Kab/Kota	127.795.636.250	PAD		14 Kab/Kota	209.404.664.272
	b. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi								
	1) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pembina dan Pengawasan SDM Kesehatan	12 Kab/Kota	993.993.313	PAD		14 Kab/Kota	4.118.084.810
III	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN								
	a. Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur								

	URISAN BIDANG	RENCANA TAHUN 2021					PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
		INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	Alat Kesehatan (PAK)							
	1) Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan PBF PAK	Jumlah Sarana Pedagang Besar Farmasi Cabang (PBF) dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang di pantau	130	605.099.803	PAD		135	695.864.773
	b. Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)							
	1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Sarana Usaha Kecil Obat Tradisional yang di pantau	50	238.331.226	PAD		55	274.080.910
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							
	a. Advokasi, Pemberdayaan Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi							
	1) Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan advokasi kesehatan kepada lintas sektor; kemitraan bidang kesehatan kepada ormas keagamaan, organisasi profesi, dunia usaha dan komunitas; serta pemberdayaan bidang kesehatan melalui UKBM SBH	27 Kab/Kota	650.000.000	PAD		27 Kab/Kota	1.127.028.750

	URUSAN BIDANG		RENCANA TAHUN 2021				PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022		
			INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	Provinsi		dan Desa/Kelurahan Siaga Aktif						
	b. Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan:								
	1) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan PKRS dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) di tatanan PHBS rumah tangga dan tatanan PHBS sekolah	27 Kab/Kota	2.601.648.000	PAD		27 Kab/Kota	3.221.895.200
V	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
	a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.644.353.810				
	1) Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan	6	1.877.606.760	PAD		6	2.159.247.774
	2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perencanaan	1	38.137.800	PAD		1	43.858.470
	3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1	15.948.900	PAD		1	18.341.235
	4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA	1	30.976.900	PAD		1	35.623.435

	URUSAN BIDANG		RENCANA TAHUN 2021					PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
			INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA	1	16.550.600	PAD		1	19.033.190
	6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	12	514.200.000	PAD		12	591.330.000
	7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	4	150.932.850	PAD		4	173.572.778
	b. Administrasi Keuangan				609.037.901.696				
	1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	2	312.300.000	PAD		2	1.008.351.000
	2) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	1200 Orang	608.652.048.214	PAD		1200 Orang	669.482.253.035
	3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Laporan Akuntansi dan Keuangan	12	26.753.482	PAD		12	35.000.000
	4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	12	46.800.000	PAD		12	46.800.000
	c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :				4.049.676.760				
	1) Pengadaan Pakaian Dinas		Jumlah Pakaian Kerja Lapangan	500 Stel				1) pakaian dinas harian	2.250.000.000

	URUSAN BIDANG		RENCANA TAHUN 2021					PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
			INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	Beserta Atribut Kelengkapannya							250 Stel 2) pakaian batik korpri 250 stel	
	2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah waktu Pembayaran Honor Kegiatan	12	2.197.901.760	PAD		12	2.992.472.000
	3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan	1) 60 Orang 2) 300 Orang 3) 100 Orang 4) 10 Orang	851.775.000	PAD		1) 60 Orang	1.107.307.000
	4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 draft	1.000.000.000	PAD		2) 300 Orang	1.300.000.000
	d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan				27.874.536.188				
	1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	'1) 12 Dus 2) 100 Buah 3) 25 Unit 4) 11 Set 5) 50 Unit 6) 50 unit 7) 17 Unit 8) 25 Unit 9) 1 Unit 10) 1 Paket 11) 4 Unit 12) 1 Paket 13) 1 Paket 14) 1 Unit 16) 4 Unit	9.429.134.187	PAD		1) 12 Dus 2) 100 Buah 3) 38 Unit 4) - Set 5) 200 Unit 6) 100 unit 7) 53 Unit	10.307.874.000

	URUSAN BIDANG		RENCANA TAHUN 2021					PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
			INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
				15) 4 Unit 16) 10 Set 17) 300 Buah 18) 3 Buah 19) 3 Unit 20) 10 Unit 21) 15 Unit 22) 2 Unit					
	2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Bulan	722.456.5001	PAD		12 Bulan	939.193.000
	3) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah orang yang rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	300 Orang	17.722.945.501	PAD		300 Orang	23.039.829.000
	e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan				58.097.700.000				
	1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Mobil Jabatan yang diadakan	5 unit				-	
	2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	'1) 30 Unit Motor 2) 10 Unit Mobil 3) 1 Unit Ambulance	9.597.700.000	PAD		"1) 3 unit mobil double gardan 1 unit ambulance	1.300.000.000
	3) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pembangunan Fasilitas Kesehatan	1 unit	48.500.000.000	PAD		-	60.658.000.000
	f. Penyediaan Jasa Penunjang				8.786.797.351				

	URUSAN BIDANG	RENCANA TAHUN 2021					PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
		INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :							
	1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	2.865.316.4001	PAD		12 Bulan	3.724.911.000
	2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	276.000.000	PAD		12 Bulan	358.800.000
	3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	5.645.480.9511	PAD		12 Bulan	7.339.125.000
	g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan			4.733.470.958				
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	975.200.000	PAD		12 Bulan	1.267.760.000
	2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	6 Unit	1.820.032.858	PAD		6 Unit	2.366.042.000
	3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	1.938.238.100	PAD		12 Bulan	2.519.709.000
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN							

	URUSAN BIDANG	RENCANA TAHUN 2021						PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
		INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT RS AL IHSAN								
	a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								
	1) Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan		Jumlah pengadaan Prasana Fasilitas Layanan Kesehatan	95 Unit	146.570.000	PAD		130 Unit	89.416.246.918
	2) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		Jumlah pengadaan peralatan kesehatan untuk pelayanan ruang rawat inap kelas III	175 Unit	59.203.907.400	PAD		250 Unit	79.872.277.435
	3) Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang di bangun	-	1.196.280.000	PAD		2 Unit	
	4) Pengembangan Rumah Sakit		Jumlah Gedung rumah sakit yang di lakukan pengembangan	2 Unit	87.460.477.000	Pendapatan Hibah		2 Unit	350.496.870.000
	b. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (RS Al Ihsan)								
	1) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah pasein baik rawat jalan dan rawat inap yang dilayani diluar tanggungan BPJS	748 Pasien	8.000.000.000	PAD		-	10.000.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								

URUSAN BIDANG	RENCANA TAHUN 2021						PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
a. Administrasi Umum Perangkat Daerah (RS Al Ihsan)								
1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan pengadaan peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam menunjang administrasi pelayanan	28 Unit	13.353.526.780	PAD		150 Unit	14.688.879.458	
2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Kebutuhan pengadaan peralatan rumah tangga	9 Unit	3.557.733.268	PAD		135 Unit	3.913.506.595	
3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	45.320.000	PAD		12 Bulan	49.852.000	
4) Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Waktu Penyediaan fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan	251.400.000	PAD		12 Bulan	276.540.000	
5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	292.650.000	PAD		12 Bulan	527.635.000	
b. Peningkatan Pelayanan BLUD (RS Al Ihsan)								
1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	12 Bulan	325.870.657.133	PAD		12 Bulan	387.354.559.828	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT RS JIWA								
a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM								

	URUSAN BIDANG	RENCANA TAHUN 2021						PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
		INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
	dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (RS Jiwa)								
	1) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Sakit	25 Jenis	4.549.093.176	PAD		29 Jenis	10.448.462.000	
	2) Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih, Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	9 Jenis	371.954.400	PAD		10 Jenis	2.736.053.440	
	3) Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang tersedia	8 Unit	5.220.383.470	PAD		10 Unit	5.000.000.000	
	4) Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah alat alat laboratorium, alat kesehatan dan kedokteran yang mendapat pemeliharaan dan kalibrasi	6 set	6.770.479.295	PAD		7 set	11.130.673.342	
	5) Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang terpelihara	154 paket	1.642.895.000	PAD		160 paket	259.500.000	
	6) Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah prasarana, peralatan dan perlengkapan perkantoran yang mendapat pemeliharaan	9 jenis	1.559.178.300	PAD		9 Jenis	3.540.769.000	
	7) Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah aplikasi Telemedicine RS Jiwa yang tersedia	4 unit	2.286.949.700	PAD		6 unit	5.050.000.000	
	8) Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Sakit	1 paket	205.050.185	PAD		0		
	b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM								

	URUSAN BIDANG	RENCANA TAHUN 2021						PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
		INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
	Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (RS Jiwa)								
	1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah kegiatan promosi pelayanan rumah sakit yang dilaksanakan	7 paket	930.380.000	PAD		7 paket 1.500.000.000	
	2) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah kegiatan penguatan kompetensi pelayanan dan evaluasi pelayanan	8 jenis	611.619.952	PAD		21 jenis 1.200.000.000	
	3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Pelayanan pasien pasung di RS Jiwa	8 keg	64.606.900	PAD		8 keg 277.678.000	
	4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		Jumlah Pasien yang mendapatkan biaya sharing pelayanan gakin	100 Orang	789.665.000	PAD		100 Orang 1.679.650.000	
	5) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah pasien keswa yang dirujuk	2250 Orang	4.500.000.000	PAD		2500 Orang 5.000.000.000	
	6) Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik		Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Pelanggan	20 Orang	52.750.000	PAD		20 Orang 97.700.200	
	7) Pengelolaan Penelitian Kesehatan		Jumlah kegiatan promosi pelayanan rumah sakit yang dilaksanakan	1 dokumen	61.380.000	PAD		2 dokumen 77.500.000	
	c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi (RS Jiwa)								
	1) Pengelolaan Sistem Informasi		Jumlah aplikasi SIM RS (software)	10	457.629.010	PAD		12	

	URUSAN BIDANG	RENCANA TAHUN 2021					PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
		INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	Kesehatan							
	2) Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet		Jumlah kebutuhan alat (Hardware) SIM RS	47 jenis	233.514.229	PAD		56 jenis 1.009.938.851
	d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi (RS Jiwa)							
	1) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Jumlah penilaian Akreditasi	1 kali	322.800.000	PAD		1 kali 863.130.000
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (RS Jiwa)							
	a. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi							
	1) Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah pegawai yang mendapatkan Peningkatan Kompetensi SDM RS Jiwa Provinsi Jawa Barat melalui Pelatihan Internal dan eksternal	561 Orang	1.086.260.000	PAD		671 Orang 1.394.885.000
	2) Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah pegawai yang mendapatkan Medical Check-up, Peningkatan Jiwa Korsa, Instruktur Olah Raga, Penceramah Agama dan Guru	561 Orang	2.586.950.000	PAD		671 Orang 7.442.100.000

URUSAN BIDANG		RENCANA TAHUN 2021					PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
		INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
		Ngaji.						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH RS Jiwa							
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan yang disusun	33 Laporan	246.278.941	PAD		33 Laporan	311.812.830
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
	1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi dan Keuangan	14 Laporan	134.957.957	PAD		14 Laporan	310.000.000
	c. Administrasi Umum Perangkat Daerah							
	1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	9 jenis	488.298.965	PAD		12 jenis	7.000.000.000
	2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 jenis	589.065.000	PAD		4 jenis	750.000.000
	3) Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah orang yang disediakan Makanan dan Minuman	23645 orang	150.250.000	PAD		33645 orang	175.000.000
	4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang yang rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	897 orang	1.668.206.500	PAD		1000 orang	1.850.000.000

URUSAN BIDANG	RENCANA TAHUN 2021						PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	14.580.000	PAD		12 Bulan		
2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu penyediaan kebutuhan alat tulis kantor	12 Bulan	264.391.672	PAD		12 Bulan	300.000.000	
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu penyediaan tenaga kebersihan dan tenaga keamanan	12 Bulan	9.711.876.971	PAD		12 Bulan	13.000.000.000	
e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	12 unit	218.450.000	PAD		12 unit	240.295.000	
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	17 unit	615.150.000	PAD		17 unit	676.665.000	
f. Peningkatan Pelayanan BLUD								

	URUSAN BIDANG	RENCANA TAHUN 2021					PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022		
		INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
	1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah waktu Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	12 Bulan	30.000.000.000	PAD		12 Bulan	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT RS PARU								
	a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (RS Paru)								
	1) Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		Jumlah sarana pendukung pelayanan kesehatan di RS Paru	18 jenis	19.152.885.575	PAD		20 jenis	19.152.885.575
	b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								
	1) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Pasien Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Barat (Rawat Jalan dan Rawat Inap) yang mendapatkan pelayanan	600 orang	2.500.000.000	PAD		660 orang	2.500.000.000
	2) Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik		Jumlah Pertemuan Rujukan dan Rujuk balik di RS Paru	210 keg	628.530.000	PAD		221 keg	628.530.000
	c. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas								

	URUSAN BIDANG	RENCANA TAHUN 2021					PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
		INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi							
	1) Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit		Jumlah Tenaga dokter , nakes dan tenaga nakes lainnya	88 orang	12.519.782.000	PAD		98 orang 14.209.782.000
	2) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Jumlah jenis peralatan pasien di rumah sakit	10 jenis	4.043.198.093	PAD		15 jenis 4.400.000.000
	3) Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik		Jumlah Pertemuan Rujukan dan Rujuk balik di RS Paru	55 keg				60 keg
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							
	a. Advokasi, Pemberdayaan Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi							
	1) Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Kegiatan jejaring eksternal TB dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota di Wilayah Ciayumajakuning, Kegiatan Layad Paru	5 Keg	330.025.000	PAD		5 Keg 363.027.500
	b. Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat							

	URUSAN BIDANG	RENCANA TAHUN 2021					PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
		INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	Daerah Provinsi							
	1) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah kegiatan promosi pelayanan rumah sakit yang dilaksanakan	6 Keg	200.000.000	PAD		8 Keg	220.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI							
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan yang disusun	3 laporan	53.577.500	PAD		3 laporan	142.436.250
	2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 dokumen	35.330.000	PAD		2 dokumen	50.000.000
	3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 laporan	54.718.250	PAD		3 laporan	100.000.000
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:							
	1) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi dan Keuangan	4 laporan	108.780.000	PAD		4 laporan	108.780.000
	c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:							
	1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal	100 orang	863.210.000	PAD		150 orang	863.210.000

	URUSAN BIDANG	RENCANA TAHUN 2021					PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
		INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	d. Administrasi Umum Perangkat Daerah							
	1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 unit	47.716.250	PAD		8 unit	550.000.000
	2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 unit	318.084.344	PAD		12 unit	800.000.000
	3) Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah orang yang disediakan Makanan dan Minuman	2700	1.721.100.000	PAD		3000	2.456.000.000
	4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang yang rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	870	628.680.000	PAD		1044	1.285.851.000
	e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	777.497.200	PAD		12 bulan	850.000.000
	2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	3.537.527.871	PAD		12 bulan	3.850.000.000
	f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	534.060.000	PAD		12 bulan	600.000.000

	URUSAN BIDANG	RENCANA TAHUN 2021					PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
		INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
	2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	14 unit	2.217.236.378	PAD		14 unit	2.369.694.000
	3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	3 unit	866.540.064	PAD		5 unit	880.000.000
	g. Peningkatan Pelayanan BLUD							
	1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	12 bulan	10.719.475.843	PAD		12 bulan	13.019.089.562
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT RS JAMPANG KULON							
	a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							
	1) Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan	Jumlah Gedung Pelayanan Kesehatan	7 unit	49.503.987.725	PAD		10 unit	358.622.742.520

URUSAN BIDANG	RENCANA TAHUN 2021						PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
Prasarana Pendukungnya								
2) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana Pendukung Pelayanan Kesehatan	15 jenis	21.240.856.978	PAD		60 jenis	40.000.000.000	
3) Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Sakit	18 jenis	21.060.500.000	PAD		70 jenis	20.000.000.000	
4) Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah penggunaan Obat dan Bahan Pakai Habis penunjang pelayanan kesehatan	110000 resep	9.997.531.080	PAD		115000 resep	15.000.000.000	
5) Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan dan Kedokteran dalam kondisi baik	499 alat	275.000.000	PAD		515 alat	500.000.000	
b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								
1) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Pasien yang mendapatkan biaya sharing pelayanan GAKIN	3000 pasien	7.543.900.000	PAD		4000 pasien	15.000.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN RS JAMPANG								

	URUSAN BIDANG	RENCANA TAHUN 2021					PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
		INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	KULON							
	a. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi							
	1) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah tenaga Non PNS medis paramedis dan tenaga lainnya yang mendapatkan tunjangan	450 orang	22.668.500.000	PAD		450 orang	25.000.000.000
	c. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi							
	1) Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan	120 orang	99.000.000	PAD		120 orang	300.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI RS JAMPANG KULON							
	a. Administrasi Umum Perangkat Daerah							
	1) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang yang rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	596 orang	1.689.730.000	PAD		596 orang	1.700.000.000
	b. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah							

	URUSAN BIDANG	RENCANA TAHUN 2021						PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
		INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
	Daerah								
	1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas Operasional	7 unit	568.700.000	PAD		-	2.640.000.000	
	2) Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Rumah Sakit	56 unit	499.342.952	PAD		90 unit	1.500.000.000	
	c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	1.429.762.592	PAD		12 bulan	2.200.000.000	
	2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	6.384.201.550	PAD		12 bulan	7.500.000.000	
	d. Peningkatan Pelayanan BLUD								
	1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah waktu Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	12 bulan	50.000.000.000	PAD		12 bulan	60.000.000.000	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT RS PAMEUNGPEUK								
	a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								

	URUSAN BIDANG	RENCANA TAHUN 2021					PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
		INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	1) Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Gedung Pelayanan Kesehatan	1 Unit				2 Unit	131.340.000.000
	2) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Alat Kedokteran Umum, Anak, Gigi, Bedah, Penyediaan Alat Radiologi, dan CSSD	120 Unit	41.444.313.328	PAD		132 Unit	25.000.000.000
	3) Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah penggunaan Obat dan Bahan Pakai Habis penunjang pelayanan kesehatan	420 Jenis	7.400.000.000	PAD		462 Jenis	8.000.000.000
	b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							
	1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Pengelolaan Perawatan Kesehatan Lingkungan	12 Bulan	592.500.000	PAD		12 Bulan	550.000.000
	2) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan	12 Bulan	50.000.000	PAD		12 Bulan	130.000.000
	3) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Pasien yang mendapatkan biaya sharing pelayanan GAKIN	4050 Orang	7.000.000.000	PAD		4455 Orang	7.000.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN RS							

	URUSAN BIDANG	RENCANA TAHUN 2021					PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
		INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	PAMEUNGPEUK							
	a. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi							
	1) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	jumlah tenaga Non PNS medis paramedis dan tenaga lainnya yang mendapatkan tunjangan	332 Orang	17.919.900.000	PAD		365 Orang	20.000.000.000
	b. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi							
	1). Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	25 Orang	100.000.000	PAD		25 Orang	263.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI RS PAMEUNGPEUK							
	a. Administrasi Umum Perangkat Daerah							
	1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	35 Unit	2.358.616.632	PAD		40 Unit	6.700.000.000
	2) Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah orang yang disediakan Makanan dan Minuman	6000 Orang	200.250.000	PAD		6600 Orang	220.275.000
	3) Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Aparatur yang melakukan Konsultasi dan	150 Orang	260.785.000	PAD		165 Orang	286.863.500

	URUSAN BIDANG	RENCANA TAHUN 2021					PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
		INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	Koordinasi dan Konsultasi SKPD		koordinasi					
	b. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
	1) Pengadaan Mebel		Penyediaan Pekerjaan Partisi Ruangan	1 unit	825.900.205	PAD		1 unit 1.200.000.000
	c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	1) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	5 Gedung	7.952.165.473	PAD		5 Gedung
	d. Peningkatan Pelayanan BLUD							
	1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah waktu Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	12 bulan	31.440.000.000	PAD		12 bulan 40.000.000.000
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (RSKK)							
	a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah							

URISAN BIDANG		RENCANA TAHUN 2021					PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
		INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Provinsi								
	1) Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Pengembangan Gedung Pelayanan Kesehatan di RS Kesehatan Kerja	6	7.422.161.200	PAD		10	185.000.000.000
	2) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik yang diadakan	100	10.423.644.580	PAD		120	12.000.000.000
b. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								
	1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Laporan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7	2.499.709.250	PAD		7	5.000.000.000
	2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus yang disediakan	6	2.957.474.911	PAD		8	3.250.000.000
	3) Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah bahan untuk operasional pelayanan yang diadakan	7	19.308.474.926	PAD		7	21.000.000.000
c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								
	1). Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Jenis Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3 Jenis	614.511.900	PAD		2 Jenis	1.000.000.000
PROGRAM PENINGKATAN								

	URUSAN BIDANG	RENCANA TAHUN 2021						PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
		INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
	KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (RSKK)								
	a. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi								
	1) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah tenaga medis dan non medis yang dibutuhkan	150 orang	13.706.976.160	PAD		200 orang	20.000.000.000
	b. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi								
	1) Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		'Jumlah pelatihan peningkatan kompetensi SDM	150 orang	2.000.000.000	PAD		200 orang	2.200.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (RSKK)								
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	249.977.012	PAD		6 dokumen	200.000.000
	2) Evaluasi Kinerja Perangkat		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	99.590.400	PAD		4 dokumen	50.000.000

	URUSAN BIDANG	RENCANA TAHUN 2021					PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
		INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	Daerah							
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
	1) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi dan Keuangan	1 Laporan	200.000.000	PAD		1 Laporan	100.000.000
	2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	100.000.000	PAD		12 Laporan	100.000.000
	3) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	50.000.000	PAD		1 Laporan	50.000.000
	c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
	1). Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah orang yang melakukan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	70 orang	502.800.000	PAD		70 orang	553.080.000
	d. Administrasi Umum Perangkat Daerah							
	1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	1.090.797.523	PAD		12	1.200.000.000
	2) Penyediaan Peralatan	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	75	160.270.200	PAD		75	175.000.000

	URUSAN BIDANG	RENCANA TAHUN 2021					PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
		INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	Rumah Tangga							
	3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	200000	134.563.070	PAD		200000	200.000.000
	4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	30	8.520.000	PAD		30	
	5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang yang rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	2300	1.200.000.000	PAD		2300	1.320.000.000
	e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
	1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang diadakan	1	450.000.000	PAD		-	1.000.000.000
	2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	1	850.000.000	PAD		1	1.000.000.000
	3) Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang diadakan	40	885.193.796	PAD		80	950.000.000
	f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	20.000.000	PAD		12	

	URUSAN BIDANG	RENCANA TAHUN 2021					PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
		INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran di RSUD Kesehatan Kerja	12	955.948.000	PAD		12	1.051.542.800
	3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	4.596.951.960	PAD		12	4.000.000.000
	g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15 unit	425.280.000	PAD		17 unit	500.000.000
	2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	914.000.000	PAD		12	1.500.000.000
	3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	1.030.330.290	PAD		12	1.500.000.000
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN							

	URUSAN BIDANG	RENCANA TAHUN 2021					PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022		
		INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT LABORATORIUM KESEHATAN								
	a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								
	1) Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Parameter yang diakreditasi setiap tahun naik sebanyak 2 buah Parameter Kegiatan	2 Jenis	228.168.722.781	PAD		2 Jenis	15.000.000.000	
	2) Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Pengadaan pemeliharaan alat Laboratorium di UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat	1 paket	2.062.787.305	PAD		1 paket	4.000.000.000	
	3) Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya).	Jumlah Bahan Pakai Habis Laboratorium Kesehatan	1 paket	497.300.000	PAD		1 paket	2.410.000.000	
	b. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi								
	1) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Waktu Peningkatan kinerja Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat	2 bulan	280.000.000	PAD		2 bulan	500.000.000	

	URUSAN BIDANG	RENCANA TAHUN 2021					PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
		INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN							
	a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
	1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Waktu Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 bulan	3.060.627.424	PAD		12	4.700.000.000
	2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan	45 orang	133.500.000	PAD		50	200.000.000
	b. Administrasi Umum Perangkat Daerah							
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan	12 bulan	29.987.980	PAD		12 bulan	40.000.000
	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	59 unit	830.107.375	PAD		75 unit	2.000.000.000
	3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 bulan	275.013.500	PAD		12 bulan	645.000.000
	4) Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah waktu penyediaan fasilitas kunjungan Tamu	12 bulan	320.000.000	PAD		12 bulan	470.000.000
	5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang yang rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	750 orang	837.031.840	PAD		750 orang	925.000.000

	URUSAN BIDANG	RENCANA TAHUN 2021					PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
		INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
	1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	-				2 unit	3.200.000.000
	2) Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang diadakan	22 unit				35 unit	1.300.000.000
	d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	2.996.460.000	PAD		12 bulan	3.600.000.000
	2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	1.069.954.175	PAD		12 bulan	925.000.000
	3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa pelayanan umum	12 bulan	765.980.651	PAD		12 bulan	925.000.000
	e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah waktu penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	238.300.000	PAD		12 bulan	500.000.000

URUSAN BIDANG		RENCANA TAHUN 2021					PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
		INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	Operasional atau Lapangan							
	2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu Pemeliharaan Gedung Kantor yang mendapat Pemeliharaan/Rehabilitasi	12 bulan	2.980.253.000	PAD		12 bulan	400.000.000
	3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah waktu pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	174.100.000	PAD		12 bulan	5.000.000.000
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPELKES							
	a. Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							
	1) Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah pengembangan fasilitas institusi pelatihan bidang kesehatan	1 Kegiatan Pengembangan Fasilitas Institusi Pelatihan Bidang Kesehatan	354.080.000	PAD		1 Kegiatan Pengembangan Fasilitas Institusi Pelatihan Bidang Kesehatan	430.253.250
	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							

	URUSAN BIDANG	RENCANA TAHUN 2021					PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
		INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	UPELKES							
	a. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi							
	1) Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan yang mendapatkan Pelatihan	6000 orang	2.129.614.643	PAD		6690 orang	3.057.548.840
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH UPELKES							
	a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
	1). Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi dan Keuangan	12 Laporan	62.641.163	PAD		12 Laporan	77.551.454
	b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
	1). Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	25 orang	135.100.000	PAD		25 orang	168.875.000
	c. Administrasi Umum Perangkat Daerah							
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	21.919.700	PAD		12 bulan	27.399.625

	URUSAN BIDANG		RENCANA TAHUN 2021					PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
			INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
	Bangunan Kantor								
	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	66.737.501	PAD		1 paket	83.421.876
	3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1paket	728.142.952	PAD		1paket	841.603.690
	4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	90.901.292	PAD		12 bulan	108.362.417
	5) Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah waktu penyediaan fasilitas kunjungan tamu	12 bulan	94.250.000	PAD		12 bulan	117.812.500
	6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah orang yang rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	64 OK	168.530.000	PAD		64 OK	210.662.500
	d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	272 unit	856.143.200	PAD		-	898.166.500
	e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	823.586.820	PAD		12 bulan	1.001.625.525
	2) Penyediaan Jasa Pelayanan		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	1.736.684.049	PAD		12 bulan	2.170.855.030

URUSAN BIDANG		RENCANA TAHUN 2021					PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022		
		INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
Umum Kantor									
f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	191.061.200	PAD		12 bulan	238.826.500	
2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	4 unit	463.800.000	PAD		4 unit	74.250.000	
3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11 unit	375.206.680	PAD		11 unit	469.008.350	
1) Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan Covid 19 :									
2) Devisi Penanganan Kesehatan									
3) Penanganan Covid-19 dan Percepatan Vaksinasi									

	URUSAN BIDANG PEMRINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2021	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022
KODE				

			INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEGIATAN)	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

	4) Pengadaan Pusat Pemulihan (Asrilia)								
	5) Penyediaan Obat – obat Paket Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 di Jawa Barat								
	6) Penambahan Generator Oksigen								
	7) Pengadaan Pusat Pemulihan di Kabupaten Kota.								
	8)								
	9)								

BAB V

PENUTUP

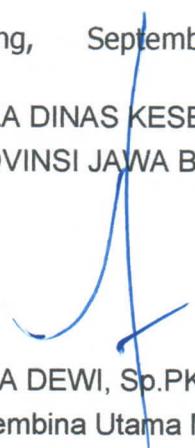
Perubahan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 di lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah Tahun 2021. Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2021 mengacu kepada Rensta Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yang memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan pembangunan yang diemban oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, diharapkan dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.

Semoga Perubahan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2021 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan kesehatan di Provinsi Jawa Barat. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Bandung, September 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT,


Dr. R.NINA SUSANA DEWI, Sp.PK (K)., M.Kes., MMRS
Pembina Utama Madya
NIP. 19630122 198603 2 004